



# KEBERHASILAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 2015/2016



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2016**



# **KEBERHASILAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2015/2016**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2016

## KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Dasar dan  
Menengah, Tahun 2015/2016/Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan  
Pelayanan. – Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan  
Kebudayaan, Kemendikbud, 2016  
xii, 120 hal, bbl, ilus, 23 cm

ISSN 0216-8294

Pengarah:  
Bastari  
Siti Sofiah

Penulis  
Ida Kintamani

Pengolah Data  
Indardjo

Penyunting:  
Sudarwati

Desain Grafika  
Lexy Torar

© Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

## KATA PENGANTAR

Buku “Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah, Tahun 2015/2016” ini merupakan hasil pendayagunaan data dan statistik pendidikan yang mengkaji indikator pendidikan yang telah dikembangkan selama ini. Buku ini disusun dalam upaya memberikan gambaran keberhasilan program pembangunan pendidikan yang disajikan menurut misi 2, yaitu akses pendidikan dan misi 3, yaitu pembelajaran yang bermutu.

Misi 2 akses pendidikan menggunakan 11 indikator, terdiri dari akses yang meluas dengan lima jenis indikator, akses yang merata dengan tiga jenis indikator, dan akses yang berkeadilan dengan tiga jenis indikator. Misi 3 pembelajaran yang bermutu menggunakan enam jenis indikator, terdiri dari mutu guru dengan dua jenis indikator, mutu siswa dengan tiga jenis indikator, dan mutu prasarana dengan satu jenis indikator. Berdasarkan indikator misi 2 dan misi 3 pendidikan maka dihitung keberhasilan program pembangunan pendidikan berdasarkan rata-rata dari kedua misi pendidikan tersebut.

Indikator pendidikan yang digunakan dalam misi 2 dan misi 3 pendidikan memiliki satuan yang berbeda, sehingga perlu dilakukan konversi menggunakan standar tertentu sebagai komposit indikator. Dengan menggunakan standar tersebut maka dihasilkan nilai maksimal 100. Rata-rata dari hasil ke-17 jenis indikator tersebut dijadikan ukuran untuk menentukan keberhasilan program pembangunan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan program pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh komposit indikator misi 2 dan misi 3 pendidikan.

Sumber data yang digunakan dalam menyusun indikator pendidikan ini adalah statistik SD, SMP, SMA, dan SMK yang diterbitkan oleh PDSPK, data nonpendidikan terutama penduduk usia masuk sekolah dan usia sekolah dari BPS, dan Permendikbud atau UU terkait dengan pendidikan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Oktober 2016  
Kepala,



Dr. Bastari  
NIP 196607301990011001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku “Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah, Tahun 2015/2016” ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ketercapaian program pembangunan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah pada tahun pelajaran 2015/2016. Untuk mengukur ketercapaian program pendidikan tersebut maka digunakan misi 2 dan misi 3 pendidikan dengan 17 jenis indikator. Masing-masing misi pendidikan memiliki nilai tersendiri, sehingga dari kedua misi tersebut dihasilkan keberhasilan program pendidikan pada tingkat provinsi dan nasional. Misi 2 adalah mewujudkan akses pendidikan dan misi 3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu.

Misi 2 terdiri dari 3 kelompok akses pendidikan, yaitu akses yang meluas, yang merata, dan yang berkeadilan. Akses yang meluas menggunakan lima indikator, yaitu 1) rasio siswa/sekolah (R-S/Sek), 2) rasio siswa/kelas (R-S/K); 3) rasio kelas/ruang kelas (R-K/RK), 4) persentase perpustakaan (%Perpus), dan 5) persentase laboratorium (%Lab). Akses yang merata menggunakan tiga indikator, yaitu angka partisipasi kasar (APK), angka masukan kasar (AMK) (khusus SD) atau angka melanjutkan (AM) (SMP dan SM), dan tingkat pelayanan sekolah (TPS). Akses yang berkeadilan menggunakan tiga indikator, yaitu 1) perbedaan gender (PG) APK, 2) indeks paritas gender (IPG) APK, dan 3) persentase siswa swasta (%S-Swt).

Misi 3 terdiri dari tiga kelompok mutu, yaitu mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana. Mutu guru terdapat dua indikator, yaitu 1) persentase guru layak (%GL) dan 2) rasio siswa/guru (R-S/G). Mutu siswa terdapat tiga indikator, yaitu 1) angka lulusan (AL), 2) angka mengulang (AU), dan 3) angka putus sekolah (APS). Mutu prasarana terdiri dari satu indikator, yaitu persentase ruang kelas baik (%RKB).

Metode bahasan yang digunakan adalah studi dokumentasi. Studi ini dilaksanakan dengan mempelajari dokumen yang ada seperti statistik persekolahan, khususnya SD, SMP, SMA, dan SMK serta data nonpendidikan khusus penduduk usia masuk sekolah dan usia sekolah untuk dilakukan analisis dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dilengkapi dengan perhitungan indikator pendidikan dan analisis indikator, sehingga dihasilkan keberhasilan program pembangunan pendidikan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dilengkapi dengan tabel dan penjelasan cara membaca indikator serta grafik untuk memudahkan memahami cara membaca.

Agar dapat dihitung nilai masing-masing misi pendidikan maka digunakan standar tertentu untuk indikator yang digunakan seperti yang disajikan pada Tabel 1 dan jenis keberhasilan pendidikan masing-masing misi disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 1**  
**Standar untuk Melakukan Konversi Masing-masing Indikator**

No.	Jenis Indikator	Singkatan	Satuan	SD	SMP	SM	Keterangan
A.	Misi 2 Akses yg meluas, merata, dan berkeadilan						
	Misi 2.1 Akses yang meluas						
1	Rasio Siswa per Sekolah	R-S/Sek	Siswa	192	324	432	Permendikbud
2	Rasio Siswa per Kelas	R-S/K	Siswa	32	36	36	Permendikbud
3	Rasio Kelas per Ruang Kelas	R-K/RK	Kelas	1	1	1	Ideal
4	Persentase Perpustakaan	%Perpus	Persentase	100	100	100	Ideal
5	Persentase Laboratorium	%Lab	Persentase	100	100	100	Ideal
	Misi 2.2 Akses yang merata						
1	Angka Partisipasi Kasar	APK	Persentase	100	80	70	Nasional
2	Angka Masukan Kasar/ Angka Melanjutkan	AMK AM	Persentase	50 -	- 100	- 100	Ideal
3	Tingkat Pelayanan Sekolah	TPS	Siswa	52	81	62	Nasional
	Misi 2.3 Akses yang berkeadilan						
1	Perbedaan Gender APK	PG APK	Persentase	0	0	0	Ideal
2	Indeks Paritas Gender APK	IPG APK	Indeks	1	1	1	Ideal
3	Persentase Siswa Swasta	% S-Swt	Persentase	10.00	25.00	50.00	Nasional
B.	Misi 3 Pembelajaran Bermutu						
	Misi 3.1 Mutu dari Guru						
1	Persentase Guru Layak	%GL	Persentase	100	100	100	Ideal
2	Rasio Siswa per Guru	R-S/G	Siswa	16	14	12	Nasional
	Misi 3.2 Mutu dari siswa						
1	Angka Lulusan	AU	Persentase	100	100	100	Ideal
2	Angka Mengulang	APS	Persentase	0	0	0	Ideal
3	Angka Putus Sekolah	AL	Persentase	0	0	0	Ideal
	Mutu dari Prasarana						
1	Persentase Ruang Kelas baik	% Rkb	Persentase	100	100	100	Ideal
	Jumlah Indikator			17	17	17	

**Tabel 2**  
**Jenis Keberhasilan Pendidikan Berdasarkan Standar Ideal**

No.	Nilai	Misi 2, Misi 3, Keberhasilan
1	95.00-100.00	Paripurna
2	90.00-94.99	Utama
3	85.00-89.99	Madya
4	80.00-84.99	Pratama
5	kurang dari 80.00	Kurang

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program aplikasi yang telah disusun dan telah dilengkapi dengan standar untuk melakukan konversi untuk masing-masing indikator yang terdapat pada Tabel 1 dan jenis keberhasilan berdasarkan kategori wajar dikdas 9 tahun yang terdapat pada Tabel 2 untuk misi 2 dan misi 3 pendidikan, sehingga dapat dengan segera diketahui provinsi mana yang memiliki nilai yang terbaik dan mana yang terburuk. Nilai 100 berarti nilai yang terbaik atau ideal dan nilai mendekati 100 makin baik.

Sesuai dengan misi 2 dan misi 3 pendidikan maka hasil studi juga dirinci menurut misi tersebut. Selain itu, dihasilkan pula keberhasilan program pendidikan

tiap provinsi dan jenjang pendidikan. Berdasarkan keberhasilan program pendidikan menurut jenjang pendidikan yang terdapat pada Tabel 3 maka rata-rata nasional sebesar 80,60 termasuk pratama dengan rincian SD sebesar 76,18 termasuk kurang, SMP sebesar 80,53 termasuk pratama, dan SM sebesar 85,08 termasuk madya. Dengan demikian, keberhasilan program pendidikan terbaik pada SM dan terburuk pada SD. Hal ini wajar karena jangkauan SM lebih mudah dan terletak di kota besar.

Tabel 3  
Rangkuman Keberhasilan Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2015/2016

No.	Nilai Indikator	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
A.	Akses Pendidikan	84,18	90,10	84,93	86,41	MADYA
	1. Akses yang Meluas	72,47	92,72	79,51	81,56	PRATAMA
	2. Akses yang Merata	94,63	90,60	95,26	93,49	UTAMA
	3. Akses yang Berkeadilan	85,46	87,00	80,03	84,16	PRATAMA
B.	Pembelajaran yang Bermutu	68,26	70,94	84,98	74,73	KURANG
	1. Mutu Guru	81,83	86,50	88,64	85,66	MADYA
	2. Mutu Siswa	99,10	99,37	98,73	99,07	PARIPURNA
	3. Mutu Prasarana	23,85	26,97	67,58	39,47	KURANG
	Keberhasilan Program	76,18	80,53	85,08	80,60	PRATAMA
	Jenis Keberhasilan Program	KURANG	PRATAMA	MADYA	PRATAMA	

Bila dilihat pada akses pendidikan maka untuk SD sebesar 84,18 termasuk pratama, SMP sebesar 90,10 termasuk utama, SM sebesar 84,93 termasuk pratama, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 86,41 termasuk madya. Dengan demikian, akses terbaik pada SMP dan terburuk pada SD. Akses pendidikan dihasilkan dari tiga akses, untuk akses yang meluas terbesar pada SMP sebesar 92,72 termasuk utama dan terkecil pada SD sebesar 72,47 termasuk kurang, sehingga rata-rata akses meluas sebesar 81,56 termasuk pratama. Akses yang merata terbesar pada SM sebesar 95,26 termasuk paripurna dan terkecil pada SMP sebesar 90,60 termasuk utama, sehingga rata-rata akses merata sebesar 93,49 termasuk utama. Akses yang berkeadilan terbesar pada SMP sebesar 87,00 termasuk madya dan terkecil pada SM sebesar 80,03 termasuk pratama, sehingga rata-rata akses berkeadilan sebesar 84,16 termasuk pratama.

Bila dilihat pada pembelajaran bermutu maka untuk SD sebesar 68,26 termasuk kurang, SMP sebesar 70,94 juga termasuk kurang, dan SM sebesar 84,98 termasuk pratama, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 74,78 termasuk kurang. Dengan demikian, pembelajaran bermutu terbaik pada SM dan terburuk pada SD. Pembelajaran bermutu dihasilkan dari tiga mutu, mutu guru terbesar pada SM sebesar 88,64 termasuk madya dan terkecil pada SD sebesar 81,83 termasuk pratama, sehingga rata-rata mutu guru sebesar 85,66 termasuk madya. Mutu siswa terbesar pada SMP sebesar 99,37 termasuk paripurna dan terkecil pada SM sebesar 98,73 juga termasuk paripurna, sehingga rata-rata mutu siswa sebesar 99,07 termasuk paripurna. Mutu prasarana terbesar pada SM sebesar 67,58 termasuk kurang dan terkecil pada SD sebesar 23,85 termasuk sangat kurang, sehingga rata-rata mutu prasarana sebesar 39,47 termasuk kurang.

**Tabel 4**  
**Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Jenjang Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	
					Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	81,77	87,40	88,47	85,88	MADYA
2	Jawa Barat	75,61	79,74	84,42	79,93	KURANG
3	Banten	77,38	80,55	83,77	80,57	PRATAMA
4	Jawa Tengah	77,43	82,33	87,50	82,42	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	81,79	86,24	91,13	86,39	MADYA
6	Jawa Timur	77,14	83,59	86,62	82,45	PRATAMA
7	Aceh	70,67	76,49	84,23	77,13	KURANG
8	Sumatera Utara	79,96	84,06	86,42	83,48	PRATAMA
9	Sumatera Barat	77,78	78,85	85,63	80,75	PRATAMA
10	Riau	79,58	80,50	85,40	81,83	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	80,37	84,23	82,17	82,25	PRATAMA
12	Jambi	75,18	75,88	84,83	78,63	KURANG
13	Sumatera Selatan	77,68	82,35	87,23	82,42	PRATAMA
14	Bangka Belitung	82,52	82,59	84,78	83,30	PRATAMA
15	Bengkulu	76,01	78,01	85,10	79,71	KURANG
16	Lampung	75,58	82,30	84,78	80,89	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	75,46	79,34	84,83	79,88	KURANG
18	Kalimantan Tengah	76,49	79,26	84,32	80,02	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	75,50	78,81	84,63	79,65	KURANG
20	Kalimantan Timur	81,06	83,71	85,41	83,39	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	70,85	81,27	85,84	79,32	KURANG
22	Sulawesi Utara	78,61	83,16	85,93	82,57	PRATAMA
23	Gorontalo	77,27	78,68	85,12	80,36	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	74,47	77,48	83,38	78,44	KURANG
25	Sulawesi Selatan	75,68	80,62	85,71	80,67	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	69,82	75,71	82,01	75,85	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	70,19	77,21	84,61	77,34	KURANG
28	Maluku	74,47	78,13	82,66	78,42	KURANG
29	Maluku Utara	74,37	77,52	84,19	78,70	KURANG
30	Bali	81,97	85,32	85,53	84,28	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	72,64	76,98	84,22	77,95	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	75,08	80,37	85,25	80,23	PRATAMA
33	Papua	66,50	78,11	81,44	75,35	KURANG
34	Papua Barat	73,31	81,03	85,18	79,84	KURANG
	Indonesia	76,18	80,53	85,08	80,60	PRATAMA
	Jenis Keberhasilan	KURANG	PRATAMA	MADYA	PRATAMA	

Bila dilihat berdasarkan tiap provinsi yang terdapat pada Tabel 4 maka keberhasilan program pembangunan pendidikan dari tiga jenjang pendidikan lima besar pada Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, lima terkecil terdapat pada Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Sulawesi Barat, dan Papua. Dengan demikian, kondisi pendidikan di lima provinsi terkecil perlu mendapat perhatian khusus.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GRAFIK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan .....	4
D. Ruang Lingkup .....	5
E. Manfaat Studi .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	8
A. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .....	8
B. Program Pembangunan Pendidikan .....	9
C. Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi Pendidikan .....	11
D. Pengukuran Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan .....	15
BAB III METODOLOGI .....	19
A. Metode .....	19
B. Cara Menghitung Indikator Pendidikan .....	22
C. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan .....	39
BAB IV HASIL DAN BAHASAN .....	41
A. Akses Pendidikan .....	41
B. Pembelajaran yang Bermutu .....	78
C. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan .....	106
BAB V PENUTUP .....	117
A. Simpulan .....	117
B. Saran .....	118
C. Rekomendasi .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	120

## DAFTAR BAGAN/TABEL

	Halaman	
<b>BAB II</b>		
Bagan 2.1	Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3 Rencana Strategi Kemendikbud 2015-2019	16
Bagan 2.2	Keberhasilan Program Pendidikan Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3 Pendidikan	17
<b>BAB III</b>		
Tabel 3.1	Variabel Data berdasarkan Misi 2 dan Misi 3	19
Tabel 3.2	Indikator Pendidikan berdasarkan Misi 2 dan Misi 3	20
Tabel 3.3	Standar untuk Melakukan Konversi Tiap-tiap Indikator Pendidikan	21
Tabel 3.4	Jenis Keberhasilan Pendidikan Berdasarkan Kategori Wajar Dikdas 9 Tahun	21
<b>BAB IV</b>		
Tabel 4.1	Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Meluas Menurut Jenjang Pendidikan	41
Tabel 4.2	Data dan Indikator Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi	44
Tabel 4.3	Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi	45
Tabel 4.4	Data dan Indikator Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi	46
Tabel 4.5	Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi	48
Tabel 4.6	Data dan Indikator Akses yang Meluas SM Tiap Provinsi	50
Tabel 4.7	Akses yang Meluas SM Tiap Provinsi	52
Tabel 4.8	Akses yang Meluas Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	54
Tabel 4.9	Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Merata Menurut Jenjang Pendidikan	56
Tabel 4.10	Data dan Indikator Akses yang Merata SD Tiap Provinsi	57
Tabel 4.11	Akses yang Merata SD Tiap Provinsi	59
Tabel 4.12	Data dan Indikator Akses yang Merata SMP Tiap Provinsi	61
Tabel 4.13	Akses yang Merata SMP Tiap Provinsi	62
Tabel 4.14	Data dan Indikator Akses yang Merata SM Tiap Provinsi	63
Tabel 4.15	Akses yang Merata SM Tiap Provinsi	63
Tabel 4.16	Akses yang Merata Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	63

	Halaman	
Tabel 4.17	Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Berkeadilan Menurut Jenjang Pendidikan	65
Tabel 4.18	Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SD Tiap Provinsi	67
Tabel 4.19	Akses yang Berkeadilan SD Tiap Provinsi	68
Tabel 4.20	Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SMP Tiap Provinsi	69
Tabel 4.21	Akses yang Berkeadilan SMP Tiap Provinsi	70
Tabel 4.22	Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SM Tiap Provinsi	72
Tabel 4.23	Akses yang Berkeadilan SM Tiap Provinsi	73
Tabel 4.24	Akses yang Berkeadilan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	74
Tabel 4.25	Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan	76
Tabel 4.26	Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	77
Tabel 4.27	Data, Indikator, dan Nilai Mutu Guru Menurut Jenjang Pendidikan	79
Tabel 4.28	Data dan Indikator Mutu Guru SD Tiap Provinsi	80
Tabel 4.29	Mutu Guru SD Tiap Provinsi	81
Tabel 4.30	Data dan Indikator Mutu Guru SMP Tiap Provinsi	82
Tabel 4.31	Mutu Guru SMP Tiap Provinsi	83
Tabel 4.32	Data dan Indikator Mutu Guru SM Tiap Provinsi	84
Tabel 4.33	Mutu Guru SM Tiap Provinsi	85
Tabel 4.34	Mutu Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	86
Tabel 4.35	Data, Indikator, dan Nilai Mutu Siswa Menurut Jenjang Pendidikan	88
Tabel 4.36	Data dan Indikator Mutu Siswa SD Tiap Provinsi	90
Tabel 4.37	Mutu Siswa SD Tiap Provinsi	91
Tabel 4.38	Data dan Indikator Mutu Siswa SMP Tiap Provinsi	92
Tabel 4.39	Mutu Siswa SMP Tiap Provinsi	93
Tabel 4.40	Data dan Indikator Mutu Siswa SM Tiap Provinsi	94
Tabel 4.41	Mutu Siswa SM Tiap Provinsi	95
Tabel 4.42	Mutu Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	96
Tabel 4.43	Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana Menurut Jenjang Pendidikan	98
Tabel 4.44	Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana SD Tiap Provinsi	99
Tabel 4.45	Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana SMP Tiap Provinsi	100

	Halaman	
Tabel 4.46	Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana SM Tiap Provinsi	101
Tabel 4.47	Mutu Prasarana Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	102
Tabel 4.48	Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan	104
Tabel 4.49	Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	105
Tabel 4.50	Keberhasilan Program Pendidikan menurut Misi 2 dan Misi 3 serta Jenjang Pendidikan	107
Tabel 4.51	Keberhasilan Program Pendidikan SD Tiap Provinsi	109
Tabel 4.52	Keberhasilan Program Pendidikan SMP Tiap Provinsi	111
Tabel 4.53	Keberhasilan Program Pendidikan SM Tiap Provinsi	113
Tabel 4.54	Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	115

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
<b>BAB IV</b>	
Grafik 4.1 Akses yang Meluas Semua Jenjang Tiap Provinsi	53
Grafik 4.2 Akses yang Merata Semua Jenjang Tiap Provinsi	64
Grafik 4.3 Akses yang Berkeadilan Semua Jenjang Tiap Provinsi	75
Grafik 4.4 Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan	
Grafik 4.5 Rangkuman Akses Pendidikan Semua Jenjang Tiap Provinsi	78
Grafik 4.6 Mutu Guru Semua Jenjang Tiap Provinsi	87
Grafik 4.7 Mutu Siswa Semua Jenjang Tiap Provinsi	97
Grafik 4.8 Mutu Prasarana Semua Jenjang Tiap Provinsi	103
Grafik 4.9 Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan	104
Grafik 4.10 Rangkuman Pembelajaran Bermutu Semua Jenjang Tiap Provinsi	106
Grafik 4.11 Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan	107
Grafik 4.12 Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Misi 2 dan 3 Pendidikan	108
Grafik 4.13 Keberhasilan Program Pendidikan SD Tiap Provinsi	110
Grafik 4.14 Keberhasilan Program Pendidikan SMP Tiap Provinsi	112
Grafik 4.15 Keberhasilan Program Pendidikan SM Tiap Provinsi	114
Grafik 4.16 Keberhasilan Program Pendidikan Semua Jenjang Tiap Provinsi	116

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Program pembangunan pendidikan sampai saat ini terus diupayakan, bahkan pemerintah mempunyai komitmen untuk mendukung program-program pembangunan pendidikan tersebut dengan mengupayakan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN dan APBD mulai tahun 2010. Pembangunan pendidikan dapat dilihat secara nyata pada penyelenggaraan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal. Dengan berkembangnya peserta didik maka diperlukan tambahan guru dan prasarana pendidikan. Pada saat sekarang, penyediaan guru terus diupayakan agar mencukupi kebutuhan guru sesuai dengan bertambahnya peserta didik. Demikian juga pengadaan sarana prasarana pendidikan terus dilakukan pemerintah seperti penyediaan gedung, rehabilitasi ruang kelas, dan fasilitas sekolah lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium. Bukti lain adalah adanya penyempurnaan kurikulum dalam rangka pengembangan proses pendidikan yang bermutu.

Proses pendidikan setidaknya-tidaknya bertumpu pada empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), yaitu 1) *learning to know*, 2) *learning to do*, 3) *learning to be*, dan 4) *learning to live together* yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar, yaitu 1) membaca, 2) menulis, 3) mendengar, 4) menutur, 5) menghitung, 6) meneliti, 7) menghafal, dan 8) menghayal. Hal ini sesuai dengan penyempurnaan kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan saat ini. (UNESCO/OECD, 2015).

Dalam kaitan dengan pendidikan, penyusunan kebijakan pendidikan, pengambilan keputusan tentang pendidikan, dan perencanaan pendidikan seharusnya ditunjang dengan data dan informasi. Dengan adanya data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan reliabel akan dapat diambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Demikian juga untuk perencanaan, penggunaan data dan informasi yang benar akan menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak akan terjadi adanya kesalahan penempatan sekolah, kesalahan distribusi prasarana pendidikan, kesalahan alokasi guru, dan lainnya. Oleh karena itu, data dan informasi tersebut hendaknya dijadikan bahan acuan oleh para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan baik dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi maupun penyelenggaraan pendidikan.

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam rencana strategi merupakan penugasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemendikbud bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas

Presiden dan bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemendikbud.

Arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong. Kebijakan ini dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, terdapat permasalahan pokok dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh karena itu, tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dan meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.

Dengan mengacu pada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025 serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan maka ditetapkan visi Kemendikbud 2019, yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rencana strategi kebijakan Kemendikbud yang sedang digalakkan maka kebijakan pendidikan tertuang dalam Rencana Strategi Kemendikbud dalam rangka Pembangunan Pendidikan 2015--2019. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam lima misi Kemendikbud, yaitu 1) M1 adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, 2) M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, 3) M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu, 4) M4 mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, dan 5) M5 adalah mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 11, Tahun 2015 Pasal 797 sampai 816 berisi tentang Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, PDSPK menyelenggarakan fungsi 1) penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; 2) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pendidikan dan kebudayaan; 3) pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; dan 4) pelaksanaan administrasi pusat. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015b).

Mengolah data dan menyajikan data ini terutama ditujukan untuk memberi kemudahan kepada para penyusun kebijakan dan pengambil keputusan terutama di lingkungan Kemendikbud dalam rangka perencanaan pembangunan pendidikan dan pelayanan data pendidikan dan kebudayaan. Perhatian utama dipusatkan pada visi Kemendikbud 2019 adalah Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.

Dalam rangka perumusan kebijakan, khususnya di bidang pendidikan, informasi mengenai jumlah sekolah, siswa baru, siswa, guru, lulusan, kelas, ruang kelas, dan data pendidikan lainnya sangat diperlukan untuk menunjang upaya perencanaan

pembangunan sistem pendidikan dan penilaian perkembangan pendidikan. Di samping itu, dalam perkembangan selanjutnya penyediaan data dan informasi tidak hanya terbatas pada data pokok melainkan juga rincian datanya. Data pendidikan tidak hanya untuk kepentingan di dalam negeri melainkan juga untuk kepentingan internasional dan dalam studi perbandingan antarnegara sebagai wahana memperluas wawasan dalam melaksanakan analisis sistem pendidikan nasional. Pemahaman akuntabilitas kinerja pendidikan di luar negeri akan memacu pendidikan nasional untuk mengikuti perkembangan pendidikan dalam kancah internasional dalam rangka globalisasi khususnya globalisasi pendidikan.

Dengan keberhasilan program pembangunan pendidikan selama ini maka kebutuhan akan peningkatan mutu data dan bentuk informasi pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini mengakibatkan makin banyaknya warganegara terdidik, masyarakat makin kritis, dan perhatian terhadap pendidikan makin baik dalam hal pelaksanaan misi pendidikan.

Untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan dinyatakan dalam berbagai indikator pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan indikator-indikator pendidikan yang sesuai dengan misi pendidikan, baik secara makro maupun mikro. Walaupun demikian, model indikator pendidikan yang disajikan pada saat ini dibatasi pada data agregat nasional dan provinsi dengan maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional dan provinsi secara makro. Selain itu, indikator pendidikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan perbandingan antarprovinsi dan antarnegara. Indikator pendidikan juga merupakan salah satu dari sejumlah faktor yang sangat penting dalam upaya mendeteksi tercapainya cita-cita sistem pendidikan nasional. Indikator pendidikan ini dapat digunakan sebagai peringatan awal terhadap permasalahan pendidikan yang ada di lapangan.

Indikator adalah suatu alat yang memiliki potensi untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan antara berbagai aspek pendidikan yang berbeda di dalam sistem pendidikan dan antara beberapa aspek tertentu di dalam sistem pendidikan dengan sistem sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan hidup manusia. Potensi itu akan menjadi kekuatan yang nyata bila indikator itu disusun dan disajikan secara sistematis dan mudah serta menarik mengenai hubungan-hubungan tersebut sehingga mudah dipahami oleh setiap pengelola pendidikan dan para *stakeholders*.

Menurut "*World Education Report*", indikator yang baik mempunyai lima karakteristik, yaitu 1) relevan dengan kebijakan, 2) mudah digunakan, 3) diambil dari suatu variabel, 4) secara teknis valid, reliabel dan dapat dibandingkan, dan 5) mudah diukur dan menggunakan dana yang sesuai. Pertama, relevan dengan kebijakan, artinya mampu memberikan keterangan secara jelas dan tidak memiliki multiarti terhadap isu kebijakan kunci. Kedua, mudah digunakan, artinya mudah dipahami karena dalam bentuk angka-angka yang sederhana, sehingga semua pengelola pendidikan di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan sampai satuan pendidikan memahaminya. Ketiga, diambil dari suatu variabel (misalnya siswa/mahasiswa), sehingga dapat dilakukan interpretasi di dalam konteks variabel lain (misalnya kependudukan) atau satu indikator dapat digunakan bersama-sama dengan indikator lain untuk menghasilkan indikator yang tidak hanya berkaitan

dengan kondisi pendidikan melainkan juga kondisi nonpendidikan. Keempat, secara teknis valid, reliabel, dan dapat dibandingkan, artinya data yang dihasilkan selalu sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu ketika diperlukan, dan dapat dibandingkan dengan data lainnya agar menghasilkan indikator yang rasional. Kelima, mudah diukur dan penggunaan dana yang sesuai, artinya statistik yang diperoleh sebagai hasil penurunan beberapa indikator mudah diukur dalam kurun waktu yang tersedia dan dengan biaya yang terjangkau.

Pada kenyataannya, sampai saat ini belum semua pengelola pendidikan yang berada di jajaran Kemendikbud maupun pengelola pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memahami apa yang dimaksud dengan indikator pendidikan dan apa kaitannya dengan akuntabilitas keberhasilan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan dan kajian indikator pendidikan untuk akuntabilitas keberhasilan program pembangunan pendidikan ini menjadi salah satu cara agar pengelola pendidikan dapat memahami berbagai jenis indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk menilai program pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan. Untuk itu, Rencana Strategi Kemendikbud dalam rangka Pembangunan Pendidikan 2015—2019 dengan misi pendidikan yang sesuai dengan program pembangunan pendidikan adalah pada misi 2 dan misi 3. Misi 2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan misi 3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Dengan demikian, untuk menilai program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan maka digunakan misi 2 dan misi 3.

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah:

1. Bagaimana indikator pendidikan dari misi 2 mewujudkan akses pendidikan yang terdiri dari tiga akses, yaitu akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan?
2. Bagaimana indikator pendidikan dari misi 3 mewujudkan pembelajaran bermutu yang terdiri dari tiga mutu, yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu dilihat dari guru, siswa, dan prasarana dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan?
3. Bagaimana keberhasilan program pembangunan pendidikan yang digambarkan dari indikator pendidikan misi 2 dan 3 berdasarkan Renstra Pendidikan 2015-2019?

## C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang timbul, terdapat dua tujuan, yaitu 1) tujuan umum dan 2) tujuan khusus. Tujuan umum dilakukannya kajian keberhasilan program pembangunan pendidikan melalui indikator pendidikan adalah untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan yang diukur menggunakan misi 2 dan misi 3 pendidikan. Dengan kata lain, tujuan umum studi

yang berjudul “Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah” ini merupakan kajian bagaimana program pembangunan pendidikan dinyatakan berhasil menggunakan indikator pendidikan berdasarkan misi 2 dan misi 3 pendidikan. Indikator pendidikan ini dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dilihat dari keakuratan, ketepatan, dan kecepatannya oleh para pengambil keputusan serta para penentu kebijakan di bidang pendidikan.

Tujuan khusus kajian keberhasilan program pembangunan pendidikan tahun pelajaran 2015/2016 tiap provinsi dan nasional pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SM ini adalah:

1. Mengkaji sejauh mana misi 2 yang terdiri dari tiga akses, yaitu mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan jenjang pendidikan dasar dan menengah telah tercapai.
2. Mengkaji sejauh mana misi 3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu yang terdiri dari tiga mutu, yaitu mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana jenjang pendidikan dasar dan menengah telah tercapai.
3. Mengkaji sejauh mana keberhasilan program pembangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan komposit misi 2 akses dan misi 3 mutu telah tercapai.

#### D. Ruang Lingkup

Fokus utama kajian program pembangunan pendidikan adalah menghasilkan indikator pendidikan yang berasal dari misi 2 akses pendidikan, yaitu 1) mewujudkan akses yang meluas, 2) akses yang merata, 3) akses yang berkeadilan, dan misi 3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu, yaitu 4) mutu guru, 5) mutu siswa, 6) mutu prasarana, dan keberhasilan pembangunan program pendidikan, yaitu 7) meningkatkan ketercapaian keberhasilan pembangunan program pendidikan berdasarkan misi 2 dan 3 pendidikan.

Kajian pertama tentang indikator sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana akses yang meluas telah terwujud. Kajian kedua tentang indikator sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana akses yang merata telah terwujud. Kajian ketiga tentang indikator sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana akses yang berkeadilan telah terwujud.

Kajian keempat tentang indikator sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana mutu guru telah terwujud. Kajian kelima tentang indikator sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana mutu siswa telah terwujud. Kajian keenam tentang indikator sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana mutu prasarana telah terwujud.

Kajian ketujuh tentang indikator sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan pendidikan menggunakan indikator misi 2 dan misi 3 telah tercapai. Kemudian diambil rata-rata dari ketiga kelompok indikator akses pendidikan tersebut sebagai ukuran keberhasilan misi 2 dan rata-rata dari ketiga kelompok mutu pendidikan sebagai ukuran keberhasilan misi 3, sedangkan rata-rata akses pendidikan dan mutu pendidikan sebagai ukuran keberhasilan program pembangunan pendidikan. Selain itu, karena keterbatasan data yang dimiliki maka

indikator pendidikan yang disusun hanya pada indikator yang tersedia dan dianggap relevan untuk menggambarkan kondisi keberhasilan program pembangunan pendidikan suatu daerah, sehingga hanya digunakan 11 indikator misi 2 akses pendidikan dan 6 indikator misi 3 mutu pendidikan.

Untuk jenis satuan pendidikan, kajian dilakukan hanya pada pendidikan dasar dan menengah atau jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SM yang dikelola oleh Kemendikbud.

## E. Manfaat Studi

Kajian terhadap program pembangunan pendidikan ini memberikan informasi tentang keberhasilan program pendidikan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Namun, pada buku ini hanya dijabarkan untuk tingkat provinsi dan nasional secara makro. Oleh karena itu, kajian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota agar dapat diketahui seberapa jauh ketercapaian misi 2 dan misi 3 dari renstra pendidikan dan keberhasilan program pembangunan pendidikan.

### 1. Bagi pemerintah pusat:

- a. Dapat mengetahui bagaimana kesenjangan antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota dalam pencapaian keberhasilan pendidikan menggunakan ukuran misi 2 dan misi 3 pendidikan.
- b. Dapat mengetahui misi pendidikan mana yang belum dapat dicapai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Dapat mengetahui apakah akses pendidikan telah meluas, merata, dan berkeadilan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- d. Dapat mengetahui apakah mutu pendidikan telah tercapai dari segi mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- e. Dapat digunakan sebagai alokasi pengadaan atau rehabilitasi yang terkait dengan prasarana pendidikan pada tingkat nasional.
- f. Dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan atau tambahan yang diperlukan pada tingkat nasional.
- g. Dapat sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tingkat nasional terkait dengan misi 2 dan misi 3 pendidikan.

### 2. Bagi pemerintah provinsi:

- a. Dapat mengetahui bagaimana kesenjangan antarkabupaten/kota dalam pencapaian keberhasilan pendidikan menggunakan ukuran misi 2 dan misi 3 pendidikan.
- b. Dapat mengetahui misi pendidikan yang mana yang belum dapat dicapai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Dapat mengetahui apakah akses pendidikan telah meluas, merata, dan berkeadilan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- d. Dapat mengetahui apakah mutu pendidikan telah tercapai dari segi mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  - e. Dapat digunakan sebagai alokasi pengadaan atau rehabilitasi yang terkait dengan prasarana pendidikan pada tingkat provinsi.
  - f. Dapat digunakan sebagai bahan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan atau tambahan yang diperlukan pada tingkat provinsi.
  - g. Dapat sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tingkat provinsi terkait dengan misi 2 dan misi 3 pendidikan.
3. Bagi pemerintah kabupaten/kota:
- a. Dapat mengetahui misi pendidikan mana yang belum dapat dicapai oleh kabupaten/kota.
  - b. Dapat digunakan sebagai alokasi pengadaan atau rehabilitasi yang terkait dengan prasarana pendidikan pada tingkat kabupaten/kota.
  - c. Dapat digunakan sebagai bahan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan atau tambahan yang diperlukan pada tingkat kabupaten/kota.
  - d. Dapat sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tingkat kabupaten/kota terkait dengan misi 2 dan 3 pendidikan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Renstra Pendidikan 2015-2019 ditetapkan lima misi sebagai berikut. Misi dengan kode M1 adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, kode M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, kode M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu, kode M4 adalah mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, dan M5 adalah mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Misi Kemendikbud dapat dimaknai dalam lima hal sebagai berikut.

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah dengan menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan, memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan, serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional;

mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Berdasarkan pada misi pendidikan maka studi ini tidak menggunakan semua misi Kemendikbud, melainkan hanya diterapkan pada misi 2 akses pendidikan dan misi 3 pembelajaran yang bermutu karena sesuai dengan kajian keberhasilan program pembangunan pendidikan.

## B. Program Pembangunan Pendidikan

Sesuai dengan misi pendidikan dan kebudayaan M1 sampai M5 maka layanan pendidikan hanya difokuskan pada M2 dan M3. Oleh karena itu, program pembangunan pendidikan yang dimaksud di sini adalah semua program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan M2, yaitu akses yang meluas, merata, dan berkeadilan serta M3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu dari segi guru, siswa, dan prasarana.

Mewujudkan M2 dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun, meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan serta bagi wilayah terdepan/terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Mewujudkan M3 dilaksanakan dengan meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan dan memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman dan penguatan praktik baik dan inovasi.

Berdasarkan M2 dan M3 maka untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi maka diperlukan tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019. M2 dan M3 ada pada tujuan strategis 3 dan tujuan strategis 4. Tujuan strategi 3 adalah peningkatan akses PAUD, Dikdas,

Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Peningkatan akses pendidikan di semua jenjang dan dalam pendidikan masyarakat telah dilaksanakan selama ini, namun upaya lebih lanjut akan dilakukan mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antarprovinsi dan kabupaten/kota. Perhatian lebih besar diberikan pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus. Peningkatan akses PAUD perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan karena PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dalam menyiapkan memasuki jenjang pendidikan dasar. Selain itu, meskipun penuntasan wajib belajar 9 tahun telah dilaksanakan namun peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar 12 tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya, lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan fokus peningkatan akses pendidikan menengah. Peningkatan akses pendidikan masyarakat mencakup peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan pelatihan serta pendidikan orang dewasa/keluarga. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Tujuan strategis 4 adalah peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran berorientasi pada pembentukan karakter. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik, evaluasi secara terus menerus atas pelaksanaan kurikulum, sehingga menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan keterampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus sangat diperlukan untuk menjamin mutu peserta pelatihan dan kursus dapat diterima oleh pasar kerja. Peningkatan mutu pendidikan orang dewasa juga dilakukan dengan pendidikan keluarga yang memberikan wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang kiat mendidik anak melalui pendampingan yang menyeluruh. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Berdasarkan program pembangunan pendidikan yang dijelaskan di atas maka studi ini diterapkan hanya untuk jenjang pendidikan formal, yaitu SD, SMP, dan SM (penjumlahan dari SMA dan SMK), menggunakan misi pendidikan M2 dan M3.

### C. Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi Pendidikan

Berdasarkan misi pendidikan maka untuk tiap misi ditentukan jenis indikator pendidikan yang sesuai dengan masing-masing misi pendidikan. Indikator pendidikan hanya dapat diperoleh setelah ada perhitungan antara berbagai variabel data pendidikan maupun data pendidikan dengan nonpendidikan. Berdasarkan misi 2 dan misi 3 maka jenis indikator pendidikan yang digunakan disajikan berikut ini.

#### 1. Misi 2 Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan

Misi 2 dapat dirinci menjadi tiga, yaitu akses yang meluas, akses yang merata, dan akses yang berkeadilan.

Untuk menentukan apakah misi 2 akses yang meluas telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan tujuh jenis indikator pendidikan, yaitu

- a. Rasio siswa per sekolah (R-S/Sek)
- b. Rasio siswa per kelas (R-S/K) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013)
- c. Rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK)
- d. Persentase perpustakaan (%Perpus)
- e. Persentase ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) (%UKS)
- f. Persentase laboratorium (%Lab)
- g. Persentase tempat olahraga (%TOR)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk akses yang meluas disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. R-S/Sek dijadikan ukuran untuk melihat besar kecilnya sekolah yang ditetapkan dari pembakuan tipe sekolah. R-S/K digunakan untuk melihat padatnya suatu kelas berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2013. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Setiap kelas seharusnya dalam perencanaan pembangunan sekolah diisi oleh 32 siswa untuk jenjang SD dan 36 untuk jenjang SMP. R-K/RK digunakan untuk melihat pemakaian atau pemanfaatan ruang kelas apakah sudah sesuai dengan tujuan bahwa setiap ruang kelas hanya digunakan sekali kegiatan belajar mengajar.

%Perpus dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan perpustakaan di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki perpustakaan. %UKS dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan ruang usaha kesehatan di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki ruang UKS. %Lab dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan laboratorium di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki laboratorium, terlebih SMA harusnya memiliki 6 jenis laboratorium dan SMK memiliki 3 jenis laboratorium. %TOR dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan tempat olahraga di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki tempat olahraga.

Dengan demikian, untuk mengetahui apakah akses pendidikan telah meluas maka ketujuh indikator tersebut dilakukan konversi untuk menghasilkan satuan yang sama menjadi nilai akses. Nilai akses yang meluas adalah penjumlahan nilai ketujuh indikator akses yang meluas dibagi tujuh dengan asumsi bahwa setiap indikator akses yang meluas memiliki peranan yang sama.

Untuk menentukan apakah misi 2 akses yang merata telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan empat jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Angka partisipasi kasar (APK) atau angka partisipasi murni (APM).
- b. Angka masukan kasar (AMK) SD atau angka melanjutkan (AM) khusus SMP dan SM.
- c. Tingkat pelayanan sekolah (TPS)
- d. Satuan biaya (SB)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk mengetahui akses yang merata dan disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. Penggunaan APK tingkat SD adalah untuk melihat partisipasi siswa tingkat SD terhadap penduduk usia 7-12 tahun, APK tingkat SMP adalah untuk melihat partisipasi siswa tingkat SMP terhadap penduduk usia 13-15 tahun, sedangkan APK tingkat SM adalah untuk melihat partisipasi siswa tingkat SM terhadap penduduk usia 16-18 tahun. Sebaliknya, APM tingkat SD adalah partisipasi siswa tingkat SD yang sesuai dengan usia sekolah resmi SD, APM tingkat SMP adalah partisipasi siswa tingkat SMP yang sesuai dengan usia resmi SMP, sedangkan APM tingkat SM adalah partisipasi siswa tingkat SM yang sesuai dengan usia resmi SM.

Pemilihan AMK SD karena merupakan akses pertama kali masuk ke SD, sedangkan AM khusus untuk SMP dan SM, karena merupakan akses lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, untuk masuk SD tidak harus tamat dari PAUD tetapi dapat langsung dari rumah tangga atau penduduk usia 6--7 tahun. Sebaliknya, pemilihan AM SMP dan AM SM karena jika siswa belum lulus SD/MI atau Paket A tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMP, demikian juga jika siswa yang belum lulus SMP/MTs atau Paket B tidak dapat melanjutkan ke tingkat SM/MA.

TPS dijadikan alat untuk menilai tingkat pelayanan pendidikan sekolah. Bila nilainya kecil, artinya dapat menampung siswa lebih besar jika dibandingkan dengan nilai yang besar, artinya dapat menampung lebih sedikit. Dengan demikian, akses yang besar dapat diartikan merata.

Satuan biaya dijadikan alat untuk menilai akses yang merata dilihat dari segi biaya. Bila nilainya kecil maka partisipasi pemerintah dalam pendidikan kecil, sehingga akses sekolah oleh masyarakat kurang merata. Sebaliknya, bila nilainya besar maka partisipasi pemerintah dalam pendidikan sangat besar, sehingga akses ke sekolah oleh masyarakat lebih mudah.

Dengan demikian, untuk mengetahui akses yang merata maka keempat indikator tersebut dilakukan konversi untuk menghasilkan satuan yang sama menjadi nilai akses yang merata. Nilai keempat indikator akses yang merata kemudian dijumlahkan dan dibagi empat dengan asumsi bahwa setiap indikator memiliki peranan yang sama.

Untuk menentukan apakah misi 2 akses yang berkeadilan telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan tiga jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Perbedaan gender APK (PG APK)
- b. Indeks paritas gender APK (IPG APK)
- c. Persentase siswa swasta (%S-Swt).

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk melihat keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan disesuaikan dengan data tahunan yang tersedia. PG APK dijadikan

ukuran untuk menilai apakah ada perbedaan layanan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan. Bila nilainya minus (-) atau positif (+) berarti masih terjadi PG APK dalam layanan pendidikan. Disebut tidak ada PG APK dalam layanan pendidikan bila nilainya 0. Jadi, idealnya PG APK adalah 0.

IPG APK dijadikan ukuran untuk menilai apakah terjadi kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan. Bila nilainya kurang dari 1 (0,..) atau lebih dari 1 (1,..) berarti belum ada kesetaraan gender dalam layanan pendidikan. Disebut setara dalam layanan pendidikan bila nilainya 1. Jadi, idealnya IPG APK adalah 1.

%S-Swt dijadikan ukuran keadilan dilihat dari status sekolah antara negeri dengan swasta sebagai partisipasi masyarakat. Artinya, tidak ada perbedaan dalam bersekolah di negeri maupun swasta. %S-Swt belum diketahui berapa nilai idealnya. Namun, makin tinggi nilainya berarti makin tinggi partisipasi swasta dalam pendidikan.

Dengan demikian, untuk mengetahui akses yang berkeadilan dalam layanan pendidikan maka ketiga indikator yang berkeadilan tersebut dilakukan konversi sehingga memiliki satuan yang sama menjadi nilai akses yang berkeadilan. Nilai akses yang berkeadilan kemudian dijumlahkan dan dibagi tiga dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

Bila masing-masing kelompok indikator telah diperoleh nilainya maka untuk mengetahui akses layanan pendidikan dilihat dari tiga sumber akses maka nilai tiga sumber akses dijumlahkan kemudian dibagi 3 dengan asumsi bahwa kelompok indikator memiliki peranan yang sama. (Kintamani, 2016).

## 2. Misi 3 Mewujudkan Pembelajaran Bermutu

Misi 3 dapat dirinci menjadi tiga, yaitu mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana. Untuk menentukan apakah misi 3 mutu guru telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan tiga jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Persentase guru layak (%GL)
- b. Persentase guru sertifikat (%GS)
- c. Rasio siswa per guru (R-S/G)

Pemilihan jenis indikator pendidikan mutu guru disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. Mutu sumber daya manusia dilihat dari %GL, %GS, dan R-S/G karena guru dianggap yang paling menentukan mutu pendidikan. %GL dijadikan ukuran untuk melihat guru yang mengajar sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No. 14/2005). (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Makin besar nilai %GL diharapkan guru mengajar lebih baik, sehingga mutu pendidikan diharapkan makin meningkat. Sesuai dengan UU tersebut maka %GL untuk SD sampai SM diukur dengan tingkat ijazah guru adalah sarjana atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi. %GS adalah guru yang memiliki sertifikat mengajar, artinya selain guru memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi maka langkah berikutnya dilakukan sertifikasi guru. Makin tinggi nilainya maka makin banyak guru yang telah memiliki sertifikat atau memiliki kompetensi dalam mengajar.

R-S/G dijadikan ukuran untuk melihat kuantitas guru. Bila angka R-S/G lebih kecil dari standar berarti kelebihan guru, sedangkan bila lebih besar dari standar berarti kekurangan guru.

Dengan demikian, untuk mengetahui mutu guru dalam layanan pendidikan maka ketiga indikator mutu guru tersebut dilakukan konversi sehingga memiliki satuan yang sama menjadi nilai mutu guru. Nilai mutu guru kemudian dijumlahkan dan dibagi tiga dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

Untuk menentukan apakah misi 3 dilihat dari mutu siswa telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan enam jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Persentase siswa baru PAUD (%SB PAUD)
- b. Angka lulusan (AL)
- c. Angka mengulang (AU)
- d. Angka putus sekolah (APS)
- e. Angka bertahan tingkat 5 khusus SD (AB5 SD) atau angka bertahan (AB) khusus SMP dan SM.
- f. Rata-rata lama belajar (RLB) untuk SD, SMP, dan SM.

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk melihat mutu siswa disesuaikan dengan data tahunan yang tersedia. Mutu masukan siswa dilihat dari %SB PAUD, sehingga makin tinggi %SB PAUD berarti makin baik. Mutu keluaran siswa dapat dilihat dari AL, sehingga makin tinggi AL makin baik.

Mutu siswa dari proses belajar mengajar dilihat dari AU dan APS merupakan faktor yang negatif dari mutu pendidikan karena banyaknya siswa mengulang dan putus sekolah menunjukkan mutu pendidikan yang kurang baik. Oleh karena itu, makin kecil AU dan APS menunjukkan proses belajar-mengajar yang makin baik, sehingga mutu pendidikan akan meningkat.

Dengan melihat AB 5 SD, bisa diketahui siswa yang dapat bertahan sampai tingkat 5 jenjang SD, sehingga pendidikan menjadi efisien dan setelah tingkat 5 atau ketika siswa sudah mencapai tingkat 5 maka tak akan menjadi buta huruf bila siswa tersebut tidak sekolah lagi. AB 5 SD adalah siswa yang dapat bertahan sampai tingkat 5 dengan nilai 95%. AB adalah siswa yang dapat bertahan sampai tingkat tertinggi. Dengan demikian, nilai maksimal AB adalah 100% artinya setiap siswa bertahan di sekolah sampai mereka lulus di masing-masing jenjang. Oleh karena itu, makin tinggi nilai AB berarti makin baik.

RLB juga ikut berpengaruh dalam efisiensi pendidikan karena RLB yang tinggi menyebabkan semakin besarnya tenaga, waktu dan biaya yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga pendidikan menjadi tidak efisien. Makin tinggi nilai RLB makin buruk karena membutuhkan waktu lebih banyak dengan nilai ideal untuk SD adalah 6 tahun dan SMP/SM adalah 3 tahun.

Dengan demikian, untuk mengetahui mutu siswa dalam layanan pendidikan maka keenam indikator mutu siswa tersebut dilakukan konversi sehingga memiliki satuan yang sama menjadi nilai mutu siswa. Nilai mutu siswa kemudian dijumlahkan dan dibagi enam dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

Untuk menentukan apakah misi 3 mutu prasarana telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan lima jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Persentase ruang kelas baik (%RKb)

- b. Persentase perpustakaan baik (%Perpusb)
- c. Persentase ruang UKS baik (%RUKSb)
- d. Persentase laboratorium baik (%Labbb) khusus SMP dan SM.
- e. Persentase tempat berolahraga baik (%TORb)

Pemilihan jenis indikator pendidikan mutu prasarana disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. Proses belajar mengajar juga ditentukan oleh ketersediaan prasarana pendidikan seperti ruang kelas baik dan fasilitas sekolah lain seperti perpustakaan, ruang UKS, laboratorium, dan tempat olahraga yang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa %Rkb dapat dijadikan ukuran untuk melihat kondisi ruang kelas yang baik dan juga memacu siswa untuk belajar lebih baik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Makin besar nilai prasarana diharapkan mutu pendidikan akan meningkat karena proses belajar mengajar menjadi lebih baik sehingga siswa maupun guru dapat berinteraksi dengan baik pula.

%Perpusb menyebabkan siswa bertahan untuk belajar menggunakan buku penunjang yang berada di perpustakaan karena ruang dan sarana buku yang baik. %RUKSb menyebabkan siswa lebih terjamin dalam melaksanakan proses belajar mengajar karena bila ada masalah kesehatan dapat dengan segera ditangani di ruang UKS, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. %Rlabbb menyebabkan siswa dapat belajar di laboratorium dengan baik karena kelengkapan fasilitas yang diberikan. %TORb menyebabkan siswa dapat berolahraga dengan baik, sehingga lebih sehat karena kelengkapan fasilitas yang diberikan. Jadi, adanya fasilitas sekolah yang baik dapat meningkatkan siswa untuk belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, untuk mengetahui mutu prasarana dalam layanan pendidikan maka kelima indikator mutu prasarana tersebut dijumlahkan dan dibagi lima dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

Bila masing-masing kelompok indikator telah diperoleh nilainya maka untuk mengetahui mutu layanan pendidikan dilihat dari tiga sumber mutu maka nilai tiga sumber mutu dijumlahkan kemudian dibagi 3 dengan asumsi bahwa kelompok indikator memiliki peranan yang sama. (Kintamani, 2016).

### 3. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan

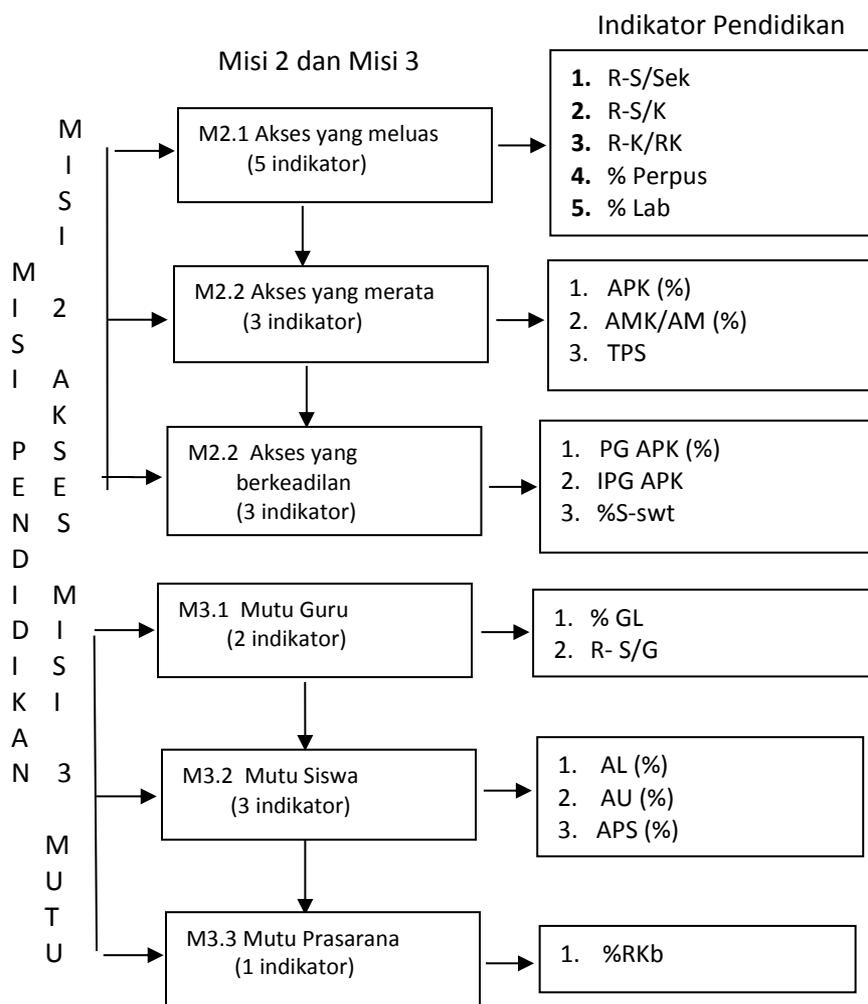
Berdasarkan misi 2 terdapat 14 indikator yang digunakan untuk menilai akses pendidikan dan misi 3 terdapat 14 indikator yang digunakan untuk menilai mutu, sehingga terdapat 28 indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan, baik di jenjang SD, SMP, maupun SM. Dengan demikian, untuk mengetahui keberhasilan layanan pendidikan maka nilai indikator dari misi 2 dan misi 3 pendidikan tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan nilai dua dengan asumsi misi 2 dan misi 3 memiliki peranan yang sama. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015e).

#### D. Pengukuran Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya dan berdasarkan pada 29 jenis indikator pendidikan dari misi 2 dan misi 3 pendidikan maka hanya 17 jenis indikator yang

dapat digunakan untuk menghitung keberhasilan program pembangunan pendidikan pada tahun 2015/2016 karena ketersediaan data yang ada, yaitu 11 jenis indikator misi 2 akses dan 6 jenis indikator misi 3 mutu.

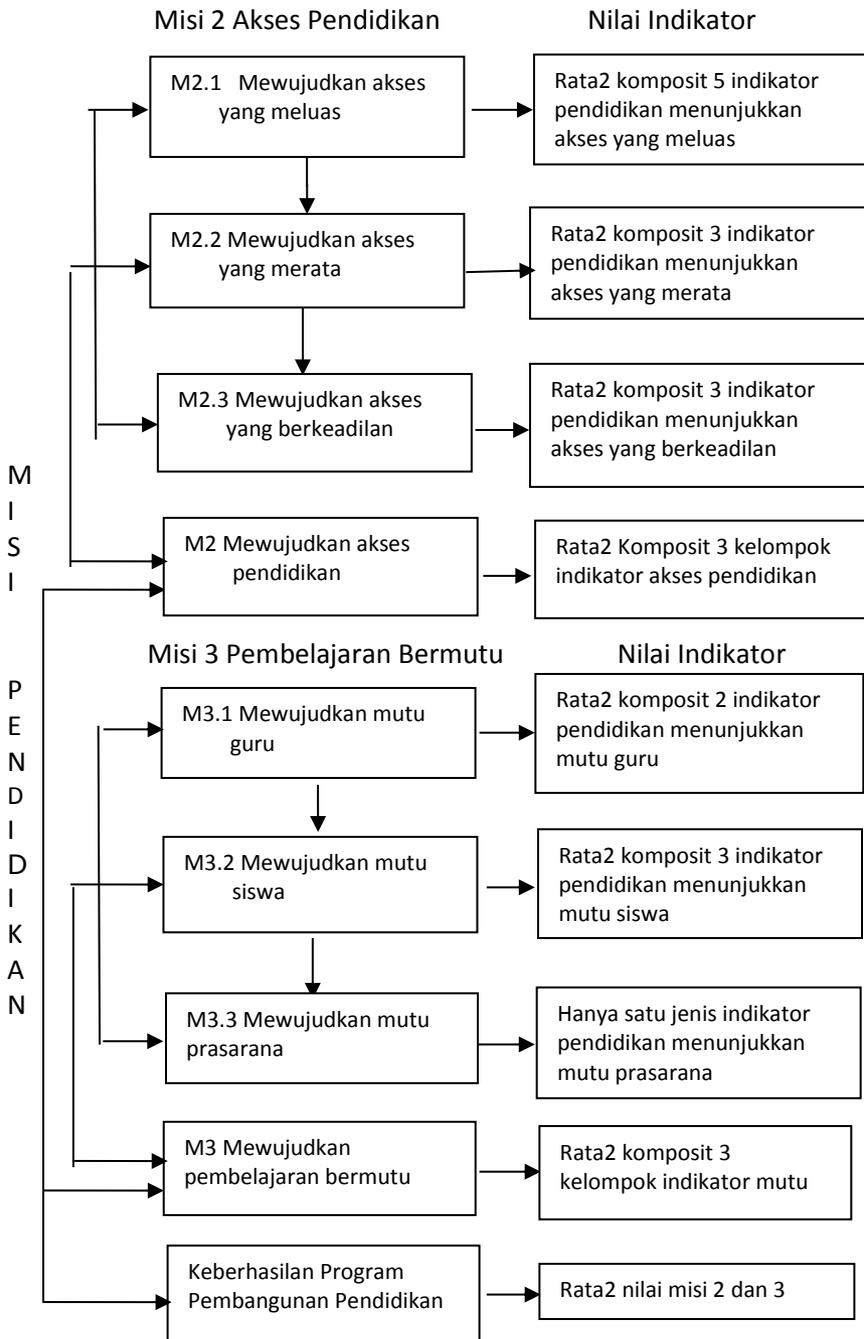
**Bagan 2.1**  
**Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3**  
**Rencana Strategi Kemendikbud 2015-2019**  
**Indikator Pendidikan**



Pada Bagan 2.1 dijelaskan adanya dua misi, yaitu misi 2 mewujudkan akses pendidikan dan misi 3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Pada misi 2 terdiri dari tiga subkelompok indikator pendidikan, yaitu akses yang meluas dengan lima indikator, akses yang merata dengan tiga indikator, dan akses yang berkeadilan dengan tiga indikator. Pada misi 3 juga terdapat tiga subkelompok, yaitu mutu guru dengan dua indikator, mutu siswa dengan tiga indikator, dan mutu prasarana

dengan satu indikator. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015e).

**Bagan 2.2**  
Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan  
Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3



Jabaran keberhasilan program pembangunan pendidikan merupakan rata-rata dari komposit kelompok indikator pendidikan misi 2 dan misi 3 seperti disajikan pada Bagan 2.2. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015e).

Dengan demikian, misi 2 dan 3 pendidikan menggunakan 17 indikator pendidikan. Misi 2 tercapai menggunakan komposit 11 indikator akses pendidikan menghasilkan nilai akses yang meluas dari 5 indikator, akses yang merata dari 3 indikator, dan akses yang berkeadilan dari 3 indikator atau disebut mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan. Misi 3 tercapai menggunakan komposit enam indikator menghasilkan nilai mutu guru dari 2 indikator, mutu siswa dari 3 indikator, dan mutu prasarana dari 1 indikator atau disebut mewujudkan pembelajaran yang bermutu.

Setelah misi 2 dan misi 3 mendapatkan nilai maka keberhasilan program pembangunan pendidikan merupakan rata-rata dari penjumlahan nilai misi 2 dan misi 3.

## BAB III METODOLOGI

### A. Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan dalam penyusunan keberhasilan program pembangunan pendidikan ini adalah dengan mempelajari dokumen yang ada untuk dilakukan analisis dengan menggunakan rumus-rumus tertentu dan ketentuan yang berlaku. Dokumentasi yang digunakan adalah statistik yang dihasilkan oleh PDSPK. Statistik dimaksud adalah Statistik SD, SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2015/2016 karena yang dilakukan analisis adalah semua jenjang pendidikan formal pada tingkat provinsi dan nasional. Berdasarkan statistik tersebut maka dihasilkan 13 variabel data yang dianalisis dengan rincian 22 jenis data untuk SD dan 21 jenis data untuk SMP dan SM yang terdapat pada Tabel 3.1. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a, 2015b, 2015c, dan 2015d).

Tabel 3.1  
Variabel Data Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3

No.	Variabel Data	SD	SMP	SM
1	Sekolah	v	v	v
2	Siswa Baru	v	v	v
3	Siswa mnr jenis kel	v	v	v
	a. Laki-laki	v	v	v
	b. Perempuan	v	v	v
	Siswa swasta	v	v	v
	Siswa tingkat tertinggi tahun lalu	v	v	v
	Siswa tahun lalu	v	v	v
4	Lulusan	v	v	v
5	Guru	v	v	v
	Guru S1+	v	v	v
6	Mengulang	v	v	v
7	Putus Sekolah	v	v	v
8	Kelas	v	v	v
9	Ruang Kelas	v	v	v
	Ruang Kelas Baik	v	v	v
10	Perpustakaan	v	v	v
11	Laboratorium	v	v	v
12	Penduduk usia masuk sek	v	-	-
13	Penduduk usia sekolah	v	v	v
	a. Laki-laki	v	v	v
	b. Perempuan	v	v	v
	Jumlah	22	21	21

Catatan: Penduduk usia masuk SD adalah usia 6-7 tahun, penduduk usia SD adalah 7-12 tahun, SMP adalah 13-15 tahun, dan SM adalah usia 16-18 tahun.

Dengan menggunakan variabel data dan rincian pada Tabel 3.1 maka dihasilkan indikator pendidikan berdasarkan misi 2 dan misi 3 pendidikan yang dirangkum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3

No.	Indikator	SD	SMP	SM
A.	Misi 2 Akses yg meluas, merata, dan berkeadilan			
	Misi 2.1 Akses yang meluas			
1	Rasio Siswa per Sekolah	v	v	v
2	Rasio Siswa per Kelas	v	v	v
3	Rasio Kelas per Ruang Kelas	v	v	v
4	Persentase Perpustakaan	v	v	v
5	Persentase Laboratorium	v	v	v
	Misi 2.2 Akses yang merata			
1	Angka Partisipasi Kasar	v	v	v
2	Angka Masukan Kasar/Angka Melanjutkan	v	v	v
3	Tingkat Pelayanan Sekolah	v	v	v
	Misi 2.3 Akses yang berkeadilan			
1	Perbedaan Gender APK	v	v	v
2	Indeks Paritas Gender APK	v	v	v
3	Persentase Siswa Swasta	v	v	v
B.	Misi 3 Pembelajaran Bermutu			
	Misi 3.1 Mutu dari Guru			
1	Persentase Guru Layak	v	v	v
2	Rasio Siswa per Guru	v	v	v
	Misi 3.1 Mutu dari siswa			
1	Angka Lulusan	v	v	v
2	Angka Mengulang	v	v	v
3	Angka Putus Sekolah	v	v	v
	Misi 3.3 Mutu dari Prasarana			
1	Persentase R.Kelas baik	v	v	v
	Jumlah	17	17	17

Oleh karena indikator pendidikan menggunakan satuan yang berbeda seperti rasio dan persentase maka ditentukan standar untuk melakukan konversi sehingga nilai setiap indikator pendidikan menggunakan satuan yang sama. Nilai akses pendidikan menggunakan komposit indikator dalam tiga kelompok sehingga dapat dijumlahkan dan dirata-ratakan menjadi keberhasilan program akses pendidikan. Nilai mutu pendidikan menggunakan komposit indikator dalam tiga kelompok sehingga dapat dijumlahkan dan dirata-ratakan menjadi keberhasilan pembelajaran yang bermutu. Nilai akses pendidikan dan mutu pendidikan kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan menjadi keberhasilan program pembangunan pendidikan. Standar untuk melakukan konversi setiap indikator berdasarkan misi 2 dan misi 3 pendidikan yang disajikan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
Standar untuk Melakukan Konversi Tiap-tiap Indikator Pendidikan

No.	Jenis Indikator	Singkatan	Satuan	SD	SMP	SM	Keterangan
A.	Misi 2 Akses yg meluas, merata, dan berkeadilan						
	Misi 2.1 Akses yang meluas						
1	Rasio Siswa per Sekolah	R-S/Sek	Siswa	192	324	432	Permendikbud
2	Rasio Siswa per Kelas	R-S/K	Siswa	32	36	36	Permendikbud
3	Rasio Kelas per Ruang Kelas	R-K/RK	Kelas	1	1	1	Ideal
4	Persentase Perpustakaan	%Perpus	Persentase	100	100	100	Ideal
5	Persentase Laboratorium	%Lab	Persentase	100	100	100	Ideal
	Misi 2.2 Akses yang merata						
1	Angka Partisipasi Kasar	APK	Persentase	100	80	70	Nasional
2	Angka Masukan Kasar/ Angka Melanjutkan	AMK AM	Persentase	50 -	- 100	- 100	Ideal
3	Tingkat Pelayanan Sekolah	TPS	Siswa	52	81	62	Nasional
	Misi 2.3 Akses yang berkeadilan						
1	Perbedaan Gender APK	PG APK	Persentase	0	0	0	Ideal
2	Indeks Paritas Gender APK	IPG APK	Indeks	1	1	1	Ideal
3	Persentase Siswa Swasta	% S-Swt	Persentase	10.00	25.00	50.00	Nasional
B.	Misi 3 Pembelajaran Bermutu						
	Misi 3.1 Mutu dari Guru						
1	Persentase Guru Layak	%GL	Persentase	100	100	100	Ideal
2	Rasio Siswa per Guru	R-S/G	Siswa	16	14	12	Nasional
	Misi 3.2 Mutu dari siswa						
1	Angka Lulusan	AU	Persentase	100	100	100	Ideal
2	Angka Mengulang	APS	Persentase	0	0	0	Ideal
3	Angka Putus Sekolah	AL	Persentase	0	0	0	Ideal
	Mutu dari Prasarana						
1	Persentase Ruang Kelas baik	% Rkb	Persentase	100	100	100	Ideal
	Jumlah Indikator			17	17	17	

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dengan menggunakan standar ideal. Standar ideal dimaksud digunakan untuk menilai masing-masing misi pendidikan dan dirinci menjadi lima nilai, yaitu paripurna dengan nilai 95,00-100,00, utama dengan nilai 90,00-94,99, madya dengan nilai 85,00-89,99, pratama dengan nilai 80,00-84,99, dan kurang bila nilainya <80. Rincian masing-masing misi pendidikan menggunakan standar ideal berdasarkan kategori Wajar Dikdas 9 Tahun dan disajikan pada Tabel 3.4. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015e).

**Tabel 3.4**  
Jenis Keberhasilan Pendidikan Berdasarkan Kategori Wajar Dikdas 9 Tahun

No.	Nilai	Misi 2, Misi 3, Keberhasilan
1	95.00-100.00	Paripurna
2	90.00-94.99	Utama
3	85.00-89.99	Madya
4	80.00-84.99	Pratama
5	kurang dari 80.00	Kurang

Selain itu, untuk analisis yang dilakukan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga memudahkan untuk memahami hasil dan interpretasi.

## B. Cara Menghitung Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan yang disajikan sebanyak 30 indikator walaupun berdasarkan data yang tersedia hanya 17 indikator yang digunakan dalam menghitung keberhasilan program pembangunan pendidikan.

### 1. Indikator Misi 2 Akses Pendidikan

Terdapat 16 jenis indikator untuk misi 2 akses pendidikan. Untuk memahami berbagai indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur akses pendidikan maka disajikan definisi, data dasar, rumus, kriteria, dan kegunaan indikator tersebut.

#### Indikator Misi 2.1 akses yang Meluas (7 indikator)

##### a. Rasio Siswa per Sekolah (R-S/Sek)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$R-S/Sek j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Sekolah } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di sekolah atau makin kurang jumlah sekolah di suatu daerah.

Kegunaan: Untuk mengetahui rata-rata besarnya sekolah di suatu daerah sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengusulkan tambahan ruang kelas baru.

##### b. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah kelas SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$R-S/K j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Kelas } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di kelas atau makin kurang ruang kelas di suatu daerah.

Kegunaan: Untuk mengetahui rata-rata besarnya kelas di sekolah dan daerah sehingga dapat ditentukan daerah mana yang sangat padat dan dapat sebagai bahan untuk mengusulkan tambahan ruang kelas baru.

### c. Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)

Definisi: Perbandingan antara jumlah kelas (rombongan belajar) dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah kelas SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah ruang kelas SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$R-K/RK j = \frac{\text{Kelas } j}{\text{Ruang Kelas } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 1, berarti ruang kelas hanya digunakan sekali, kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang belum digunakan dan lebih dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Makin tinggi nilainya berarti makin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki.

Kegunaan: Untuk mengetahui kekurangan/kelebihan ruang kelas di sekolah dan daerah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan prioritas sekolah mana yang akan diberi tambahan ruang kelas.

### d. Persentase Perpustakaan Sekolah (% Perpus)

Definisi: Perbandingan antara jumlah perpustakaan yang dimiliki sekolah dengan jumlah sekolah yang ada pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah perpustakaan SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%Perpus j = \frac{\text{Perpustakaan } j}{\text{Sekolah } j} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang seharusnya dimiliki sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan perpustakaan pada tahun-tahun berikutnya.

e. Persentase Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (% RUKS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah ruang UKS yang dimiliki sekolah dengan jumlah sekolah yang ada pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah ruang UKS SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

		Ruang UKS j	
%RUKS j =	-----		x 100
		Sekolah j	

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki ruang UKS sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki ruang UKS yang seharusnya dimiliki, sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan ruang UKS pada tahun-tahun berikutnya.

f. Persentase Laboratorium (%lab)

Definisi: Perbandingan antara jumlah sekolah yang telah memiliki laboratorium pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah laboratorium SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

		Laboratorium j	
%Lab j =	-----		x 100
		Sekolah j	

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Khusus SMA sekolah dikalikan 6 sesuai ketentuan di SMA supaya memiliki 6 jenis laboratorium, yaitu fisika, kimia, biologi, multimedia, bahasa, dan komputer, sedangkan SMK sekolah dikalikan 3.

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki laboratorium yang seharusnya dimiliki sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan laboratorium pada tahun-tahun berikutnya.

g. Persentase Tempat Olahraga (%TOR)

Definisi: Perbandingan antara jumlah sekolah yang telah memiliki tempat olahraga pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah tempat olahraga SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

		Tempat OR j			
%TOR j	=	-----	X	100	
		Sekolah j			

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki tempat olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki tempat olahraga yang seharusnya dimiliki sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan tempat olahraga pada tahun-tahun berikutnya.

Indikator Misi 2.2 Akses yang Merata (6 indikator)

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.
- 2) Jumlah siswa tingkat SD, SMP, dan SM.

Rumus yang digunakan:

		Siswa j			
APK j	=	-----	x	100	
		Penduduk usia sekolah j			

Catatan: j = jenjang pendidikan, tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK

Tingkat SD: penduduk kelompok usia 7-12 tahun

Tingkat SMP: penduduk kelompok usia 13-15 tahun

Tingkat SM: penduduk kelompok usia 16-18 tahun

Kriteria: Makin tinggi APK berarti makin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah di satuan pendidikan. Nilai APK yang baik mendekati 100%.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang bersekolah di satuan pendidikan pada daerah tertentu.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.
- 2) Jumlah siswa usia sekolah tingkat SD, SMP, dan SM.

Rumus yang digunakan:

		Siswa usia j		
APM j	=	-----	X	100
		Penduduk usia sekolah j		

Catatan: j = jenjang pendidikan, tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK

Tingkat SD: penduduk kelompok usia 7-12 tahun

Tingkat SMP: penduduk kelompok usia 13-15 tahun

Tingkat SM: penduduk kelompok usia 16-18 tahun

Kriteria: Makin tinggi APM berarti makin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usianya di satuan pendidikan. Nilai APM yang baik idealnya adalah 100%.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang bersekolah pada usia yang sesuai di satuan pendidikan pada daerah tertentu.

c. Angka Masukan Kasar (AMK) (khusus SD)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa baru SD dengan jumlah penduduk usia resmi masuk SD dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Penduduk usia masuk ke SD adalah penduduk 6-7 tahun.
- 2) Siswa baru SD semua usia.

Rumus yang digunakan:

		Siswa Baru j		
AMK j	=	-----	x	100
		Penduduk usia masuk sekolah j		

Catatan: j = jenjang, khusus SD

SD: siswa baru dan penduduk usia masuk SD 6-7 tahun

Kriteria: Makin tinggi AMK berarti makin banyak siswa masuk sekolah yang tidak sesuai dengan usia resmi. Idealnya=100% berarti sesuai dengan usia resmi masuk sekolah. AMK lebih besar dari 100% karena banyak siswa yang masuk sekolah di luar usia resmi.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya anak usia masuk sekolah yang telah bersekolah di SD pada suatu daerah.

d. Angka Melanjutkan (AM) (khusus SMP dan SM)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa baru pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah lulusan SD dan SMP
- 2) Jumlah siswa baru SMP dan SM

Rumus yang Digunakan:

$AM_j = \frac{\text{Siswa Baru } j}{\text{Lulusan } j-1} \times 100$
--

Catatan: j = jenjang, SMP, SM, j-1 = jenjang sebelumnya

Kriteria: Makin tinggi nilainya makin baik. Idealnya=100% berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila nilainya lebih dari 100% akibat adanya siswa baru yang berasal dari daerah lain seperti daerah kota dan perbatasan.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi di suatu daerah.

e. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah penduduk usia masuk sekolah atau lulusan dengan sekolah ekuivalen pada jenjang pendidikan tertentu.

Sekolah ekuivalen adalah sekolah yang memiliki 6 ruang kelas atau 6 rombongan belajar (dipilih mana yang lebih besar). Digunakan sekolah ekuivalen agar antara SD, SMP, dan SM bisa dibandingkan. Pada SD adalah melayani penduduk usia masuk sekolah SD karena belum ada persyaratan masuk SD harus dari tamatan PAUD, sedangkan untuk tingkat SMP dan SM adalah melayani lulusan pada jenjang yang lebih rendah yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah penduduk usia masuk sekolah SD 6-7 tahun (untuk SD)
- 2) Jumlah lulusan SD, SMP, dan SM
- 3) Jumlah ruang kelas TK, SD, SMP, dan SM
- 4) Jumlah rombongan belajar TK, SD, SMP, dan SM

Rumus:

		Ruang Kelas/Rombel j
Sek Ekuivalen j	=	-----
		6

Catatan: j adalah jenjang, SD, SMP, SMA, dan SMK

		Penduduk 6-7 tahun
TPS SD	=	-----
		Sekolah Ekuivalen SD

$$\text{TPS SMP/SM} = \frac{\text{Lulusan SD/SMP}}{\text{Sekolah Ekuivalen SMP/SM}}$$

**Kriteria:** Makin tinggi TPS berarti makin kecil kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia masuk sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin sedikit. Sebaliknya, makin kecil TPS berarti makin besar kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia masuk sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin banyak.

**Kegunaan:** Untuk mengetahui kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia masuk sekolah atau lulusan atau seberapa banyak sekolah yang ada sehingga semua penduduk usia masuk sekolah atau lulusan dapat bersekolah.

f. Satuan Biaya (SB)

**Definisi:** Perbandingan antara jumlah penerimaan atau pengeluaran biaya sekolah dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu atau rata-rata biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu.

**Data dasar yang diperlukan**

- 1) Jumlah penerimaan atau pengeluaran sekolah seluruhnya tingkat SD, SMP, dan SM
- 2) Jumlah siswa tingkat SD, SMP dan SM

**Rumus:**

$$\text{SB}_j = \frac{\text{Penerimaan Biaya}_j}{\text{Siswa}_j}$$

**Catatan:** j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

**Kriteria:** Makin tinggi satuan biaya pendidikan berarti makin mahal biaya pendidikan sehingga makin tidak terjangkau. Sebaliknya, makin kecil satuan biaya pendidikan maka makin terjangkau.

**Kegunaan:** Untuk mengetahui tinggi rendahnya satuan biaya pendidikan di suatu daerah sehingga dapat dibandingkan dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan dalam menentukan satuan biaya yang cocok untuk setiap jenjang pendidikan.

Indikator Misi 2.3 Akses yang Berkeadilan (3 indikator)

a. Perbedaan Gender (PG) APK

**Definisi:** Selisih antara APK laki-laki dengan APK perempuan pada jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan dalam persentase.

**Data dasar yang digunakan:**

- 1) Perhitungan APK laki-laki TK, tingkat SD, SMP, SM, dan PT
- 2) Perhitungan APK perempuan TK, tingkat SD, SMP, SM, dan PT

**Rumus:**

$$PG\ APK\ j = APK\ Laki-laki - APK\ Perempuan\ j$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ketika bersekolah. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin buruk, sebaliknya makin rendah berarti makin baik. PG menghasilkan tiga jenis nilai, yaitu 1) nilai positif, 2) nilai negatif, dan 3) nilai 0 (nol). Bila hasilnya positif berarti terjadi PG yang lebih besar laki-laki daripada perempuan. Sebaliknya, bila hasilnya negatif berarti terjadi PG lebih besar perempuan daripada laki-laki, sedangkan nilai 0 berarti tidak ada PG. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan.

Kegunaan: Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam bersekolah antara laki-laki dengan perempuan sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang.

#### b. Indek Paritas Gender (IPG) APK

Definisi: Perbandingan antara APK perempuan dengan APK laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Perhitungan APK laki-laki TK, tingkat SD, SMP, SM, dan PT
- 2) Perhitungan APK perempuan TK, tingkat SD, SMP, SM, dan PT

Rumus:

$$IPG\ APK\ j = \frac{APK\ Perempuan\ j}{APK\ Laki-laki\ j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 1 berarti ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bila angkanya kurang atau lebih dari 1 maka tidak ada kesetaraan gender. Bila angkanya lebih dari 1 berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebaliknya, bila angkanya kurang dari 1 berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dengan demikian, nilainya adalah <1, 1, dan >1.

Kegunaan: Untuk mengetahui apakah sudah terjadi kesetaraan dalam bersekolah antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang, misalnya dengan memberikan kuota untuk anak perempuan agar bersekolah atau memberikan beasiswa agar melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### c. Persentase Siswa Swasta (%S-Swt)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa bersekolah di sekolah swasta dengan jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut status sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah siswa seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%S\text{-Swat } j = \frac{\text{Siswa Swasta } j}{\text{Siswa Seluruhnya}} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin besar partisipasi sekolah swasta dalam menampung siswa. Belum ada ketentuan berapa nilai idealnya.

Kegunaan: Untuk mengetahui besarnya partisipasi sekolah swasta dalam menampung siswa di sekolah.

### Penjelasan Akses Pendidikan

Walaupun indikator akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dalam layanan pendidikan terdapat 16 jenis indikator namun hanya dihitung dari komposit 11 indikator pendidikan yang tersedia datanya. Ke-11 indikator tersebut dinyatakan dalam satuan yang sama dengan melakukan konversi menggunakan standar dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel 3.3.

Konversi R-S/Sek dilakukan dengan menggunakan tipe sekolah atau pembakuan sekolah, untuk SD digunakan 192 karena setiap kelas diisi 32 siswa dan kebanyakan SD memiliki 6 kelas sedangkan untuk SMP digunakan 324 karena setiap ruang kelas diisi 36 siswa dan kebanyakan SMP mempunyai 9 ruang kelas dan SM digunakan 432 karena setiap ruang kelas diisi 36 siswa dan kebanyakan SM mempunyai 12 ruang kelas. Bila R-S/Sek SMP kurang dari standar (324) adalah 300 maka angka tersebut belum optimal, namun kondisinya lebih baik daripada yang berlebih, sehingga konversinya 100. Bila R-S/Sek SMA adalah 500 maka angka tersebut lebih dari optimal atau lebih dari standar (432) maka konversinya dihitung sebaliknya sebesar 86,40% ( $432/500 \times 100 = 86,40\%$ ).

R-S/K SD digunakan 32, SMP digunakan 36 sebagai angka yang telah ditentukan dalam Permendiknas Nomor 23, Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal di Pendidikan Dasar. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Oleh karena SM belum ada Permendikbud maka digunakan sama dengan SMP, yaitu 36. Bila R-S/K SD kurang dari standar (32) adalah 24 maka angka tersebut belum optimal, namun kondisinya lebih baik daripada yang berlebih, sehingga konversinya 100. Bila R-S/K SMP adalah 37 maka angka tersebut lebih dari optimal atau lebih dari standar (36) maka konversinya dihitung dengan cara 36 dibagi 37 dikalikan 100 sama dengan 97,30% ( $36/37 \times 100 = 97,30\%$ ). Begitu juga, R-S/K SMA adalah 47 maka angka tersebut lebih dari optimal atau lebih dari standar (36) maka konversinya dihitung dengan cara yang sama menjadi 76,60% ( $36/47 \times 100 = 76,60\%$ ).

Untuk R-K/RK digunakan 1 sebagai angka ideal, artinya setiap ruang kelas hanya digunakan satu kali atau 1 kelompok belajar (1 kelas). Dengan demikian, bila nilainya kurang atau lebih dari 1 keduanya tidak ideal. Hal inilah yang disebut sebagai menggunakan 2 standar. Bila R-K/RK adalah 1,2 berarti terdapat 20% ruang kelas

digunakan lebih dari sekali maka angka tersebut dikonversi dengan cara 1 dibagi 1,2 sama dengan 83,3% ( $1/1,2 \times 100 = 83,3\%$ ). Sebaliknya, bila R-K/RK adalah kurang dari 1, misalnya 0,9 berarti terdapat 10% ruang kelas belum digunakan atau digunakan tetapi tidak untuk kegiatan belajar, misalnya untuk ruang BP maka angka tersebut dikonversi dengan cara 0,9 dibagi 1 dikali 100 sama dengan 90,0% ( $0,9/1 \times 100 = 90,0\%$ ).

Untuk %Perpus digunakan angka ideal 100%. Dengan demikian, bila nilainya kurang dari 100 tetap menggunakan angka tersebut. Hal yang sama diberlakukan untuk %Lab dengan menggunakan angka ideal 100%. Dengan demikian, bila nilainya kurang dari 100 tetap menggunakan angka tersebut. Sebaliknya, bila indikatornya lebih dari 100% maka nilainya tetap menjadi 100. Sesuai ketentuan maka untuk SMA dihitung 6 laboratorium per sekolah dan SMK dihitung 3 laboratorium per sekolah, sehingga rata-rata SM digunakan 5 jenis laboratorium.

Setelah kelima indikator tersebut memiliki nilai maka untuk menghitung akses yang meluas adalah rata-rata dari 5 nilai indikator tersebut atau jumlah nilai indikator dibagi 5. Demikian juga diberlakukan untuk akses yang merata adalah rata-rata dari 3 nilai indikator atau jumlah nilai indikator dibagi 3, sedangkan akses yang berkeadilan adalah rata-rata dari 3 nilai indikator atau jumlah nilai indikator dibagi 3.

Setelah indikator akses pendidikan memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai akses yang meluas dengan akses yang merata dan akses yang berkeadilan kemudian dibagi dengan jumlah kelompok indikator atau dibagi 3. Dengan demikian, untuk menghitung akses pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

		Nilai merata+meluas+berkeadilan
Akses	=	-----
		3

## 2. Indikator Misi 3 Pembelajaran Yang Bermutu

Terdapat 14 jenis indikator untuk misi 3 pembelajaran yang bermutu. Untuk memahami berbagai indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan maka disajikan definisi, data dasar, rumus, kriteria, dan kegunaan indikator tersebut.

### Indikator Misi 3.1 Mutu Guru (3 indikator)

#### a. Persentase Guru Layak (%GL)

**Definisi:** Perbandingan antara jumlah guru yang layak mengajar atau yang memiliki ijazah Sarjana/S1 atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah guru menurut ijazah tertinggi untuk SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah guru seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%GL_j = \frac{\text{Guru S1/D4 \& lebih tinggi } j}{\text{Guru seluruhnya } j} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, berarti semua guru memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti makin baik mutu sekolah dipandang dari sudut guru.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah guru berijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan baru dalam rangka peningkatan mutu guru pada tahun mendatang.

#### b. Persentase Guru Sertifikat (%GS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah guru yang memiliki sertifikat dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah guru menurut sertifikat yang dimiliki untuk SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah guru seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%GS_j = \frac{\text{Guru memiliki sertifikat } j}{\text{Guru seluruhnya } j} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, berarti semua guru memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti makin baik mutu sekolah dipandang dari sudut guru.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah guru yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan baru dalam rangka peningkatan mutu guru pada tahun mendatang.

#### c. Rasio Siswa per Guru (R-S/G)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah guru SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$R-S/G_j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Guru } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di suatu daerah.

Kegunaan: Untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah dan daerah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan daerah mana yang memerlukan tambahan guru pada tahun mendatang atau yang telah kelebihan sehingga bisa dipindahkan.

### Indikator Misi 3.2 Mutu Siswa (6 indikator)

#### a. Persentase Siswa Baru asal PAUD (%SB PAUD)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa baru yang berasal dari PAUD (Formal atau Nonformal) dengan jumlah siswa baru seluruhnya pada jenjang SD dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah siswa baru SD menurut asal
- 2) jumlah siswa baru SD seluruhnya

Rumus:

		SB asal PAUD		
%SB PAUD	=	-----	X	100
		SB seluruhnya		

Catatan: khusus SD

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa baru berasal dari PAUD. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa baru yang belum berasal dari tamatan PAUD, sehingga dapat dijadikan bahan kebijakan pada PAUD pada tahun mendatang.

#### b. Angka Lulusan (AL)

Definisi: Perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah lulusan SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah siswa tingkat VI untuk SD, tingkat X untuk SMP atau tingkat XII untuk SMA dan SMK tahun ajaran sebelumnya

Rumus:

		Lulusan j t		
AL j t	=	-----	x	100
		Siswa tk tertinggi j t-1		

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA dan SMK

t adalah tahun, t-1 adalah tahun sebelumnya

Kriteria: Untuk SD sampai SM, idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa tingkat tertinggi lulus semuanya. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dan tidak lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah sehingga dapat dijadikan

bahan dalam menentukan program remedial bagi mereka yang tidak lulus pada tahun mendatang.

c. Angka Mengulang (AU)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa mengulang pada tahun tertentu dengan jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah siswa mengulang SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah siswa seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK tahun ajaran sebelumnya

Rumus:

$$AU_{jt} = \frac{\text{Mengulang}_{jt}}{\text{Siswa}_{jt-1}} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK  
t adalah tahun, t-1 adalah tahun sebelumnya

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang mengulang. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang mengulang di suatu daerah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program remedial yang diperlukan pada tahun mendatang.

d. Angka Putus Sekolah (APS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tahun tertentu dengan jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya pada jenjang tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah siswa putus sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah siswa seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK tahun ajaran sebelumnya

Rumus:

$$APS_{jt} = \frac{\text{Putus Sekolah}_{jt}}{\text{Siswa}_{jt-1}} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK  
t adalah tahun, t-1 adalah tahun sebelumnya

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang putus sekolah. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah, sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program retrieval yang diperlukan pada tahun mendatang.

e. Angka Bertahan (AB)

AB untuk SD, SMP, dan SM sedikit berbeda dalam perhitungannya. Bila SD menggunakan AB Tingkat 5 atau AB5 SD dengan asumsi bila siswa putus SD tingkat 5 maka diharapkan tidak menjadi buta aksara. Sebaliknya, SMP dan SM menggunakan AB sampai selesai tingkat terakhir sehingga digunakan AB SMP dan SM.

1) AB5 SD

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa SD yang dapat bertahan sampai tingkat 5 dari suatu kohort sebesar 1000 dibandingkan dengan tahun-siswa dan dinyatakan dalam persentase.

Penggunaan AB5 SD dengan asumsi bila siswa putus tingkat 5 SD diharapkan tidak menjadi buta aksara

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan
- 2) Jumlah mengulang menurut tingkat tahun terakhir
- 3) Jumlah putus sekolah menurut tingkat tahun terakhir
- 4) Jumlah lulusan tahun terakhir
- 5) Menggunakan program aplikasi yang ada

Rumus:

		Siswa Bertahan SD 5		
AB SD	=	-----	x	100
		6000		

Catatan: Jenjang pendidikan SD adalah 6 tahun sehingga dari seluruh kohor menjadi 6000

Kriteria: Makin mendekati 100 persen makin baik berarti siswa dapat bertahan di sekolah.

Kegunaan: Untuk mengetahui siswa yang dapat bertahan sampai tingkat 5 SD.

AB5 dikhususkan untuk SD, sedangkan AB SMP dan SM memiliki sedikit perbedaan seperti disajikan berikut ini.

2) AB SMP dan SM

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa yang dapat bertahan pada tingkat tertentu atau sampai lulus dari suatu kohort sebesar 1000 pada suatu jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan tahun-siswa jenjang yang sama dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan
- 2) Jumlah mengulang menurut tingkat tahun terakhir
- 3) Jumlah putus sekolah menurut tingkat tahun terakhir
- 4) Jumlah lulusan tahun terakhir
- 5) Menggunakan program aplikasi yang ada

Rumus:

		Siswa Bertahan j		
AB j	=	-----	x	100
		3000		

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SMP atau SM,

SMP dan SM atau jenjang pendidikan 3 tahun sehingga kohortnya menjadi 3000

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa dapat bertahan sampai lulus dan tidak ada yang mengulang.

Kegunaan: Untuk mengetahui jumlah siswa yang dapat bertahan sampai lulus pada suatu jenjang pendidikan sehingga dapat menjadi bahan kebijakan di tahun mendatang.

f. Rata-rata Lama Belajar (RLB)

Definisi: Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan.

- 1) SD: Rata-rata lama belajar sampai lulus seharusnya 6 tahun
- 2) SMP/SM: Rata-rata lama belajar sampai lulus seharusnya 3 tahun

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan
- 2) Jumlah mengulang menurut tingkat tahun terakhir
- 3) Jumlah putus sekolah menurut tingkat tahun terakhir
- 4) Jumlah lulusan tahun terakhir
- 5) Menggunakan program aplikasi yang ada

Rumus:

		(LLs 1X6)+(Lls2x7)+(Lls3x8)
RLB lls SD	=	-----
		Lulusan 1+2+3

Catatan: Jumlah lulusan I adalah lulusan tanpa mengulang, lulusan II adalah lulusan mengulang satu kali, dan lulusan III adalah lulusan yang mengulang dua kali

Kriteria: Idealnya adalah 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP dan SM berarti semua siswa lulus tepat waktu dan tak ada yang mengulang.

Kegunaan: Untuk mengetahui lama belajar siswa sampai lulus sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang.

Indikator Misi 3.3 Mutu Prasarana (5 indikator)

a. Persentase Ruang Kelas Baik (% Rkb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah ruang kelas kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah ruang kelas menurut kondisi SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah ruang kelas seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

Ruang Kelas baik j	
%Rkb j	= $\frac{\text{-----}}{\text{Ruang Kelas seluruhnya j}} \times 100$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik.

Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya ruang kelas baik sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi sekolah yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu.

b. Persentase Perpustakaan kondisi Baik (%Perpusb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah perpustakaan yang baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah perpustakaan seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah perpustakaan menurut kondisi tingkat SD, SMP dan SM
- 2) Jumlah perpustakaan seluruhnya tingkat SD, SMP dan SM

Rumus:

Perpustakaan baik j	
%Perpusb j	= $\frac{\text{-----}}{\text{Perpustakaan j}} \times 100$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua perpustakaan dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya perpustakaan baik sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi perpustakaan bagi yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu.

c. Persentase Ruang UKS kondisi Baik (% RUKSb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah ruang UKS dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang UKS seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah ruang UKS menurut kondisi SD, SMP dan SM
- 2) Jumlah ruang UKS seluruhnya SD, SMP dan SM

Rumus:

Ruang UKS baik j	
%RUKSb j	= $\frac{\text{-----}}{\text{Ruang UKS j}} \times 100$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua ruang UKS dalam kondisi baik.

Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya ruang UKS yang baik, sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi ruang UKS yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu.

d. Persentase Laboratorium kondisi Baik (% Labb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah laboratorium kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah laboratorium seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		Laboratorium baik j			
%Labb j	=	-----	x	100	
		Laboratorium j			

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua laboratorium dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya laboratorium yang baik, sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi laboratorium yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu.

e. Persentase Tempat Olahraga kondisi Baik (% TORb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah tempat olahraga dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah tempat olahraga seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah tempat olahraga menurut kondisi SD, SMP, SMA dan SMK
- 2) Jumlah tempat olahraga seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

		TOR baik j			
%TORb	=	-----	X	100	
		TOR seluruhnya j			

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua tempat olahraga dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya tempat olahraga yang baik, sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi tempat olahraga dalam rangka meningkatkan mutu.

Penjelasan Pembelajaran yang Bermutu

Walaupun pembelajaran yang bermutu terdiri dari 14 jenis indikator, yang dapat dilihat dari guru, siswa, dan prasarana namun hanya dapat dihitung dari 6 jenis indikator karena ketersediaan data yang ada. Mutu dihitung dari komposit tiga

kelompok indikator dan enam jenis indikator yang dinyatakan dalam satuan yang sama dengan melakukan konversi. Untuk melakukan konversi menggunakan standar dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel 3.3.

%GL, AL, dan %Rkb tidak dilakukan konversi karena standar idealnya 100, sedangkan AU dan APS karena standar idealnya 0, namun karena memberi nilai yang negatif maka dilakukan konversi dengan cara  $100 - \text{nilainya}$ . Contoh AU SD = 5,60% maka konversinya adalah  $100 - 5,60 = 94,40$ . R-S/G dilakukan konversi, bila nilainya kurang dari standar adalah nilai dibagi dengan standar. Sebaliknya, bila nilainya lebih tinggi dari standar maka standar dibagi dengan nilai. Dengan demikian, nilai maksimal masing-masing indikator 100. Contoh, R-S/G SD sebesar 18 maka konversinya adalah  $16/18 \times 100 = 88,89$ , bila R-S/G SD sebesar 15 maka konversinya adalah  $15/16 \times 100 = 93,75$ .

Setelah kedua indikator guru tersebut memiliki nilai maka untuk menghitung mutu guru adalah rata-rata dari 2 nilai indikator tersebut atau jumlah nilai indikator dibagi 2. Demikian juga diberlakukan untuk mutu siswa adalah rata-rata dari 3 nilai indikator atau jumlah nilai indikator dibagi 3, sedangkan mutu prasarana karena hanya 1 maka tetap menggunakan nilai 1 indikator.

Setelah indikator mutu layanan pendidikan dilakukan konversi sehingga memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai mutu guru ditambah dengan mutu siswa dan mutu prasarana, kemudian dibagi dengan jumlah kelompok indikator atau dibagi tiga. Dengan demikian, untuk menghitung pembelajaran yang bermutu maka rumus yang digunakan adalah:

		Nilai guru+siswa+prasarana
Mutu	=	-----
		3

### C. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan

Keberhasilan program pembangunan pendidikan umumnya dinilai berdasarkan pengukuran mengenai terserapnya dana yang dialokasikan untuk program pembangunan pendidikan. Cara yang lebih akurat memberikan indikasi tentang keberhasilan program pembangunan pendidikan ialah dengan menggunakan data yang merupakan hasil pendidikan dikaitkan dengan misi pendidikan, yaitu mewujudkan akses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Keberhasilan program pembangunan pendidikan dihitung melalui gabungan dari misi 2 dan 3 dengan 30 jenis indikator pendidikan. Namun, karena keterbatasan data maka hanya digunakan 17 jenis indikator pendidikan.

Untuk menghitung keberhasilan program pembangunan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

		Nilai Akses + Mutu
Keberhasilan Program	=	-----
		2

Teknik analisis yang digunakan untuk menghitung keberhasilan program pembangunan adalah menggunakan standar ideal masing-masing misi pendidikan yang dirinci menjadi lima nilai, yaitu paripurna dengan nilai 95,00-100,00, utama

dengan nilai 90,00-94,99, madya dengan nilai 85,00-89,99, pratama dengan nilai 80,00-84,99, dan kurang bila nilainya  $\leq 80$  (lihat Tabel 3.4).

Contoh, keberhasilan program pembangunan pendidikan SD, bila diketahui nilai akses yang meluas sebesar 72,47, akses yang merata sebesar 94,63, dan akses yang berkeadilan sebesar 85,46 maka nilai akses pendidikan adalah  $(72,47 + 94,63 + 85,46) / 3 = 84,18$  dan mutu guru sebesar 81,83, mutu siswa sebesar 99,10 dan mutu prasarana sebesar 23,85 maka nilai mutu adalah  $(81,83 + 99,10 + 23,85) / 3 = 68,26$ . Dengan demikian, keberhasilan program pembangunan pendidikan SD adalah nilai akses ditambah nilai mutu dibagi 2 adalah  $(84,18 + 68,26) / 2 = 76,18$ .

Dengan menggunakan standar ideal maka keberhasilan program pembangunan pendidikan SD sebesar 76,18 termasuk kurang. Oleh karena itu, perlu usaha yang lebih agar dapat meningkatkan keberhasilan program pendidikan melalui peningkatan mutu dari 68,26 menjadi sekitar 86, sehingga keberhasilan program pembangunan pendidikan mencapai 85 atau termasuk madya. Peningkatan mutu dapat dilakukan terutama prioritas pada prasarana yang sangat rendah.

## BAB IV HASIL DAN BAHASAN

### A. Akses Pendidikan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam mewujudkan akses pendidikan dapat dirinci menjadi tiga, yaitu akses yang meluas, akses yang merata, dan akses yang berkeadilan.

#### 1. Akses yang Meluas

Terdapat lima jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui akses pendidikan yang meluas. Dari lima indikator tersebut, tiga indikator, yaitu R-S/Sek, R-S/K, dan R-K/RK dilakukan konversi menggunakan standar tertentu yang ada pada Tabel 3.3, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator, sedangkan %Perpus dan %Lab tidak dilakukan konversi kecuali bila indikator lebih dari 100 maka nilainya tetap 100. Kelima nilai tersebut dijumlahkan dan dibagi 5 sehingga diperoleh akses yang meluas. Nilai maksimal 100, makin mendekati 100 disebut makin meluas.

Tabel 4.1  
Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Meluas  
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015/2016

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
<b>A. Data</b>						
1	Sekolah	147,536	37,023	25,348		
2	Siswa	25,885,053	10,040,277	8,647,394		
3	Kelas	1,100,097	342,656	300,043		
4	Ruang Kelas	1,048,513	345,258	287,864		
5	Perpustakaan	18,664	27,974	16,669		
6	Laboratorium	87,196	49,782	45,133		
<b>B. Indikator</b>						
1	R-S/Sek	175	271	341		
2	R-S/K	24	29	29		
3	R-K/RK	1.05	0.99	1.04		
4	%Perpustakaan	12.65	75.56	65.76		
5	%Laboratorium	59.10	134.46	35.61		
<b>C. Nilai Indikator</b>						
1	R-S/Sek	95.74	97.95	99.42	97.70	PARIPURNA
2	R-S/K	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
3	R-K/RK	94.83	96.41	96.76	96.00	PARIPURNA
4	%Perpustakaan	12.65	75.56	65.76	51.32	KURANG
5	%Laboratorium	59.10	93.67	35.61	62.79	KURANG
	Akses yang meluas	72.47	92.72	79.51	81.56	PRATAMA
	Jenis akses yg meluas	KURANG	UTAMA	KURANG	PRATAMA	

Tabel 4.1 menunjukkan data, indikator, dan nilai akses yang meluas menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat SD sebesar 147.536, SMP sebesar 37.023, dan SM sebesar 25.348. Sesuai dengan jumlah sekolah, jumlah siswa terbesar juga pada SD sebesar 25.855.053 dan terkecil pada SM sebesar

8.647.394. Demikian juga kelas terbesar juga pada SD sebesar 1.100.097 dan terkecil juga pada SM sebesar 300.043. Ruang kelas terbesar juga pada SD sebesar 1.048.513 dan terkecil pada SM sebesar 287.864. Sebaliknya, perpustakaan terbesar pada SMP sebesar 27.974 dan terkecil pada SM sebesar 16.669. Laboratorium terbesar pada SD sebesar 87.196 dan terkecil pada SM sebesar 45.133.

Berdasarkan data siswa dan sekolah maka dihasilkan R-S/Sek SD sebesar 175, SMP sebesar 271, dan SM sebesar 341. Rasio SD sangat rendah dibandingkan dengan jenjang lainnya karena jumlah SD sudah menjangkau daerah terpencil, sehingga jumlah sekolah sudah sangat banyak. Dengan melihat kondisi seperti ini maka makin tinggi jenjang pendidikan kepadatan sekolah makin tinggi. Hal ini wajar karena jangkauan siswa SM atau pada jenjang yang tinggi makin luas dan letaknya sebagian besar di daerah kota. Padatnya SM juga berarti makin sedikit lembaga pada SM dan makin banyaknya sekolah pada jenjang yang lebih rendah seperti pada SD.

Berdasarkan siswa dan kelas maka diperoleh R-S/K. Hal yang berbeda dengan R-S/Sek ternyata kepadatan kelas SMP dan SM yang terbesar ditandai dengan R-S/K terbesar pada SMP dan SM sebesar 29, sedangkan SD sebesar 24. Dengan demikian, di SMP dan SMA penggunaan kelas lebih efektif daripada di SD, walaupun tetap masih di bawah standar yang berlaku sebesar 36.

Berdasarkan kelas dan ruang kelas maka diperoleh R-K/RK. Dalam pemanfaatan ruang kelas, ternyata R-K/RK terbesar pada SD sebesar 1,05 yang berarti terdapat 5% ruang kelas yang dipakai lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar dan terkecil pada SMP sebesar 0,99 yang berarti terdapat 1% ruang kelas yang belum dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga menunjukkan bahwa di jenjang SD dan SM masih kekurangan ruang kelas bila setiap ruang kelas harus digunakan untuk satu rombongan belajar. Sebaliknya SMP telah kelebihan ruang kelas.

Berdasarkan sekolah dan perpustakaan maka dapat diperoleh %Perpus. Dalam kepemilikan perpustakaan, ternyata %Perpus terkecil pada SD sebesar 12,65% dan terbesar pada SMP sebesar 75,56%. Hal ini berarti masih terdapat 87,35% SD belum memiliki perpustakaan yang terbesar dan terdapat 24,44% SMP belum memiliki perpustakaan yang terkecil. Hal ini juga menunjukkan di semua jenjang masih kekurangan perpustakaan bila setiap sekolah harus memiliki perpustakaan.

Berdasarkan sekolah dengan laboratorium maka dapat diperoleh %Lab. Dalam kepemilikan laboratorium, ternyata pada SMP sebesar 134,46% atau 34,46% sekolah telah memiliki lebih dari satu laboratorium, sedangkan SM memiliki laboratorium terkecil sebesar 35,61% karena adanya ketentuan SMA idealnya memiliki 6 jenis dan SMK memiliki 3 jenis atau SM dirata-ratakan memiliki 5 jenis laboratorium. Hal ini menunjukkan SD dan SM masih kekurangan laboratorium, sedangkan SMP justru kelebihan laboratorium.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka tiga indikator akses yang meluas mengalami konversi, yaitu R-S/Sek SD menjadi sebesar 95,74, SMP menjadi 97,95, dan SM menjadi 99,42, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 97,70 termasuk kategori paripurna. R-S/K semua jenjang telah mencapai 100,00 termasuk kategori paripurna. R-K/RK SD mencapai 94,83, SMP mencapai 96,41, dan SM mencapai 96,76, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 96,00 termasuk

kategori paripurna. %Perpus SD terkecil sebesar 12,65, SMP sebesar 75,56, dan SM mencapai 65,76, sehingga rata-rata menjadi 51,32 termasuk kategori kurang. %Lab terbesar pada SMP sebesar 93,67 dan terkecil pada SM sebesar 35,61, sehingga rata-rata menjadi 64,90 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, akses yang meluas SD sebesar 72,47 termasuk kategori kurang, SMP sebesar 92,72 termasuk kategori utama, dan SM sebesar 79,51 termasuk kategori kurang, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 81,56 termasuk kategori pratama. Dengan demikian, akses yang paling meluas adalah SMP, sedangkan SD dan SM kurang meluas.

#### a. Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis lima indikator akses pendidikan yang meluas tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.2. Jumlah sekolah terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 19.848 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 452, sedangkan siswa terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.560.218 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 78.064. Namun, dilihat dari indikator R-S/Sek SD terkecil terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 113 dan terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 311 dengan angka nasional sebesar 175. Dengan demikian, daya tampung sekolah hanya dimanfaatkan sebesar 91,38% dari standar sebesar 192.

Jumlah kelas terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 159.631 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.747. Namun, indikator R-S/K SD terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 17 dan terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masing-masing sebesar 29 dengan angka nasional sebesar 24. Dengan demikian, pendayagunaan kelas hanya 73,53%, dengan kisaran ini jauh dari standar ideal sebesar 32. Rendahnya R-S/K SD menunjukkan bahwa sekolah belum terisi sesuai dengan kapasitas yang ada karena adanya perbedaan daerah dan geografis, walaupun di daerah padat pun ternyata tetap kurang dari standar sebesar 32.

Jumlah ruang kelas terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 139.071 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.479. Namun, indikator R-K/RK SD terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,95 dan terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,22 dengan angka nasional sebesar 1,05, sedangkan Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Maluku Utara dalam kondisi ideal sebesar 1,00. Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terdapat 5% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sedangkan Kepulauan Riau terdapat 22% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga pada tingkat nasional terdapat 5% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar.

Jumlah perpustakaan SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 3.927 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 15. Indikator %Perpus terkecil juga terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 1,18%, namun yang terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 76,66% dengan angka nasional sebesar 12,65%, yang berarti ketersediaan perpustakaan SD hanya 12,65%, sehingga masih terdapat 87,35% sekolah tidak memiliki perpustakaan.

**Tabel 4.2**  
**Data dan Indikator Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Provinsi	Data					Indikator					
		Sekolah	Siswa	Kelas	Ruang Kelas	Perpustakaan	Laboratorium	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpus	% Lab
1	DKI Jakarta	2,648	822,420	28,139	23,907	2,030	1,722	311	29	1.18	76.66	65.03
2	Jawa Barat	19,848	4,560,218	159,631	139,071	2,561	9,720	230	29	1.15	12.90	48.97
3	Banten	4,522	1,206,719	41,114	34,876	917	2,185	267	29	1.18	20.28	48.32
4	Jawa Tengah	19,087	2,908,119	127,203	127,494	3,481	12,078	152	23	1.00	18.24	63.28
5	DI Yogyakarta	1,840	291,647	13,482	13,929	1,113	1,592	159	22	0.97	60.49	86.52
6	Jawa Timur	19,362	2,910,051	134,917	134,206	3,927	11,421	150	22	1.01	20.28	58.99
7	Aceh	3,400	482,493	23,748	24,012	141	2,603	142	20	0.99	4.15	76.56
8	Sumatera Utara	9,528	1,780,003	72,815	70,311	622	5,090	187	24	1.04	6.53	53.42
9	Sumatera Barat	4,120	654,687	30,047	30,077	187	2,486	159	22	1.00	4.54	60.34
10	Riau	3,583	803,489	33,101	30,377	537	1,864	224	24	1.09	14.99	52.02
11	Kepulauan Riau	889	221,910	8,877	7,282	171	593	250	25	1.22	19.24	66.70
12	Lambi	2,433	395,806	18,337	17,817	102	1,510	163	22	1.03	4.19	62.06
13	Sumatera Selatan	4,629	944,172	38,952	34,427	287	2,696	204	24	1.13	6.20	58.24
14	Bangka Belitung	799	159,462	6,402	6,497	129	780	200	25	0.99	16.15	97.62
15	Bengkulu	1,355	220,771	10,446	10,292	69	980	163	21	1.01	5.09	72.32
16	Lampung	4,629	845,662	36,494	33,983	306	2,652	183	23	1.07	6.61	57.29
17	Kalimantan Barat	4,341	610,168	30,548	28,701	202	2,660	141	20	1.06	4.65	61.28
18	Kalimantan Tengah	2,600	294,057	17,125	16,807	93	1,432	113	17	1.02	3.58	55.08
19	Kalimantan Selatan	2,900	385,350	20,297	20,492	228	1,835	133	19	0.99	7.86	63.28
20	Kalimantan Timur	1,834	413,925	17,120	15,335	282	1,055	226	24	1.12	15.38	57.52
21	Kalimantan Utara	452	78,064	3,747	3,479	64	248	173	21	1.08	14.16	54.87
22	Sulawesi Utara	2,209	258,824	14,297	14,571	78	1,426	117	18	0.98	3.53	64.55
23	Gorontalo	927	134,344	6,197	6,449	55	765	145	22	0.96	5.93	82.52
24	Sulawesi Tengah	2,849	364,869	18,697	19,064	65	1,600	128	20	0.98	2.28	56.16
25	Sulawesi Selatan	6,357	970,423	45,353	44,004	220	4,359	153	21	1.03	3.46	68.57
26	Sulawesi Barat	1,311	168,986	8,825	8,660	24	709	129	19	1.02	1.83	54.08
27	Sulawesi Tenggara	2,287	337,018	16,319	15,675	54	1,484	147	21	1.04	2.36	64.89
28	Maluku	1,729	230,905	11,551	11,700	53	986	134	20	0.99	3.07	57.03
29	Maluku Utara	1,274	161,875	8,073	8,110	15	697	127	20	1.00	1.18	54.71
30	Bali	2,439	405,508	16,890	16,359	246	1,765	166	24	1.03	10.09	72.37
31	Nusa Tenggara Barat	3,143	514,051	21,943	20,857	112	2,095	164	23	1.05	3.56	66.66
32	Nusa Tenggara Timur	4,951	816,018	36,964	38,916	143	3,103	165	22	0.95	2.89	62.67
33	Papua	2,284	402,063	15,753	14,686	108	660	176	26	1.07	4.73	28.90
34	Papua Barat	977	130,976	6,693	6,090	42	345	134	20	1.10	4.30	35.31
	Indonesia	147,536	25,885,053	1,100,097	1,048,513	18,664	87,196	175	24	1.05	12.65	59.10

Jumlah laboratorium SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 12.078 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 248. Namun, indikator %Lab terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 28,90% dan terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 97,62% dengan angka nasional sebesar 59,10%, yang berarti ketersediaan laboratorium SD hanya 59,10%, sehingga masih terdapat 40,90% sekolah belum memiliki laboratorium.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses pendidikan SD yang meluas yang terdapat pada Tabel 4.3. Indikator R-S/Sek di 26 provinsi telah mencapai 100 atau ideal dengan terkecil pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 61,82, sehingga nasional menjadi 95,74 termasuk kategori paripurna. Indikator R-S/K di semua provinsi menjadi 100,00 termasuk kategori paripurna, berarti sudah memenuhi standar kurang dari 32. Indikator R-K/RK menjadi terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 99,90 dan terkecil terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 82,03, sehingga nasional menjadi 94,83 termasuk kategori utama. Indikator %Perpus terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 76,66 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 1,18, sehingga nasional menjadi sebesar 12,65 termasuk

kategori kurang. Indikator %Lab terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung 97,62 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 28,90, sehingga nasional sebesar 59,10 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.3  
Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Meluas					Rata-rata	Jenis
		R-S/Sek 192	R-S/K 32	R-K/RK 1	% Perpustakaan 100	% Lab 100		
1	DKI Jakarta	61.82	100.00	84.96	76.66	65.03	77.69	KURANG
2	Jawa Barat	83.57	100.00	87.12	12.90	48.97	66.51	KURANG
3	Banten	71.95	100.00	84.83	20.28	48.32	65.07	KURANG
4	Jawa Tengah	100.00	100.00	99.77	18.24	63.28	76.26	KURANG
5	DI Yogyakarta	100.00	100.00	96.79	60.49	86.52	88.76	MADYA
6	Jawa Timur	100.00	100.00	99.47	20.28	58.99	75.75	KURANG
7	Aceh	100.00	100.00	98.90	4.15	76.56	75.92	KURANG
8	Sumatera Utara	100.00	100.00	96.56	6.53	53.42	71.30	KURANG
9	Sumatera Barat	100.00	100.00	99.90	4.54	60.34	72.96	KURANG
10	Riau	85.62	100.00	91.77	14.99	52.02	68.88	KURANG
11	Kepulauan Riau	76.92	100.00	82.03	19.24	66.70	68.98	KURANG
12	Jambi	100.00	100.00	97.16	4.19	62.06	72.68	KURANG
13	Sumatera Selatan	94.13	100.00	88.38	6.20	58.24	69.39	KURANG
14	Bangka Belitung	96.20	100.00	98.54	16.15	97.62	81.70	PRATAMA
15	Bengkulu	100.00	100.00	98.53	5.09	72.32	75.19	KURANG
16	Lampung	100.00	100.00	93.12	6.61	57.29	71.40	KURANG
17	Kalimantan Barat	100.00	100.00	93.95	4.65	61.28	71.98	KURANG
18	Kalimantan Tengah	100.00	100.00	98.14	3.58	55.08	71.36	KURANG
19	Kalimantan Selatan	100.00	100.00	99.05	7.86	63.28	74.04	KURANG
20	Kalimantan Timur	85.07	100.00	89.57	15.38	57.52	69.51	KURANG
21	Kalimantan Utara	100.00	100.00	92.85	14.16	54.87	72.37	KURANG
22	Sulawesi Utara	100.00	100.00	98.12	3.53	64.55	73.24	KURANG
23	Gorontalo	100.00	100.00	96.09	5.93	82.52	76.91	KURANG
24	Sulawesi Tengah	100.00	100.00	98.07	2.28	56.16	71.30	KURANG
25	Sulawesi Selatan	100.00	100.00	97.03	3.46	68.57	73.81	KURANG
26	Sulawesi Barat	100.00	100.00	98.13	1.83	54.08	70.81	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	100.00	100.00	96.05	2.36	64.89	72.66	KURANG
28	Maluku	100.00	100.00	98.73	3.07	57.03	71.76	KURANG
29	Maluku Utara	100.00	100.00	99.54	1.18	54.71	71.09	KURANG
30	Bali	100.00	100.00	96.86	10.09	72.37	75.86	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	100.00	100.00	95.05	3.56	66.66	73.05	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	100.00	100.00	94.98	2.89	62.67	72.11	KURANG
33	Papua	100.00	100.00	93.23	4.73	28.90	65.37	KURANG
34	Papua Barat	100.00	100.00	90.99	4.30	35.31	66.12	KURANG
	Indonesia	95.74	100.00	94.83	12.65	59.10	72.47	KURANG
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	UTAMA	KURANG	KURANG	KURANG	

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SD yang meluas menjadi 72,47 termasuk kategori kurang. Hal ini berarti akses pendidikan SD yang meluas sebesar 72% dari 100%. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 32 provinsi memiliki nilai kurang dari 80, termasuk kategori kurang, 1 provinsi termasuk pratama, dan 1 provinsi termasuk madya. Nilai terendah sebesar 65,07 termasuk kategori kurang terjadi di Provinsi Banten dan nilai tertinggi sebesar 88,76 termasuk madya di Provinsi DI Yogyakarta.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis lima indikator akses pendidikan yang meluas tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.4. Jumlah sekolah tertinggi

terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.744 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 152, sedangkan siswa tertinggi juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.790.762 dan terendah juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 29.834. Namun, dilihat dari indikator maka R-S/Sek SMP berkisar antara 134 terendah sebesar Provinsi Kalimantan Tengah sampai 495 tertinggi sebesar Provinsi Bali dengan angka nasional sebesar 271. Dengan demikian, daya tampung sekolah hanya dimanfaatkan sebesar 83,70% dari standar sebesar 324.

Tabel 4.4  
Data dan Indikator Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator				
		Sekolah	Siswa	Kelas	Ruang Kelas	Perpustakaan	Laboratorium	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpus	% Lab
1	DKI Jakarta	1,066	370,160	11,914	11,284	962	2,456	347	31	1.06	90.24	230.39
2	Jawa Barat	4,744	1,790,762	53,815	52,316	3,415	6,801	377	33	1.03	71.99	143.36
3	Banten	1,334	426,658	13,067	13,230	971	1,820	320	33	0.99	72.79	136.43
4	Jawa Tengah	3,221	1,216,596	40,440	40,705	2,809	6,476	378	30	0.99	87.21	201.06
5	DI Yogyakarta	433	129,991	4,576	4,770	410	1,082	300	28	0.96	94.69	249.88
6	Jawa Timur	4,396	1,262,919	43,810	44,087	3,321	7,390	287	29	0.99	75.55	168.11
7	Aceh	1,037	197,649	7,965	9,034	874	1,362	191	25	0.88	84.28	131.34
8	Sumatera Utara	2,420	654,138	21,243	22,173	1,825	3,035	270	31	0.96	75.41	125.41
9	Sumatera Barat	770	214,535	8,019	8,343	645	992	279	27	0.96	83.77	128.83
10	Riau	1,082	251,319	8,915	9,009	737	1,168	232	28	0.99	68.11	107.95
11	Kepulauan Riau	321	79,005	2,622	2,566	219	376	246	30	1.02	68.22	117.13
12	Jambi	627	123,288	4,702	4,954	487	709	197	26	0.95	77.67	113.08
13	Sumatera Selatan	1,247	347,335	11,183	11,044	946	1,332	279	31	1.01	75.86	106.82
14	Bangka Belitung	198	57,204	1,864	1,929	177	310	289	31	0.97	89.39	156.57
15	Bengkulu	412	86,848	3,364	3,516	329	466	211	26	0.96	79.85	113.11
16	Lampung	1,292	316,299	10,919	11,213	999	1,808	245	29	0.97	77.32	139.94
17	Kalimantan Barat	1,222	228,046	7,975	8,238	851	976	187	29	0.97	69.64	79.87
18	Kalimantan Tengah	783	105,119	4,302	4,535	518	682	134	24	0.95	66.16	87.10
19	Kalimantan Selatan	578	120,241	4,602	4,801	542	1,012	208	26	0.96	93.77	175.09
20	Kalimantan Timur	589	152,417	5,254	5,239	457	740	259	29	1.00	77.59	125.64
21	Kalimantan Utara	152	29,834	1,094	1,032	112	153	196	27	1.06	73.68	100.66
22	Sulawesi Utara	698	119,531	4,749	4,960	550	720	171	25	0.96	78.80	103.15
23	Gorontalo	318	49,186	2,042	2,100	250	332	155	24	0.97	78.62	104.40
24	Sulawesi Tengah	799	128,020	5,341	5,629	534	661	160	24	0.95	66.83	82.73
25	Sulawesi Selatan	1,599	391,982	14,639	14,574	1,215	1,939	245	27	1.00	75.98	121.26
26	Sulawesi Barat	331	61,266	2,306	2,391	217	231	185	27	0.96	65.56	69.79
27	Sulawesi Tenggara	712	125,202	5,259	5,459	537	773	176	24	0.96	75.42	108.57
28	Maluku	594	95,165	3,902	4,039	349	392	160	24	0.97	58.75	65.99
29	Maluku Utara	444	58,890	2,460	2,503	259	254	133	24	0.98	58.33	57.21
30	Bali	396	195,956	6,153	5,180	358	755	495	32	1.19	90.40	190.66
31	Nusa Tenggara Barat	831	180,202	6,849	6,793	587	826	217	26	1.01	70.64	99.40
32	Nusa Tenggara Timur	1,523	316,551	11,625	11,924	997	994	208	27	0.97	65.46	65.27
33	Papua	587	114,514	3,982	3,921	332	523	195	29	1.02	56.56	89.10
34	Papua Barat	267	43,449	1,704	1,767	183	236	163	25	0.96	68.54	88.39
	Indonesia	37,023	10,040,277	342,656	345,258	27,974	49,782	271	29	0.99	75.56	134.46

Jumlah kelas tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 53.815 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.094. Namun, indikator R-S/K SMP berkisar antara 24 terendah di 6 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara sampai 33 tertinggi di Provinsi Jawa Barat dan Banten dengan angka nasional sebesar 29. Dengan demikian, pendayagunaan kelas hanya 81,39%, dengan kisaran ini jauh dari standar ideal sebesar 36. Rendahnya R-S/K SMP menunjukkan bahwa sekolah belum terisi sesuai dengan kapasitas yang ada karena adanya perbedaan daerah dan geografis, walaupun di daerah padat pun ternyata tetap kurang dari standar.

Jumlah ruang kelas tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 52.316 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.032. Namun, indikator R-K/RK SMP berkisar antara 0,88 terendah di Provinsi Aceh sampai 1,19 tertinggi di Bali dengan angka nasional sebesar 0,99, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan dalam kondisi ideal sebesar 1,00. Provinsi Aceh masih terdapat 12% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sebaliknya di Provinsi Bali terdapat 19% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga pada tingkat nasional terdapat 1% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Jumlah perpustakaan SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.415 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 112. Namun, indikator %Perpus terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 58,33% dan terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 93,77% dengan angka nasional sebesar 75,56%, yang berarti ketersediaan perpustakaan SM hanya 75,56%, sehingga masih terdapat 24,44% sekolah tidak memiliki perpustakaan.

Jumlah laboratorium SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 7.390 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 153. Namun, indikator %Lab terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 57,21% dan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 249,88% dengan angka nasional sebesar 134,46%, yang berarti ketersediaan laboratorium SMP di 34,46% sekolah memiliki lebih dari 1 laboratorium. Kekurangan laboratorium SMP terjadi di 10 provinsi dan kelebihan terjadi di 24 provinsi.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses yang meluas SMP yang terdapat pada Tabel 4.5. Indikator R-S/Sek di 30 provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 artinya karena kurang dari standar 324 dan terkecil sebesar 65,48 terjadi di Bali, sehingga nasional menjadi 97,95 termasuk kategori paripurna. Indikator R-S/K semua provinsi telah ideal menjadi 100,00 termasuk kategori paripurna. Indikator R-K/RK terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 99,71 dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 84,19, sehingga nasional menjadi 96,41 termasuk kategori paripurna. Indikator %Perpus terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 94,69 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 56,56, sehingga nasional sebesar 75,56 termasuk kategori kurang. Indikator %Lab terbesar terdapat di 24 provinsi sudah ideal dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 57,21, sehingga nasional sebesar 93,67 termasuk kategori paripurna.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SMP yang meluas menjadi 92,72 termasuk kategori utama. Hal ini berarti akses pendidikan SMP yang meluas sebesar 93% dari 100% mendekati ideal. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 2 provinsi termasuk pratama, 7 provinsi termasuk madya, 16 provinsi termasuk kategori utama, dan 9 provinsi termasuk kategori paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 98,12 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 82,76 termasuk kategori pratama.

**Tabel 4.5**  
**Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Meluas						Rata-rata	Jenis
		R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpus	% Lab			
		324	36	1	100	100			
1	DKI Jakarta	93.31	100.00	94.71	90.24	100.00	95.65	PARIPURNA	
2	Jawa Barat	85.83	100.00	97.21	71.99	100.00	91.01	UTAMA	
3	Banten	100.00	100.00	98.77	72.79	100.00	94.31	UTAMA	
4	Jawa Tengah	85.78	100.00	99.35	87.21	100.00	94.47	UTAMA	
5	DI Yogyakarta	100.00	100.00	95.93	94.69	100.00	98.12	PARIPURNA	
6	Jawa Timur	100.00	100.00	99.37	75.55	100.00	94.98	UTAMA	
7	Aceh	100.00	100.00	88.17	84.28	100.00	94.49	UTAMA	
8	Sumatera Utara	100.00	100.00	95.81	75.41	100.00	94.24	UTAMA	
9	Sumatera Barat	100.00	100.00	96.12	83.77	100.00	95.98	PARIPURNA	
10	Riau	100.00	100.00	98.96	68.11	100.00	93.41	UTAMA	
11	Kepulauan Riau	100.00	100.00	97.86	68.22	100.00	93.22	UTAMA	
12	Jambi	100.00	100.00	94.91	77.67	100.00	94.52	UTAMA	
13	Sumatera Selatan	100.00	100.00	98.76	75.86	100.00	94.92	UTAMA	
14	Bangka Belitung	100.00	100.00	96.63	89.39	100.00	97.20	PARIPURNA	
15	Bengkulu	100.00	100.00	95.68	79.85	100.00	95.11	PARIPURNA	
16	Lampung	100.00	100.00	97.38	77.32	100.00	94.94	UTAMA	
17	Kalimantan Barat	100.00	100.00	96.81	69.64	79.87	89.26	MADYA	
18	Kalimantan Tengah	100.00	100.00	94.86	66.16	87.10	89.62	MADYA	
19	Kalimantan Selatan	100.00	100.00	95.86	93.77	100.00	97.93	PARIPURNA	
20	Kalimantan Timur	100.00	100.00	99.71	77.59	100.00	95.46	PARIPURNA	
21	Kalimantan Utara	100.00	100.00	94.33	73.68	100.00	93.60	UTAMA	
22	Sulawesi Utara	100.00	100.00	95.75	78.80	100.00	94.91	UTAMA	
23	Gorontalo	100.00	100.00	97.24	78.62	100.00	95.17	PARIPURNA	
24	Sulawesi Tengah	100.00	100.00	94.88	66.83	82.73	88.89	MADYA	
25	Sulawesi Selatan	100.00	100.00	99.56	75.98	100.00	95.11	PARIPURNA	
26	Sulawesi Barat	100.00	100.00	96.45	65.56	69.79	86.36	MADYA	
27	Sulawesi Tenggara	100.00	100.00	96.34	75.42	100.00	94.35	UTAMA	
28	Maluku	100.00	100.00	96.61	58.75	65.99	84.27	PRATAMA	
29	Maluku Utara	100.00	100.00	98.28	58.33	57.21	82.76	PRATAMA	
30	Bali	65.48	100.00	84.19	90.40	100.00	88.01	MADYA	
31	Nusa Tenggara Barat	100.00	100.00	99.18	70.64	99.40	93.84	UTAMA	
32	Nusa Tenggara Timur	100.00	100.00	97.49	65.46	65.27	85.64	MADYA	
33	Papua	100.00	100.00	98.47	56.56	89.10	88.82	MADYA	
34	Papua Barat	100.00	100.00	96.43	68.54	88.39	90.67	UTAMA	
	Indonesia	97.95	100.00	96.41	75.56	93.67	92.72	UTAMA	
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	KURANG	ARIPURNA	UTAMA		

c. Sekolah Menengah (SM)

Data SM adalah penjumlahan dari data SMA dan SMK, sehingga dihasilkan analisis lima indikator akses pendidikan yang meluas tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.6. Jumlah sekolah tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.959 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 80, sedangkan siswa tertinggi juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.480.948 dan terendah juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 21.997. Namun, dilihat dari indikator maka R-S/Sek SM terkecil terjadi pada Provinsi Maluku Utara sebesar 166 dan terbesar pada Provinsi Bali sebesar 507 dengan angka nasional sebesar 341. Dengan demikian, daya tampung sekolah hanya dimanfaatkan sebesar 78,97% dari standar sebesar 432.

Jumlah kelas tertinggi SM terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 47.373 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 813. Namun, indikator R-S/K SM terbesar pada empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, dan Bali

masing-masing sebesar 31 dan terkecil pada Provinsi Maluku Utara sebesar 22 dengan angka nasional sebesar 29. Dengan demikian, pendayagunaan kelas hanya 80,06%, dengan kisaran ini jauh dari standar ideal sebesar 36. Rendahnya R-S/K SM menunjukkan bahwa sekolah belum terisi sesuai dengan kapasitas yang ada karena adanya perbedaan daerah dan geografis, walaupun di daerah padat pun ternyata tetap kurang dari standar.

Tabel 4.6  
Data dan Indikator Akses yang Meluas SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data					Indikator					
		Sekolah	Siswa	Kelas	Ruang Kelas	Perpustakaan	Laboratorium	R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpus	% Lab
1	DKI Jakarta	1.053	358.030	12.220	11.711	780	2.164	340	29	1,04	74,07	41,10
2	Jawa Barat	3.956	1.480.948	47.373	43.922	2.268	5.741	374	31	1,08	57,33	29,02
3	Banten	1.119	388.566	12.446	12.151	663	1.681	347	31	1,02	59,25	30,04
4	Jawa Tengah	2.371	1.077.710	35.749	33.664	1.744	5.789	455	30	1,06	73,56	48,83
5	DI Yogyakarta	378	132.914	5.165	5.069	319	968	352	26	1,02	84,39	51,22
6	Jawa Timur	3.250	1.151.857	39.004	35.771	1.974	5.763	354	30	1,09	60,74	35,46
7	Aceh	676	180.600	7.318	7.603	507	1.650	267	25	0,96	75,00	48,82
8	Sumatera Utara	1.944	611.345	20.036	20.199	1.289	3.292	314	31	0,99	66,31	33,87
9	Sumatera Barat	500	212.492	7.807	7.397	380	1.035	425	27	1,06	76,00	41,40
10	Riau	675	217.031	7.929	8.087	391	1.164	322	27	0,98	57,93	34,49
11	Kepulauan Riau	202	59.830	2.295	2.291	139	398	296	26	1,00	68,81	39,41
12	Jambi	365	109.374	4.081	4.063	264	598	300	27	1,00	72,33	32,77
13	Sumatera Selatan	834	282.524	9.310	9.156	631	1.394	339	30	1,02	75,66	33,43
14	Bangka Belitung	119	43.371	1.521	1.584	105	358	364	29	0,96	88,24	60,17
15	Bengkulu	214	69.556	2.660	2.672	165	460	325	26	1,00	77,10	42,99
16	Lampung	872	255.823	8.953	8.648	577	1.461	293	29	1,04	66,17	33,51
17	Kalimantan Barat	558	158.326	5.356	5.359	381	896	284	30	1,00	68,28	32,11
18	Kalimantan Tengah	358	76.634	3.160	3.277	254	604	214	24	0,96	70,95	33,74
19	Kalimantan Selatan	301	106.955	3.779	3.704	221	644	355	28	1,02	73,42	42,79
20	Kalimantan Timur	417	131.174	4.827	4.643	281	733	315	27	1,04	67,39	35,16
21	Kalimantan Utara	80	21.997	813	770	56	126	275	27	1,06	70,00	31,50
22	Sulawesi Utara	381	97.585	4.302	4.282	260	603	256	23	1,00	68,24	31,65
23	Gorontalo	108	43.220	1.647	1.668	81	281	400	26	0,99	75,00	52,04
24	Sulawesi Tengah	356	101.334	3.960	3.765	227	546	285	26	1,05	63,76	30,67
25	Sulawesi Selatan	966	341.283	12.350	11.873	675	1.847	353	28	1,04	69,88	38,24
26	Sulawesi Barat	188	47.810	1.812	1.815	102	255	254	26	1,00	54,26	27,13
27	Sulawesi Tenggara	408	111.205	4.542	4.389	293	719	273	24	1,03	71,81	35,25
28	Maluku	353	79.673	3.399	3.288	213	518	226	23	1,03	60,34	29,35
29	Maluku Utara	281	46.776	2.166	2.074	163	352	166	22	1,04	58,01	25,05
30	Bali	325	164.845	5.313	4.783	241	740	507	31	1,11	74,15	45,54
31	Nusa Tenggara Barat	547	160.133	5.671	5.437	318	747	293	28	1,04	58,14	27,31
32	Nusa Tenggara Timur	717	216.608	8.458	8.218	427	843	302	26	1,03	59,55	23,51
33	Papua	321	76.941	3.168	3.054	194	521	240	24	1,04	60,44	32,46
34	Papua Barat	155	32.924	1.453	1.477	86	242	212	23	0,98	55,48	31,23
	Indonesia	25.348	8.647.394	300.043	287.864	16.669	45.133	341	29	1,04	65,76	35,61

Jumlah ruang kelas tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 43.922 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 770. Namun, indikator R-K/RK SM berkisar antara 0,96 terendah di Provinsi Aceh, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah sampai 1,09 tertinggi di Provinsi Jawa Timur dengan angka nasional sebesar 1,04, sedangkan enam Provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat dalam kondisi ideal sebesar 1,00. Provinsi Aceh, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah masih terdapat 4% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sebaliknya di Provinsi Jawa Timur terdapat 9% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan

belajar mengajar, sehingga pada tingkat nasional terdapat 4% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar.

Jumlah perpustakaan SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 2.268 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 56. Namun, indikator %Perpus terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 54,26% dan terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 88,24% dengan angka nasional sebesar 65,76%, yang berarti ketersediaan perpustakaan SM hanya 65,76% dari sekolah yang ada, sehingga masih terdapat 34,24% sekolah tidak memiliki perpustakaan.

Jumlah laboratorium SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5.789 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 126. Namun, indikator %Lab terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 23,51% dan terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 60,17% dengan angka nasional sebesar 35,61%, yang berarti ketersediaan laboratorium SM hanya 35,61%, sehingga masih terdapat 64,39% sekolah tidak memiliki laboratorium sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4.7  
Akses yang Meluas SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Meluas					Rata-rata	Jenis
		R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpus	% Lab		
		432	36	1	100	100		
1	DKI Jakarta	100,00	100,00	95,83	74,07	41,10	82,20	PRATAMA
2	Jawa Barat	100,00	100,00	92,72	57,33	29,02	75,81	KURANG
3	Banten	100,00	100,00	97,63	59,25	30,04	77,38	KURANG
4	Jawa Tengah	95,04	100,00	94,17	73,56	48,83	82,32	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	98,14	84,39	51,22	86,75	MADYA
6	Jawa Timur	100,00	100,00	91,71	60,74	35,46	77,58	KURANG
7	Aceh	100,00	100,00	96,25	75,00	48,82	84,01	PRATAMA
8	Sumatera Utara	100,00	100,00	99,19	66,31	33,87	79,87	KURANG
9	Sumatera Barat	100,00	100,00	94,75	76,00	41,40	82,43	PRATAMA
10	Riau	100,00	100,00	98,05	57,93	34,49	78,09	KURANG
11	Kepulauan Riau	100,00	100,00	99,83	68,81	39,41	81,61	PRATAMA
12	Jambi	100,00	100,00	99,56	72,33	32,77	80,93	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	100,00	100,00	98,35	75,66	33,43	81,49	PRATAMA
14	Bangka Belitung	100,00	100,00	96,02	88,24	60,17	88,89	MADYA
15	Bengkulu	100,00	100,00	99,55	77,10	42,99	83,93	PRATAMA
16	Lampung	100,00	100,00	96,59	66,17	33,51	79,25	KURANG
17	Kalimantan Barat	100,00	100,00	99,94	68,28	32,11	80,07	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	100,00	100,00	96,43	70,95	33,74	80,22	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	100,00	100,00	98,02	73,42	42,79	82,85	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	100,00	100,00	96,19	67,39	35,16	79,75	KURANG
21	Kalimantan Utara	100,00	100,00	94,71	70,00	31,50	79,24	KURANG
22	Sulawesi Utara	100,00	100,00	99,54	68,24	31,65	79,89	KURANG
23	Gorontalo	100,00	100,00	98,74	75,00	52,04	85,16	MADYA
24	Sulawesi Tengah	100,00	100,00	95,08	63,76	30,67	77,90	KURANG
25	Sulawesi Selatan	100,00	100,00	96,14	69,88	38,24	80,85	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	100,00	100,00	99,83	54,26	27,13	76,24	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	100,00	100,00	96,63	71,81	35,25	80,74	PRATAMA
28	Maluku	100,00	100,00	96,73	60,34	29,35	77,28	KURANG
29	Maluku Utara	100,00	100,00	95,75	58,01	25,05	75,76	KURANG
30	Bali	85,17	100,00	90,02	74,15	45,54	78,98	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	100,00	100,00	95,87	58,14	27,31	76,26	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	100,00	97,16	59,55	23,51	76,05	KURANG
33	Papua	100,00	100,00	96,40	60,44	32,46	77,86	KURANG
34	Papua Barat	100,00	100,00	98,38	55,48	31,23	77,02	KURANG
	Indonesia	99,42	100,00	96,76	65,76	35,61	79,51	KURANG
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	KURANG	KURANG	KURANG	

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai indikator akses pendidikan SM yang meluas pada Tabel 4.7. Indikator R-S/Sek di 32 provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 dan terkecil sebesar 85,17 terjadi di Provinsi Bali, sehingga nasional menjadi 99,42 termasuk kategori paripurna. Indikator R-S/K semua provinsi telah ideal menjadi 100,00 termasuk kategori paripurna. Indikator R-K/RK terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 99,94 dan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 91,71, sehingga nasional menjadi 96,76 termasuk kategori paripurna. Indikator %Perpus terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 88,24 dan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 54,26, sehingga nasional sebesar 65,76 termasuk kategori kurang. Indikator %Lab terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 60,17 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 25,05, sehingga nasional sebesar 35,61 termasuk kategori kurang.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SM yang meluas menjadi 79,51 termasuk kategori kurang. Hal ini berarti akses pendidikan SM yang meluas sebesar 80% dari 100% atau hanya sekitar empat per lima. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 18 provinsi termasuk kategori kurang, 13 provinsi termasuk kategori pratama, dan 3 provinsi termasuk madya. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 88,89 termasuk kategori madya, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 75,76 termasuk kategori kurang.

#### d. Semua Jenjang

Berdasarkan lima indikator akses pendidikan yang meluas maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SM, dan rata-rata 3 jenjang seperti disajikan pada Tabel 4.8. Bila dilihat secara nasional maka SD memiliki nilai akses pendidikan yang meluas terkecil sebesar 72,47 termasuk kategori kurang dan terbesar pada SMP sebesar 92,76 termasuk kategori utama, sedangkan SM sebesar 79,51 termasuk kategori pratama. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang meluas sebesar 81,56 termasuk kategori pratama.

Bila dilihat akses pendidikan yang meluas untuk tiap provinsi yang terbesar maka untuk SD terjadi pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 88,76 termasuk madya, untuk SMP juga pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 98,12 termasuk paripurna, sedangkan untuk SM pada Provinsi Bangka Belitung sebesar 88,89 termasuk madya. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang meluas terbesar terjadi pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 91,21 termasuk kategori utama.

Sebaliknya, akses pendidikan yang meluas terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Banten sebesar 65,07 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Maluku Utara sebesar 82,76 termasuk pratama, sedangkan untuk SM pada Provinsi Maluku Utara sebesar 75,76 termasuk kurang. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang meluas terkecil terjadi pada Provinsi Maluku Utara sebesar 76,54 termasuk kategori kurang.

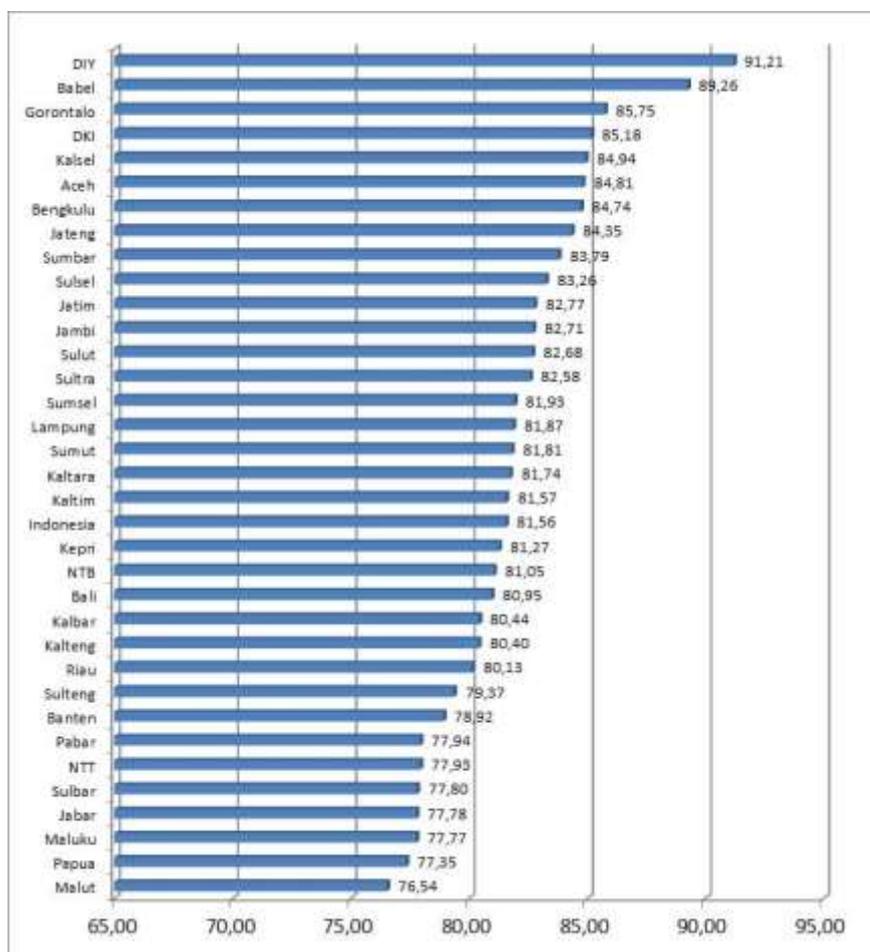
Tabel 4.8  
Akses yang Meluas Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	77,69	95,65	82,20	85,18	MADYA
2	Jawa Barat	66,51	91,01	75,81	77,78	KURANG
3	Banten	65,07	94,31	77,38	78,92	KURANG
4	Jawa Tengah	76,26	94,47	82,32	84,35	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	88,76	98,12	86,75	91,21	UTAMA
6	Jawa Timur	75,75	94,98	77,58	82,77	PRATAMA
7	Aceh	75,92	94,49	84,01	84,81	PRATAMA
8	Sumatera Utara	71,30	94,24	79,87	81,81	PRATAMA
9	Sumatera Barat	72,96	95,98	82,43	83,79	PRATAMA
10	Riau	68,88	93,41	78,09	80,13	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	68,98	93,22	81,61	81,27	PRATAMA
12	Jambi	72,68	94,52	80,93	82,71	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	69,39	94,92	81,49	81,93	PRATAMA
14	Bangka Belitung	81,70	97,20	88,89	89,26	MADYA
15	Bengkulu	75,19	95,11	83,93	84,74	PRATAMA
16	Lampung	71,40	94,94	79,25	81,87	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	71,98	89,26	80,07	80,44	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	71,36	89,62	80,22	80,40	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	74,04	97,93	82,85	84,94	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	69,51	95,46	79,75	81,57	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	72,37	93,60	79,24	81,74	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	73,24	94,91	79,89	82,68	PRATAMA
23	Gorontalo	76,91	95,17	85,16	85,75	MADYA
24	Sulawesi Tengah	71,30	88,89	77,90	79,37	KURANG
25	Sulawesi Selatan	73,81	95,11	80,85	83,26	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	70,81	86,36	76,24	77,80	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	72,66	94,35	80,74	82,58	PRATAMA
28	Maluku	71,76	84,27	77,28	77,77	KURANG
29	Maluku Utara	71,09	82,76	75,76	76,54	KURANG
30	Bali	75,86	88,01	78,98	80,95	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	73,05	93,84	76,26	81,05	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	72,11	85,64	76,05	77,93	KURANG
33	Papua	65,37	88,82	77,86	77,35	KURANG
34	Papua Barat	66,12	90,67	77,02	77,94	KURANG
	Indonesia	72,47	92,72	79,51	81,56	PRATAMA
	Jenis	KURANG	UTAMA	KURANG	PRATAMA	

Dengan demikian, dari tiga jenjang pendidikan akses pendidikan yang meluas hanya tercapai sebesar 81,56 termasuk pratama. Bila dilihat setiap provinsi maka terdapat 9 provinsi termasuk kurang, 21 provinsi termasuk pratama, 3 provinsi termasuk madya, dan 1 provinsi termasuk utama.

Keberhasilan pendidikan dilihat dari akses pendidikan yang meluas semua jenjang dapat terlihat jelas pada Grafik 4.1, terlihat bahwa lima provinsi terbawah adalah Maluku Utara, Papua, Maluku, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat. Sebaliknya, lima provinsi teratas adalah DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Gorontalo, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan.

Grafik 4.1  
Akses yang Meluas Semua Jenjang Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016



## 2. Akses yang Merata

Terdapat tiga jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui akses yang merata. Dari tiga indikator tersebut, indikator yang dilakukan konversi adalah AMK SD, APK SMP/SM, dan TPS menggunakan standar tertentu yang terdapat pada Tabel 3.3, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator, sedangkan APK SD, AM SMP/SM tak mengalami konversi. Ketiga nilai tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi 3 sehingga diperoleh nilai akses yang merata. Nilai maksimal 100, sehingga nilai makin mendekati 100 disebut makin merata.

Tabel 4.9  
Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Merata  
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015/2016

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A. Data						
1	Penduduk masuk sekolah	9.326.200	-	-		
2	Penduduk usia sekolah	27.381.500	13.390.600	13.281.300		
3	Lulusan	4.381.997	3.274.813	-		
4	Siswa Baru	4.202.975	3.435.984	3.175.407		
5	Kelas	1.100.097	342.656	300.043		
6	Sekolah ekuivalen	183.350	57.109	50.007		
B. Indikator						
1	APK	94,53	74,98	65,11		
2	AMK	45,07	-	-		
	AM	-	78,41	96,96		
3	TPS	51	77	65		
C. Nilai Indikator						
1	APK	94,53	94,49	92,55	93,86	UTAMA
2	AMK/AM	92,38	78,41	96,96	89,25	MADYA
3	TPS	96,97	98,89	96,25	97,37	PARIPURNA
	Akses yang Merata	94,63	90,60	95,26	93,49	UTAMA
	Jenis Akses yang Merata	UTAMA	UTAMA	PARIPURNA	UTAMA	

Tabel 4.9 menunjukkan data, indikator, dan nilai akses yang merata menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat penduduk usia masuk SD sebesar 9.326.200, penduduk usia SD sebesar 27.381.500, usia SMP sebesar 13.390.600, dan usia SM sebesar 13.281.300. Lulusan SD sebesar 4.381.997 dan lulusan SMP sebesar 3.274.813. Siswa baru SD sebesar 4.202.975 lebih kecil jika dibandingkan dengan lulusan SD, artinya masukan SD berkurang, sehingga siswa menjadi berkurang. Siswa baru SMP sebesar 3.435.984, sedangkan SM sebesar 3.175.407. Kelas SD sebesar 1.100.097, SMP sebesar 342.656, sedangkan SM sebesar 300.043.

Berdasarkan jumlah kelas dibagi dengan 6 maka diperoleh sekolah ekuivalen SD sebesar 183.350, SMP sebesar 57.109, sedangkan SM sebesar 50.007.

Berdasarkan data penduduk usia sekolah dan jumlah siswa maka diperoleh APK SD sebesar 94,53%, SMP sebesar 74,98%, sedangkan SM sebesar 65,11%.

Berdasarkan siswa baru dan penduduk usia masuk sekolah maka diperoleh AMK SD sebesar 45,07%, sedangkan siswa baru jenjang tertentu dengan lulusan jenjang sebelumnya maka diperoleh AM SMP sebesar 74,81% dan AM SM sebesar 96,96%.

Berdasarkan penduduk usia masuk sekolah dan sekolah ekuivalen SD maka diperoleh TPS SD sebesar 51, berdasarkan lulusan SD dan sekolah ekuivalen SMP maka diperoleh TPS SMP sebesar 77, lulusan SMP dan sekolah ekuivalen SM maka diperoleh TPS SM sebesar 65.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka tiga indikator akses yang merata mengalami konversi, yaitu AMK SD, APK SMP dan SM serta TPS. APK SD menjadi sebesar 94,53, SMP menjadi 94,49, dan SM menjadi 92,55, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 93,86 termasuk kategori utama. AMK SD menjadi

sebesar 92,38, AM SMP sebesar 78,41, dan SM sebesar 96,96, sehingga rata-rata semua jenjang sebesar 89,25 termasuk kategori madya. TPS SD menjadi 96,97, SMP mencapai 98,89, dan SM mencapai 96,25, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 97,37 termasuk kategori paripurna. Dengan demikian, akses yang merata SD sebesar 94,63 termasuk kategori utama, SMP sebesar 90,60 termasuk kategori utama, dan SM sebesar 95,26 termasuk paripurna, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 93,49 termasuk kategori utama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jenjang yang paling tinggi atau SM yang paling merata dan jenjang SMP yang paling kecil namun masih dalam kategori merata.

a. SD

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang merata tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.10. APK terbesar terjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 112,15% dan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 79,78% dengan rata-rata nasional sebesar 94,53%, yang berarti ketercapaian APK masih belum optimal karena masih kurang dari 100 sebagai standar. Namun, terdapat 20 provinsi sudah lebih dari 100%.

Jumlah penduduk usia masuk sekolah atau 6-7 tahun terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.671.200 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 38.000, sedangkan siswa baru terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 746.871 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 13.539. Dilihat dari indikator AMK SD terkecil juga terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 35,63%, namun yang terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 61,45% dengan angka nasional sebesar 45,07%. Dengan demikian, masukan SD yang sesuai dengan usia masuk sekolah hanya tercapai 90,13%.

Jumlah kelas SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 159.631 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.747. Jumlah sekolah ekuivalen terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 26.605 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 625. Namun, indikator TPS terkecil atau terbaik karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih besar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 32 dan terbesar atau terburuk karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih kecil terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 73. Dengan demikian, kesempatan bersekolah di SD sebesar 51 atau mencapai 97,82% dari standar sebesar 52.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SD yang merata yang terdapat pada Tabel 4.11. Indikator APK di 20 provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 dan terkecil sebesar 79,78 terjadi di Provinsi Jawa Timur, sehingga nasional menjadi 94,53 termasuk kategori utama. Indikator AMK di 13 provinsi telah ideal menjadi 100,00 dan terkecil sebesar 71,26 terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga nasional menjadi 92,38 termasuk kategori utama. Indikator TPS di 25 provinsi telah ideal menjadi 100 dan terkecil terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 71,04, sehingga nasional menjadi 96,97 termasuk kategori paripurna.

**Tabel 4.10**  
**Data dan Indikator Akses yang Merata SD Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Provinsi	Data				Indikator		
		P6-7 Th	Siswa Baru	Kelas	Sekolah ekuivalen	APK	AMK	TPS
1	DKI Jakarta	343,300	132,486	28,139	4,690	91.68	38.59	73
2	Jawa Barat	1,671,200	746,871	159,631	26,605	94.79	44.69	63
3	Banten	461,500	201,478	41,114	6,852	94.59	43.66	67
4	Jawa Tengah	1,113,000	473,027	127,203	21,201	86.37	42.50	52
5	DI Yogyakarta	106,100	49,791	13,482	2,247	91.83	46.93	47
6	Jawa Timur	1,209,800	466,626	134,917	22,486	79.78	38.57	54
7	Aceh	213,000	79,615	23,748	3,958	80.48	37.38	54
8	Sumatera Utara	603,600	290,739	72,815	12,136	102.93	48.17	50
9	Sumatera Barat	211,300	105,845	30,047	5,008	106.80	50.09	42
10	Riau	258,400	138,917	33,101	5,517	106.30	53.76	47
11	Kepulauan Riau	83,800	38,880	8,877	1,480	92.46	46.40	57
12	Jambi	126,600	65,263	18,337	3,056	102.94	51.55	41
13	Sumatera Selatan	310,100	159,521	38,952	6,492	103.95	51.44	48
14	Bangka Belitung	50,400	27,305	6,402	1,067	106.81	54.18	47
15	Bengkulu	71,100	35,858	10,446	1,741	104.63	50.43	41
16	Lampung	309,100	143,712	36,494	6,082	95.15	46.49	51
17	Kalimantan Barat	187,600	96,623	30,548	5,091	108.13	51.50	37
18	Kalimantan Tengah	94,900	48,815	17,125	2,854	103.94	51.44	33
19	Kalimantan Selatan	154,000	64,050	20,297	3,383	87.46	41.59	46
20	Kalimantan Timur	115,400	70,914	17,120	2,853	108.05	61.45	40
21	Kalimantan Utara	38,000	13,539	3,747	625	101.25	35.63	61
22	Sulawesi Utara	81,900	37,961	14,297	2,383	104.07	46.35	34
23	Gorontalo	42,500	19,457	6,197	1,033	106.28	45.78	41
24	Sulawesi Tengah	106,600	54,377	18,697	3,116	111.24	51.01	34
25	Sulawesi Selatan	324,700	146,071	45,353	7,559	100.61	44.99	43
26	Sulawesi Barat	54,000	25,507	8,825	1,471	104.77	47.24	37
27	Sulawesi Tenggara	117,400	50,450	16,319	2,720	106.35	42.97	43
28	Maluku	74,000	34,956	11,551	1,925	98.01	47.24	38
29	Maluku Utara	52,800	23,737	8,073	1,346	105.18	44.96	39
30	Bali	139,000	66,164	16,890	2,815	99.05	47.60	49
31	Nusa Tenggara Barat	197,500	84,313	21,943	3,657	90.74	42.69	54
32	Nusa Tenggara Timur	241,300	120,732	36,964	6,161	112.15	50.03	39
33	Papua	126,600	68,268	15,753	2,626	84.66	53.92	48
34	Papua Barat	35,700	21,107	6,693	1,116	105.37	59.12	32
	Indonesia	9,326,200	4,202,975	1,100,097	183,350	94.53	45.07	51

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SD yang merata menjadi 94,63 termasuk kategori utama. Hal ini berarti akses pendidikan SD yang merata sebesar 95% dari 100% atau sudah mendekati ideal. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 1 provinsi termasuk kategori kurang, 2 provinsi termasuk kategori pratama, 3 provinsi termasuk madya, 5 provinsi termasuk utama, dan 23 provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di 12 provinsi dengan nilai sebesar 100 sudah ideal termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,97 termasuk kategori kurang.

**Tabel 4.11**  
**Akses yang Merata SD Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Merata				
		APK	AMK	TPS	Rata-rata	Jenis
		100	50	52		
1	DKI Jakarta	91.68	77.18	71.04	79.97	KURANG
2	Jawa Barat	94.79	89.38	82.78	88.98	MADYA
3	Banten	94.59	87.31	77.21	86.37	MADYA
4	Jawa Tengah	86.37	85.00	99.05	90.14	UTAMA
5	DI Yogyakarta	91.83	93.86	100.00	95.23	PARIPURNA
6	Jawa Timur	79.78	77.14	96.65	84.53	PRATAMA
7	Aceh	80.48	74.76	96.63	83.96	PRATAMA
8	Sumatera Utara	100.00	96.33	100.00	98.78	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
10	Riau	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	92.46	92.79	91.81	92.35	UTAMA
12	Jambi	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
13	Sumatera Selatan	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
15	Bengkulu	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
16	Lampung	95.15	92.99	100.00	96.04	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	87.46	83.18	100.00	90.21	UTAMA
20	Kalimantan Timur	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	100.00	71.26	85.46	85.57	MADYA
22	Sulawesi Utara	100.00	92.70	100.00	97.57	PARIPURNA
23	Gorontalo	100.00	91.56	100.00	97.19	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	100.00	89.97	100.00	96.66	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	100.00	94.47	100.00	98.16	PARIPURNA
27	Sulawesi Tenggara	100.00	85.95	100.00	95.32	PARIPURNA
28	Maluku	98.01	94.48	100.00	97.49	PARIPURNA
29	Maluku Utara	100.00	89.91	100.00	96.64	PARIPURNA
30	Bali	99.05	95.20	100.00	98.08	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	90.74	85.38	96.29	90.80	UTAMA
32	Nusa Tenggara Timur	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
33	Papua	84.66	100.00	100.00	94.89	UTAMA
34	Papua Barat	100.00	100.00	100.00	100.00	PARIPURNA
	Indonesia	94.53	92.38	96.97	94.63	UTAMA
	Jenis	UTAMA	UTAMA	PARIPURNA	UTAMA	

**b. SMP**

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang merata tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.12. APK SMP terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 99,32% dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 58,20% dengan rata-rata nasional sebesar 74,98%, yang berarti ketercapaian APK SMP hanya 93,73% dari standar sebesar 80 atau masih belum optimal.

Jumlah lulusan SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 797.996 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 12.152, sedangkan siswa baru SMP

terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 617.730 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 10.527. Namun, dilihat dari indikator AM SMP terkecil terdapat di Provinsi Jambi sebesar 64,40% dan terbesar terdapat di Provinsi Bali sebesar 92,06% dengan angka nasional sebesar 78,41%. Dengan demikian, masukan SMP hanya tercapai 78,41%, yang berarti masih terdapat 21,59% lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP.

Tabel 4.12  
Data dan Indikator Akses yang Merata SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data				Indikator		
		Lulusan SD	Siswa Baru	Kelas	Sekolah ekuivalen	APK	AM	TPS
1	DKI Jakarta	151,365	124,284	11,914	1,986	90.99	82.11	76
2	Jawa Barat	797,996	617,730	53,815	8,969	72.27	77.41	89
3	Banten	205,276	146,151	13,067	2,178	68.29	71.20	94
4	Jawa Tengah	505,520	407,839	40,440	6,740	71.54	80.68	75
5	DI Yogyakarta	48,814	43,360	4,576	763	83.22	88.83	64
6	Jawa Timur	516,948	424,556	43,810	7,302	68.37	82.13	71
7	Aceh	80,775	65,452	7,965	1,328	70.92	81.03	61
8	Sumatera Utara	294,287	226,355	21,243	3,541	80.01	76.92	83
9	Sumatera Barat	106,452	74,300	8,019	1,337	73.20	69.80	80
10	Riau	127,272	88,121	8,915	1,486	71.20	69.24	86
11	Kepulauan Riau	32,419	27,882	2,622	437	84.05	86.01	74
12	Jambi	65,631	42,269	4,702	784	66.53	64.40	84
13	Sumatera Selatan	152,123	121,032	11,183	1,864	79.48	79.56	82
14	Bangka Belitung	25,264	20,700	1,864	311	79.34	81.93	81
15	Bengkulu	36,050	29,517	3,364	561	84.81	81.88	64
16	Lampung	139,937	106,792	10,919	1,820	73.63	76.31	77
17	Kalimantan Barat	97,731	81,332	7,975	1,329	85.67	83.22	74
18	Kalimantan Tengah	47,479	36,794	4,302	717	78.16	77.50	66
19	Kalimantan Selatan	63,551	41,414	4,602	767	58.20	65.17	83
20	Kalimantan Timur	64,904	52,880	5,254	876	83.47	81.47	74
21	Kalimantan Utara	12,152	10,527	1,094	182	82.87	86.63	67
22	Sulawesi Utara	46,947	41,393	4,749	792	97.50	88.17	59
23	Gorontalo	22,824	17,470	2,042	340	76.26	76.54	67
24	Sulawesi Tengah	61,978	44,458	5,341	890	81.80	71.73	70
25	Sulawesi Selatan	169,998	132,770	14,639	2,440	80.70	78.10	70
26	Sulawesi Barat	29,297	21,469	2,306	384	76.87	73.28	76
27	Sulawesi Tenggara	56,819	43,224	5,259	877	80.93	76.07	65
28	Maluku	37,835	32,115	3,902	650	89.86	84.88	58
29	Maluku Utara	26,908	19,647	2,460	410	80.12	73.02	66
30	Bali	72,042	66,320	6,153	1,026	99.32	92.06	70
31	Nusa Tenggara Barat	88,224	61,641	6,849	1,142	65.34	69.87	77
32	Nusa Tenggara Timur	125,820	111,553	11,625	1,938	95.09	88.66	65
33	Papua	52,658	39,550	3,982	664	60.56	75.11	79
34	Papua Barat	18,701	15,087	1,704	284	86.72	80.67	66
	Indonesia	4,381,997	3,435,984	342,656	57,109	74.98	78.41	77

Jumlah kelas SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 53.815 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.094. Kondisi ini sejalan dengan jumlah sekolah ekuivalen SMP terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 8.969 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 182. Namun, indikator TPS SMP terkecil atau terbaik karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih besar terjadi di Provinsi Maluku sebesar 58 dan terbesar atau terburuk karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih kecil terjadi di Provinsi Banten sebesar 94. Dengan demikian, secara nasional kesempatan bersekolah di SMP sebesar 77 atau 94,73% dari standar 81 atau berarti telah melayani secara merata.

Tabel 4.13  
Akses yang Merata SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Merata				
		APK	AM	TPS	Rata-rata	Jenis
		80	100	81		
1	DKI Jakarta	100,00	82,11	100,00	94,04	UTAMA
2	Jawa Barat	90,34	77,41	91,04	86,26	MADYA
3	Banten	85,36	71,20	85,94	80,83	PRATAMA
4	Jawa Tengah	89,42	80,68	100,00	90,03	UTAMA
5	DI Yogyakarta	100,00	88,83	100,00	96,28	PARIPURNA
6	Jawa Timur	85,46	82,13	100,00	89,19	MADYA
7	Aceh	88,65	81,03	100,00	89,89	MADYA
8	Sumatera Utara	100,00	76,92	97,45	91,46	UTAMA
9	Sumatera Barat	91,49	69,80	100,00	87,10	MADYA
10	Riau	88,99	69,24	94,56	84,27	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	100,00	86,01	100,00	95,34	PARIPURNA
12	Jambi	83,17	64,40	96,72	81,43	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	99,35	79,56	99,24	92,72	UTAMA
14	Bangka Belitung	99,17	81,93	99,60	93,57	UTAMA
15	Bengkulu	100,00	81,88	100,00	93,96	UTAMA
16	Lampung	92,03	76,31	100,00	89,45	MADYA
17	Kalimantan Barat	100,00	83,22	100,00	94,41	UTAMA
18	Kalimantan Tengah	97,69	77,50	100,00	91,73	UTAMA
19	Kalimantan Selatan	72,75	65,17	97,76	78,56	KURANG
20	Kalimantan Timur	100,00	81,47	100,00	93,82	UTAMA
21	Kalimantan Utara	100,00	86,63	100,00	95,54	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	100,00	88,17	100,00	96,06	PARIPURNA
23	Gorontalo	95,32	76,54	100,00	90,62	UTAMA
24	Sulawesi Tengah	100,00	71,73	100,00	90,58	UTAMA
25	Sulawesi Selatan	100,00	78,10	100,00	92,70	UTAMA
26	Sulawesi Barat	96,09	73,28	100,00	89,79	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	100,00	76,07	100,00	92,02	UTAMA
28	Maluku	100,00	84,88	100,00	94,96	UTAMA
29	Maluku Utara	100,00	73,02	100,00	91,01	UTAMA
30	Bali	100,00	92,06	100,00	97,35	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	81,67	69,87	100,00	83,85	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	88,66	100,00	96,22	PARIPURNA
33	Papua	75,70	75,11	100,00	83,60	PRATAMA
34	Papua Barat	100,00	80,67	100,00	93,56	UTAMA
	Indonesia	94,49	78,41	98,89	90,60	UTAMA
	Jenis	UTAMA	KURANG	PARIPURNA	UTAMA	

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SMP yang merata dan terdapat pada Tabel 4.13. Indikator APK SMP di 17 provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 dan terkecil sebesar 72,75 terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga nasional menjadi 94,49 termasuk kategori utama. Indikator AM SMP terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 92,06 dan terkecil sebesar 64,40 terjadi di Provinsi Jambi, sehingga nasional menjadi 78,41 termasuk kategori kurang. Indikator TPS SMP di 26 provinsi telah ideal menjadi 100 dan terkecil terjadi di Provinsi Banten sebesar 85,94, sehingga nasional menjadi 90,60 termasuk kategori utama.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SMP yang merata menjadi 90,60 termasuk kategori utama. Hal ini berarti akses pendidikan SMP yang merata sebesar 90% dari 100% atau sembilan per sepuluh. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 1 provinsi termasuk kategori kurang, 5 provinsi termasuk kategori pratama, 6 provinsi

termasuk madya, 16 provinsi termasuk utama, dan 6 provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 97,35 termasuk paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 78,56 termasuk kategori kurang.

c. SM

Berdasarkan penjumlahan data SMA dan SMK maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang merata tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.14. APK SM terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 88,44% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 41,08% dengan rata-rata nasional sebesar 65,11%, yang berarti ketercapaian APK SM masih belum optimal karena hanya sebesar 93%, yang berarti kurang dari 70% sebagai standar.

Jumlah lulusan SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 574.000 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8.773, sedangkan siswa baru SM terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 561.176 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 7.617. Namun, dilihat dari indikator AM SM terkecil terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 84,59% dan terbesar terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 107,26% karena adanya lulusan dari luar Provinsi DI Yogyakarta bersekolah di DI Yogyakarta dengan angka nasional sebesar 96,96%. Dengan demikian, masukan ke SM telah tercapai 96,96% dari standar sebesar 100%, berarti masih terdapat lulusan SMP sebesar 3,04% yang tidak melanjutkan ke SM.

Jumlah kelas SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 47.373 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 813. Hal ini sejalan dengan jumlah sekolah ekuivalen SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 7.896 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 136. Namun, indikator TPS SM terkecil atau terbaik karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih besar terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 50 dan terbesar atau terburuk karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih kecil terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 74. Dengan demikian, kesempatan bersekolah di SM sebesar 65, berarti telah melayani secara merata atau sebesar 105,62% karena lebih besar dari standar sebesar 62.

**Tabel 4.14**  
**Data dan Indikator Akses yang Merata SM Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Provinsi	Data		Kelas	Sekolah ekuivalen	Indikator		
		Lulusan SMP	Siswa Baru			APK	AM	TPS
1	DKI Jakarta	125,214	128,512	12,220	2,037	84.46	102.63	61
2	Jawa Barat	574,000	561,176	47,373	7,896	59.48	97.77	73
3	Banten	146,769	146,307	12,446	2,074	60.94	99.69	71
4	Jawa Tengah	408,985	397,201	35,749	5,958	63.06	97.12	69
5	DI Yogyakarta	44,387	47,611	5,165	861	82.92	107.26	52
6	Jawa Timur	419,451	419,260	39,004	6,501	61.80	99.95	65
7	Aceh	67,772	66,198	7,318	1,220	65.55	97.68	56
8	Sumatera Utara	222,093	222,070	20,036	3,339	76.92	99.99	67
9	Sumatera Barat	78,398	78,071	7,807	1,301	74.45	99.58	60
10	Riau	80,406	79,960	7,929	1,322	63.96	99.45	61
11	Kepulauan Riau	23,520	22,275	2,295	383	81.51	94.71	61
12	Jambi	40,581	39,821	4,081	680	60.53	98.13	60
13	Sumatera Selatan	107,632	103,867	9,310	1,552	66.48	96.50	69
14	Bangka Belitung	17,172	16,177	1,521	254	60.83	94.21	68
15	Bengkulu	28,086	25,680	2,660	443	68.33	91.43	63
16	Lampung	106,319	95,989	8,953	1,492	60.19	90.28	71
17	Kalimantan Barat	65,708	60,069	5,356	893	60.11	91.42	74
18	Kalimantan Tengah	31,112	28,850	3,160	527	57.71	92.73	59
19	Kalimantan Selatan	40,322	40,142	3,779	630	53.08	99.55	64
20	Kalimantan Timur	47,661	47,573	4,827	805	74.87	99.82	59
21	Kalimantan Utara	8,773	7,617	813	136	68.53	86.82	65
22	Sulawesi Utara	37,030	34,763	4,302	717	80.58	93.88	52
23	Gorontalo	16,540	16,446	1,647	275	66.29	99.43	60
24	Sulawesi Tengah	40,422	37,205	3,960	660	64.34	92.04	61
25	Sulawesi Selatan	130,003	121,770	12,350	2,058	69.68	93.67	63
26	Sulawesi Barat	18,882	16,642	1,812	302	62.83	88.14	63
27	Sulawesi Tenggara	40,308	39,933	4,542	757	77.33	99.07	53
28	Maluku	30,778	27,775	3,399	567	79.36	90.24	54
29	Maluku Utara	18,022	15,542	2,166	361	70.87	86.24	50
30	Bali	64,579	58,439	5,313	886	88.44	90.49	73
31	Nusa Tenggara Barat	58,226	57,018	5,671	945	60.18	97.93	62
32	Nusa Tenggara Timur	92,012	77,830	8,458	1,410	69.51	84.59	65
33	Papua	30,881	26,503	3,168	528	41.08	85.82	58
33	Papua Barat	12,769	11,115	1,453	242	68.31	87.05	53
	Indonesia	3,274,813	3,175,407	300,043	50,007	65.11	96.96	65

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SM yang merata yang terdapat pada Tabel 4.15. Indikator APK SM di 11 provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 atau sesuai dengan standar dan terkecil sebesar 58,68 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 92,55 termasuk kategori utama. Indikator AM SM terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sebesar 100 telah ideal dan terkecil sebesar 84,59 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga nasional menjadi 96,96 termasuk kategori paripurna. Indikator TPS SM di 18 provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 atau lebih rendah daripada standar dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 84,23, sehingga nasional menjadi 96,25 termasuk kategori paripurna.

Tabel 4.15  
Akses yang Merata SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Merata				Rata-rata	Jenis
		APK	AM	TPS			
		70	100	62			
1	DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
2	Jawa Barat	84,97	97,77	85,28	89,34	MADYA	
3	Banten	87,06	99,69	87,63	91,46	UTAMA	
4	Jawa Tengah	90,08	97,12	90,32	92,51	UTAMA	
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
6	Jawa Timur	88,28	99,95	96,09	94,78	UTAMA	
7	Aceh	93,65	97,68	100,00	97,11	PARIPURNA	
8	Sumatera Utara	100,00	99,99	93,22	97,74	PARIPURNA	
9	Sumatera Barat	100,00	99,58	100,00	99,86	PARIPURNA	
10	Riau	91,38	99,45	100,00	96,94	PARIPURNA	
11	Kepulauan Riau	100,00	94,71	100,00	98,24	PARIPURNA	
12	Jambi	86,47	98,13	100,00	94,87	UTAMA	
13	Sumatera Selatan	94,97	96,50	89,38	93,62	UTAMA	
14	Bangka Belitung	86,90	94,21	91,53	90,88	UTAMA	
15	Bengkulu	97,61	91,43	97,87	95,64	PARIPURNA	
16	Lampung	85,99	90,28	87,02	87,76	MADYA	
17	Kalimantan Barat	85,87	91,42	84,23	87,17	MADYA	
18	Kalimantan Tengah	82,44	92,73	100,00	91,72	UTAMA	
19	Kalimantan Selatan	75,83	99,55	96,84	90,74	UTAMA	
20	Kalimantan Timur	100,00	99,82	100,00	99,94	PARIPURNA	
21	Kalimantan Utara	97,89	86,82	95,76	93,49	UTAMA	
22	Sulawesi Utara	100,00	93,88	100,00	97,96	PARIPURNA	
23	Gorontalo	94,70	99,43	100,00	98,04	PARIPURNA	
24	Sulawesi Tengah	91,91	92,04	100,00	94,65	UTAMA	
25	Sulawesi Selatan	99,54	93,67	98,16	97,12	PARIPURNA	
26	Sulawesi Barat	89,75	88,14	99,16	92,35	UTAMA	
27	Sulawesi Tenggara	100,00	99,07	100,00	99,69	PARIPURNA	
28	Maluku	100,00	90,24	100,00	96,75	PARIPURNA	
29	Maluku Utara	100,00	86,24	100,00	95,41	PARIPURNA	
30	Bali	100,00	90,49	85,01	91,84	UTAMA	
31	Nusa Tenggara Barat	85,97	97,93	100,00	94,63	UTAMA	
32	Nusa Tenggara Timur	99,31	84,59	94,99	92,96	UTAMA	
33	Papua	58,68	85,82	100,00	81,50	PRATAMA	
34	Papua Barat	97,58	87,05	100,00	94,88	UTAMA	
	Indonesia	92,55	96,96	96,25	95,26	PARIPURNA	
	Jenis	UTAMA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA		

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SM yang merata menjadi 95,26 termasuk kategori paripurna. Hal ini berarti akses pendidikan SM yang merata sebesar 95% dari 100% atau telah mendekati ideal. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 1 provinsi termasuk kategori pratama, 3 provinsi termasuk kategori madya, 15 provinsi termasuk utama, dan 15 provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta sebesar 100 termasuk paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 81,50 termasuk kategori pratama.

d. Semua Jenjang

Berdasarkan lima indikator akses pendidikan yang merata maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SM, dan rata-rata 3 jenjang seperti disajikan pada Tabel 4.16. Bila dilihat secara nasional maka SM memiliki nilai akses pendidikan yang merata terbesar sebesar 95,26 termasuk kategori paripurna dan terkecil pada SMP sebesar 90,60 termasuk kategori utama, sedangkan SD sebesar 94,63 termasuk kategori utama. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang merata sebesar 93,49 termasuk kategori utama.

Tabel 4.16  
Akses yang Merata Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

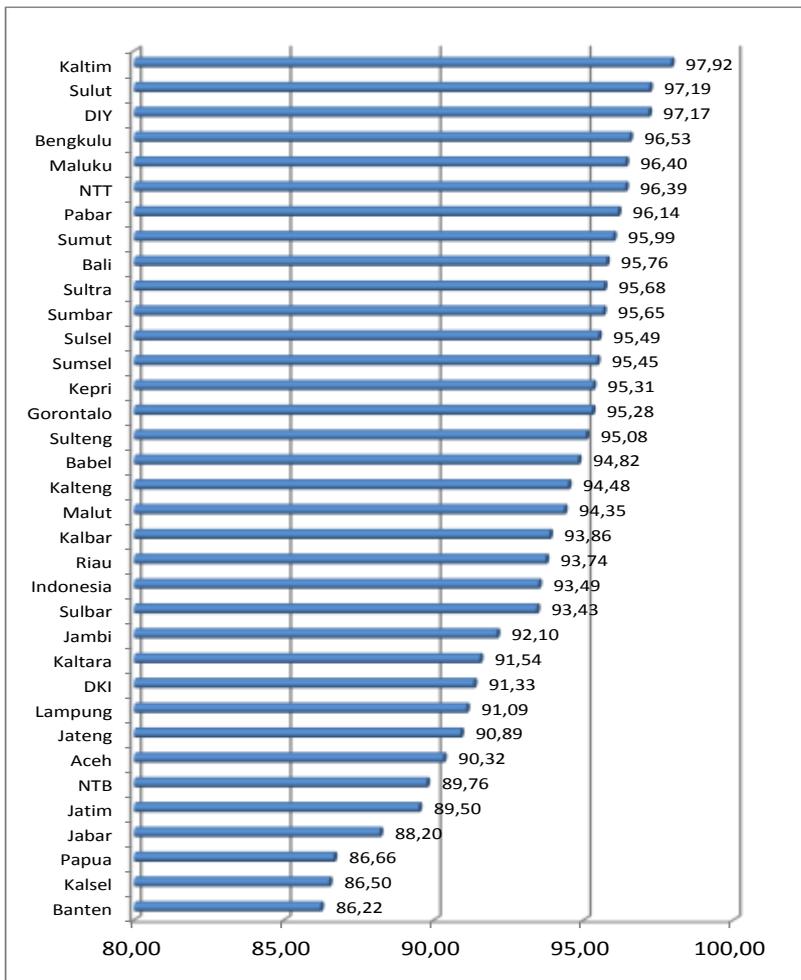
No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	79,97	94,04	100,00	91,33	UTAMA
2	Jawa Barat	88,98	86,26	89,34	88,20	MADYA
3	Banten	86,37	80,83	91,46	86,22	MADYA
4	Jawa Tengah	90,14	90,03	92,51	90,89	UTAMA
5	DI Yogyakarta	95,23	96,28	100,00	97,17	PARIPURNA
6	Jawa Timur	84,53	89,19	94,78	89,50	MADYA
7	Aceh	83,96	89,89	97,11	90,32	UTAMA
8	Sumatera Utara	98,78	91,46	97,74	95,99	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	100,00	87,10	99,86	95,65	PARIPURNA
10	Riau	100,00	84,27	96,94	93,74	UTAMA
11	Kepulauan Riau	92,35	95,34	98,24	95,31	PARIPURNA
12	Jambi	100,00	81,43	94,87	92,10	UTAMA
13	Sumatera Selatan	100,00	92,72	93,62	95,45	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	100,00	93,57	90,88	94,82	UTAMA
15	Bengkulu	100,00	93,96	95,64	96,53	PARIPURNA
16	Lampung	96,04	89,45	87,76	91,09	UTAMA
17	Kalimantan Barat	100,00	94,41	87,17	93,86	UTAMA
18	Kalimantan Tengah	100,00	91,73	91,72	94,48	UTAMA
19	Kalimantan Selatan	90,21	78,56	90,74	86,50	MADYA
20	Kalimantan Timur	100,00	93,82	99,94	97,92	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	85,57	95,54	93,49	91,54	UTAMA
22	Sulawesi Utara	97,57	96,06	97,96	97,19	PARIPURNA
23	Gorontalo	97,19	90,62	98,04	95,28	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	100,00	90,58	94,65	95,08	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	96,66	92,70	97,12	95,49	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	98,16	89,79	92,35	93,43	UTAMA
27	Sulawesi Tenggara	95,32	92,02	99,69	95,68	PARIPURNA
28	Maluku	97,49	94,96	96,75	96,40	PARIPURNA
29	Maluku Utara	96,64	91,01	95,41	94,35	UTAMA
30	Bali	98,08	97,35	91,84	95,76	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	90,80	83,85	94,63	89,76	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	96,22	92,96	96,39	PARIPURNA
33	Papua	94,89	83,60	81,50	86,66	MADYA
34	Papua Barat	100,00	93,56	94,88	96,14	PARIPURNA
	Indonesia	94,63	90,60	95,26	93,49	UTAMA
	Jenis	UTAMA	UTAMA	PARIPURNA	UTAMA	

Bila dilihat akses pendidikan yang merata untuk tiap provinsi yang terbesar maka untuk SD terjadi di 12 provinsi masing-masing 100 sudah ideal atau termasuk paripurna, untuk SMP pada Provinsi Bali sebesar 97,35 termasuk paripurna, dan untuk SM pada Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sebesar 100 termasuk paripurna dan sudah ideal. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang merata

terbesar terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 97,92 termasuk kategori paripurna.

Sebaliknya, akses pendidikan yang merata terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,97 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 78,56 termasuk kurang, untuk SM pada Provinsi Papua sebesar 81,50 termasuk pratama. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang merata terkecil terjadi pada Provinsi Banten sebesar 86,22 termasuk kategori pratama.

Grafik 4.2  
Akses yang Merata Semua Jenjang Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016



Bila dilihat tiap provinsi ternyata 6 provinsi termasuk kategori madya, 12 provinsi termasuk utama, dan 16 provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 97,92 termasuk paripurna,

sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Banten sebesar 86,22 termasuk kategori madya.

Keberhasilan pendidikan dilihat dari akses pendidikan yang merata tiap provinsi dapat terlihat jelas pada Grafik 4.2, terlihat bahwa lima provinsi terbawah adalah Banten, Kalimantan Selatan, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sebaliknya, lima provinsi teratas adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Bengkulu, dan Maluku.

### 3. Akses yang Berkeadilan

Terdapat tiga jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui akses pendidikan yang berkeadilan. Ketiga indikator tersebut, yaitu PG APK, IPG APK, dan %S-Swt dilakukan konversi menggunakan standar tertentu yang terdapat pada Tabel 3.3, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator. Ketiga nilai tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi 3 sehingga diperoleh akses yang berkeadilan. Nilai maksimal 100, sehingga nilai makin mendekati 100 disebut makin berkeadilan.

Tabel 4.17  
Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Berkeadilan  
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015/2016

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
<b>A. Data</b>						
1	Penduduk usia sek	27.381.500	13.390.600	13.281.300		
	a. Laki-laki	13.991.084	6.873.340	6.801.575		
	b. Perempuan	13.390.416	6.517.260	6.479.725		
2	Siswa	25.885.053	10.040.277	8.647.394		
	a. Laki-laki	13.516.994	5.110.640	4.401.039		
	b. Perempuan	12.368.059	4.929.637	4.246.355		
3	Siswa Swasta	3.089.118	2.529.299	3.647.351		
4	APK	94,53	74,98	65,11		
	a. Laki-laki	96,61	74,35	64,71		
	b. Perempuan	92,37	75,64	65,53		
<b>B. Indikator</b>						
1	PG APK	4,25	-1,29	-0,83		
2	IPG APK	0,96	1,02	1,01		
3	%S-Swt	11,93	25,19	42,18		
<b>C. Nilai Indikator</b>						
1	PG APK	89,72	96,61	93,13	93,15	UTAMA
2	IPG APK	90,92	95,74	90,95	92,54	UTAMA
3	%S-Swt	75,73	68,65	56,01	66,80	KURANG
	Akses yang berkeadilan	85,46	87,00	80,03	84,16	PRATAMA
	Jenis Akses yg berkeadilan	MADYA	MADYA	PRATAMA	PRATAMA	

Tabel 4.17 menunjukkan data, indikator, dan nilai akses yang berkeadilan menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat penduduk usia sekolah SD sebesar 27.381.500, usia SMP sebesar 13.390.600, dan usia SM sebesar 13.281.300. Siswa SD sebesar 25.885.053, SMP sebesar 10.040.277, dan SM sebesar

8.647.394 Siswa Swasta SD sebesar 3.089.118, SMP sebesar 2.529.299, sedangkan SM sebesar 3.647.351.

APK laki-laki SD sebesar 96,61% lebih besar daripada perempuan sebesar 92,37%. APK laki-laki SMP sebesar 74,35% lebih kecil daripada perempuan sebesar 75,64%, sedangkan APK laki-laki SM sebesar 64,71% lebih kecil daripada perempuan sebesar 65,53%. Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan, PG APK SD sebesar 4,25% lebih besar laki-laki, PG APK SMP -1,29% lebih besar perempuan, dan PG APK SM sebesar -0,83% lebih besar perempuan. Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan, IPG APK SD sebesar 0,96 belum setara tetapi lebih besar laki-laki, IPG APK SMP sebesar 1,02 mendekati setara tetapi lebih besar perempuan, dan IPG APK SM sebesar 1,01 mendekati setara tetapi lebih besar perempuan.

Berdasarkan siswa swasta maka %S-Swt terbesar pada SM sebesar 42,18% dan terkecil pada SD sebesar 11,93%. Hal ini wajar karena SD Negeri sudah dibangun sejak tahun 1973/1974 ketika adanya Instruksi Presiden SD sehingga SD Swasta sangat kecil.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka tiga indikator akses yang meluas mengalami konversi, yaitu PG APK, IPG APK, dan %S-Swt. PG APK SD menjadi sebesar 89,72, SMP menjadi 96,61, dan SM menjadi 93,13, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 93,15 termasuk kategori utama. IPG APK SD menjadi sebesar 90,92, IPG APK SMP sebesar 95,74, dan SM sebesar 90,95, sehingga rata-rata semua jenjang sebesar 92,54 termasuk kategori utama. %S-Swt SD menjadi 75,73, %S-Swt SMP mencapai 68,65, dan %S-Swt SM mencapai 56,01, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 66,80 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, akses yang berkeadilan SD sebesar 85,46 termasuk kategori madya, SMP sebesar 87,00 termasuk kategori madya, SMA sebesar 80,03 termasuk pratama sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 84,16 termasuk kategori pratama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jenjang SMP yang paling berkeadilan, diikuti SD, sedangkan SM termasuk pratama.

#### a. SD

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang berkeadilan tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.18. APK laki-laki terbesar terjadi Provinsi Papua sebesar 127,57% dan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 81,42% dengan rata-rata nasional sebesar 96,61%. APK perempuan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 105,70% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 60,26% dengan rata-rata nasional sebesar 92,37%.

Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan SD maka PG APK SD terbesar pada Provinsi Papua sebesar 67,31% berarti lebih banyak laki-laki dan terkecil pada Provinsi Banten sebesar -0,88% berarti sedikit lebih banyak perempuan, dengan rata-rata nasional sebesar 4,25% berarti lebih banyak laki-laki. Demikian juga dengan IPG APK SD terbesar pada Provinsi Papua sebesar 0,47 berarti sangat tidak setara dan terkecil pada Provinsi Banten sebesar 1,01 mendekati setara dengan rata-rata nasional sebesar 0,96 berarti belum setara.

Berdasarkan siswa swasta SD maka diperoleh %S-Swt SD terbesar pada Provinsi Papua Barat sebesar 38,42% berarti sekolah swasta sangat besar dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,34% berarti sekolah swasta sangat kecil dengan rata-rata nasional sebesar 11,93%.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SD yang berkeadilan yang terdapat pada Tabel 4.19. Indikator PG APK SD terbesar terjadi di Provinsi Banten sebesar 99,12 dan terkecil sebesar 32,69 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 89,72 termasuk kategori madya. Indikator IPG APK SD terbesar terjadi di Provinsi Banten sebesar 99,07 dan terkecil sebesar 47,24 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 90,92 termasuk kategori utama. Indikator %S-Swt SD di 15 provinsi telah ideal atau melebihi standar 10% dan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 13,44, sehingga nasional menjadi 75,73 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.18  
Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SD Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator						
		Penduduk 7-12 tahun			Siswa			Siswa Swasta	APK			PG APK	IPG APK	%S-Swt
		Laki2	Peremp	Jumlah	Laki2	Peremp	Jumlah		Laki2	Peremp	Rata2			
1	DKI Jakarta	480,700	416,400	897,100	427,140	395,280	822,420	224,882	88.86	94.93	91.68	-6.07	1.07	27.34
2	Jawa Barat	2,546,200	2,264,700	4,810,900	2,361,282	2,198,936	4,560,218	402,871	92.74	97.10	94.79	-4.36	1.05	8.83
3	Banten	666,200	609,500	1,275,700	627,368	579,351	1,206,719	152,725	94.17	95.05	94.59	-0.88	1.01	12.66
4	Jawa Tengah	1,713,700	1,653,500	3,367,200	1,520,483	1,387,636	2,908,119	231,284	88.73	83.92	86.37	4.80	0.95	7.95
5	DI Yogyakarta	162,100	155,500	317,600	152,306	139,341	291,647	74,588	93.96	89.61	91.83	4.35	0.95	25.57
6	Jawa Timur	1,865,400	1,782,000	3,647,400	1,518,767	1,391,284	2,910,051	310,615	81.42	78.07	79.78	3.34	0.96	10.67
7	Aceh	306,500	293,000	599,500	253,701	228,792	482,493	18,874	82.77	78.09	80.48	4.69	0.94	3.91
8	Sumatera Utara	886,700	842,600	1,729,300	927,998	852,005	1,780,003	311,913	104.66	101.12	102.93	3.54	0.97	17.52
9	Sumatera Barat	313,200	299,800	613,000	344,045	310,642	654,687	37,505	109.85	103.62	106.80	6.23	0.94	5.73
10	Riau	387,000	368,900	755,900	420,529	382,960	803,489	108,236	108.66	103.81	106.30	4.85	0.96	13.47
11	Kepulauan Riau	121,900	118,100	240,000	115,490	106,420	221,910	59,301	94.74	90.11	92.46	4.63	0.95	26.72
12	Jambi	194,900	189,600	384,500	206,863	188,943	395,806	23,251	106.14	99.65	102.94	6.48	0.94	5.87
13	Sumatera Selatan	466,300	442,000	908,300	492,666	451,506	944,172	66,282	105.65	102.15	103.95	3.50	0.97	7.02
14	Bangka Belitung	76,500	72,800	149,300	83,664	75,798	159,462	11,183	109.36	104.12	106.81	5.25	0.95	7.01
15	Bengkulu	108,600	102,400	211,000	116,072	104,699	220,771	11,893	106.88	102.25	104.63	4.64	0.96	5.39
16	Lampung	456,600	432,200	888,800	440,737	404,925	845,662	57,316	96.53	93.69	95.15	2.84	0.97	6.78
17	Kalimantan Barat	280,800	283,500	564,300	320,708	289,460	610,168	48,741	114.21	102.10	108.13	12.11	0.89	7.99
18	Kalimantan Tengah	142,700	140,200	282,900	154,520	139,537	294,057	34,269	108.28	99.53	103.94	8.76	0.92	11.65
19	Kalimantan Selatan	226,300	214,300	440,600	202,327	183,023	385,350	24,879	89.41	85.41	87.46	4.00	0.96	6.46
20	Kalimantan Timur	196,500	186,600	383,100	216,862	197,063	413,925	49,469	110.36	105.61	108.05	4.76	0.96	11.95
21	Kalimantan Utara	34,600	42,500	77,100	41,096	36,968	78,064	5,131	118.77	86.98	101.25	31.79	0.73	6.57
22	Sulawesi Utara	127,600	121,100	248,700	135,911	122,913	258,824	96,202	106.51	101.50	104.07	5.02	0.95	37.17
23	Gorontalo	64,800	61,600	126,400	69,802	64,542	134,344	2,363	107.72	104.78	106.28	2.94	0.97	1.76
24	Sulawesi Tengah	163,000	165,000	328,000	190,467	174,402	364,869	23,901	116.85	105.70	111.24	11.15	0.90	6.55
25	Sulawesi Selatan	493,700	470,800	964,500	507,004	463,419	970,423	44,958	102.69	98.43	100.61	4.26	0.96	4.63
26	Sulawesi Barat	80,200	81,100	161,300	89,041	79,945	168,986	2,271	111.02	98.58	104.77	12.45	0.89	1.34
27	Sulawesi Tenggara	143,911	172,989	316,900	175,601	161,417	337,018	5,013	122.02	93.31	106.35	28.71	0.76	1.49
28	Maluku	111,100	124,500	235,600	121,644	109,261	230,905	67,728	109.49	87.76	98.01	21.73	0.80	29.33
29	Maluku Utara	78,700	75,200	153,900	84,918	76,957	161,875	24,625	107.90	102.34	105.18	5.56	0.95	15.21
30	Bali	217,600	191,800	409,400	211,058	194,450	405,508	36,867	96.99	101.38	99.05	-4.39	1.05	9.09
31	Nusa Tenggara Barat	289,900	276,600	566,500	268,748	245,303	514,051	15,919	92.70	88.69	90.74	4.02	0.96	3.10
32	Nusa Tenggara Timur	360,200	367,400	727,600	429,741	386,277	816,018	308,319	119.31	105.12	112.15	14.17	0.88	37.78
33	Papua	172,173	302,727	474,900	219,641	182,422	402,063	145,428	127.57	60.26	84.66	67.31	0.47	36.17
34	Papua Barat	54,800	69,500	124,300	68,794	62,182	130,976	50,316	125.54	89.47	105.37	36.07	0.71	38.42
	Indonesia	13,991,084	13,390,416	27,381,500	13,516,994	12,368,059	25,885,053	3,089,118	96.61	92.37	94.53	4.25	0.96	11.93

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SD yang berkeadilan menjadi 85,46 termasuk kategori madya. Hal ini berarti akses pendidikan SD yang berkeadilan sebesar 85% dari 100% atau sekitar empat per lima. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 9 provinsi termasuk kategori kurang, 4 provinsi termasuk kategori pratama, 7 provinsi termasuk madya, 4 provinsi termasuk utama, dan 10 provinsi termasuk paripurna. Nilai terbesar terjadi di Banten sebesar 99,40 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 54,21 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.19  
Akses yang Berkeadilan SD Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Berkeadilan				
		PG APK	IPG APK	%S-Swt	Rata-rata	Jenis
		0	1	10		
1	DKI Jakarta	93.93	93.61	100.00	95.85	PARIPURNA
2	Jawa Barat	95.64	95.51	88.34	93.17	UTAMA
3	Banten	99.12	99.07	100.00	99.40	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	95.20	94.59	79.53	89.77	MADYA
5	DI Yogyakarta	95.65	95.37	100.00	97.01	PARIPURNA
6	Jawa Timur	96.66	95.89	100.00	97.52	PARIPURNA
7	Aceh	95.31	94.34	39.12	76.26	KURANG
8	Sumatera Utara	96.46	96.62	100.00	97.69	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	93.77	94.33	57.29	81.79	PRATAMA
10	Riau	95.15	95.53	100.00	96.89	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	95.37	95.11	100.00	96.83	PARIPURNA
12	Jambi	93.52	93.89	58.74	82.05	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	96.50	96.68	70.20	87.79	MADYA
14	Bangka Belitung	94.75	95.20	70.13	86.70	MADYA
15	Bengkulu	95.36	95.66	53.87	81.63	PRATAMA
16	Lampung	97.16	97.06	67.78	87.33	MADYA
17	Kalimantan Barat	87.89	89.40	79.88	85.72	MADYA
18	Kalimantan Tengah	91.24	91.91	100.00	94.39	UTAMA
19	Kalimantan Selatan	96.00	95.52	64.56	85.36	MADYA
20	Kalimantan Timur	95.24	95.69	100.00	96.98	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	68.21	73.23	65.73	69.06	KURANG
22	Sulawesi Utara	94.98	95.29	100.00	96.76	PARIPURNA
23	Gorontalo	97.06	97.27	17.59	70.64	KURANG
24	Sulawesi Tengah	88.85	90.46	65.51	81.60	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	95.74	95.85	46.33	79.31	KURANG
26	Sulawesi Barat	87.55	88.79	13.44	63.26	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	71.29	76.47	14.87	54.21	KURANG
28	Maluku	78.27	80.15	100.00	86.14	MADYA
29	Maluku Utara	94.44	94.84	100.00	96.43	PARIPURNA
30	Bali	95.61	95.67	90.92	94.07	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	95.98	95.67	30.97	74.20	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	85.83	88.12	100.00	91.32	UTAMA
33	Papua	32.69	47.24	100.00	59.98	KURANG
34	Papua Barat	63.93	71.27	100.00	78.40	KURANG
	Indonesia	89.72	90.92	75.73	85.46	MADYA
	Jenis	MADYA	UTAMA	KURANG	MADYA	

#### b. SMP

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang berkeadilan tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.20. APK laki-laki terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 101,65% dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan

Selatan sebesar 58,57% dengan rata-rata nasional sebesar 74,35%. APK perempuan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 98,20% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 54,38% dengan rata-rata nasional sebesar 75,64%.

Tabel 4.20  
Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data						Indikator						
		Penduduk 13-15 tahun			Siswa			APK			PG APK	IPG APK	%Swt	
		Laki2	Peremp	Jumlah	Laki2	Peremp	Jumlah	Siswa Swasta	Laki2	Peremp				Rata2
1	DKI Jakarta	202,445	204,355	406,800	186,235	183,925	370,160	154,690	91.99	90.00	90.99	1.99	0.98	41.79
2	Jawa Barat	1,275,761	1,202,139	2,477,900	909,928	880,834	1,790,762	601,584	71.32	73.27	72.27	-1.95	1.03	33.59
3	Banten	320,101	304,699	624,800	220,452	206,206	426,658	164,639	68.87	67.68	68.29	1.19	0.98	38.59
4	Jawa Tengah	880,311	820,289	1,700,600	617,418	599,178	1,216,596	269,654	70.14	73.04	71.54	-2.91	1.04	22.16
5	DI Yogyakarta	78,934	77,266	156,200	66,487	63,504	129,991	39,693	84.23	82.19	83.22	2.04	0.98	30.54
6	Jawa Timur	949,266	898,034	1,847,300	656,719	606,200	1,262,919	392,615	69.18	67.50	68.37	1.68	0.98	31.09
7	Aceh	140,880	137,820	278,700	102,930	94,719	197,649	23,405	73.06	68.73	70.92	4.34	0.94	11.84
8	Sumatera Utara	418,485	399,115	817,600	333,839	320,299	654,138	207,798	79.77	80.25	80.01	-0.48	1.01	31.77
9	Sumatera Barat	148,555	144,545	293,100	107,816	106,719	214,535	20,121	72.58	73.83	73.20	-1.25	1.02	9.38
10	Riau	180,315	172,685	353,000	127,292	124,027	251,319	45,700	70.59	71.82	71.20	-1.23	1.02	18.18
11	Kepulauan Riau	47,255	46,745	94,000	40,232	38,773	79,005	15,014	85.14	82.95	84.05	2.19	0.97	19.00
12	Jambi	98,533	86,767	185,300	62,514	60,774	123,288	12,410	63.44	75.14	73.63	-6.60	1.10	10.07
13	Sumatera Selatan	222,334	214,666	437,000	174,642	172,693	347,335	66,589	78.55	80.45	79.48	-1.90	1.02	19.17
14	Bangka Belitung	37,972	34,128	72,100	28,603	28,601	57,204	8,231	75.33	83.81	79.34	-8.48	1.11	14.39
15	Bengkulu	52,724	49,676	102,400	44,267	42,581	86,848	3,947	83.96	85.72	84.81	-1.76	1.02	4.54
16	Lampung	220,448	209,152	429,600	159,132	157,167	316,299	83,187	72.19	75.14	73.63	-2.96	1.04	26.30
17	Kalimantan Barat	138,819	127,381	266,200	112,315	115,731	228,046	40,837	80.91	90.85	85.67	-9.95	1.12	17.91
18	Kalimantan Tengah	67,815	66,685	134,500	52,807	52,312	105,119	14,332	77.87	78.45	78.16	-0.58	1.01	13.63
19	Kalimantan Selatan	105,419	101,181	206,600	61,746	58,495	120,241	10,616	58.57	57.81	58.20	0.76	0.99	8.83
20	Kalimantan Timur	92,626	89,974	182,600	77,896	74,521	152,417	28,474	84.10	82.83	83.47	1.27	0.98	18.68
21	Kalimantan Utara	18,632	17,368	36,000	15,103	14,731	29,834	2,146	81.06	84.82	82.87	-3.76	1.05	7.19
22	Sulawesi Utara	62,487	60,113	122,600	60,501	59,030	119,531	32,057	96.82	98.20	97.50	-1.38	1.01	26.82
23	Gorontalo	32,777	31,723	64,500	23,895	25,291	49,186	1,530	72.90	79.72	76.26	-6.82	1.09	3.11
24	Sulawesi Tengah	79,708	76,792	156,500	63,310	64,710	128,020	10,188	79.43	84.27	81.80	-4.84	1.06	7.96
25	Sulawesi Selatan	252,919	232,781	485,700	194,902	197,080	391,982	55,279	77.06	84.66	80.70	-7.60	1.10	14.10
26	Sulawesi Barat	40,141	39,559	79,700	29,821	31,445	61,266	4,447	74.29	79.49	76.87	-5.20	1.07	7.26
27	Sulawesi Tenggara	78,752	75,948	154,700	62,988	62,214	125,202	5,048	79.98	81.92	80.93	-1.93	1.02	4.03
28	Maluku	54,300	51,600	105,900	48,543	46,622	95,165	20,841	89.40	90.35	89.86	-0.95	1.01	21.90
29	Maluku Utara	37,354	36,146	73,500	29,676	29,214	58,890	13,390	79.45	80.82	80.12	-1.38	1.02	22.74
30	Bali	100,783	96,517	197,300	102,450	93,506	195,956	43,025	101.65	96.88	99.32	4.77	0.95	21.96
31	Nusa Tenggara Barat	146,175	129,625	275,800	93,486	86,716	180,202	20,995	63.95	66.90	65.34	-2.94	1.05	11.65
32	Nusa Tenggara Timur	169,161	163,739	332,900	156,661	159,890	316,551	75,438	92.61	97.65	95.09	-5.04	1.05	23.83
33	Papua	95,367	93,733	189,100	63,539	50,975	114,514	29,711	66.63	54.38	60.56	12.24	0.82	25.95
34	Papua Barat	25,786	24,314	50,100	22,495	20,954	43,449	11,668	87.24	86.18	86.72	1.06	0.99	26.85
	Indonesia	6,873,340	6,517,260	13,390,600	5,110,640	4,929,637	10,040,277	2,529,299	74.35	75.64	74.98	-1.29	1.02	25.19

Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan SMP maka PG APK SMP terbesar pada Provinsi Papua sebesar 12,24% berarti lebih banyak laki-laki dan terkecil pada Provinsi Sumatera Utara sebesar -0,48% berarti lebih banyak perempuan, dengan rata-rata nasional sebesar -1,29% berarti lebih banyak perempuan. Demikian juga dengan IPG APK SMP terbesar pada Provinsi Papua sebesar 0,82 berarti sangat tidak setara dan terkecil pada 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku sebesar 1,01 mendekati setara dan berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sedangkan Kalimantan Selatan dan Papua Barat sebesar atau 0,99 mendekati setara dan laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan

rata-rata nasional sebesar 1,02 berarti mendekati setara dan laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Berdasarkan siswa swasta SMP maka diperoleh %S-Swt SMP terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 41,79% karena sekolah swasta sangat besar dan terkecil pada Provinsi Gorontalo sebesar 3,11% karena sekolah swasta sangat kecil dengan rata-rata nasional sebesar 25,19% atau seperempat dari siswa SMP yang ada.

Tabel 4.21  
Akses yang Berkeadilan SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Berkeadilan				Rata-rata	Jenis
		PG APK 0	IPG APK 1	%S-Swt 25			
1	DKI Jakarta	98.01	97.84	100.00	98.62	PARIPURNA	
2	Jawa Barat	98.05	97.34	100.00	98.46	PARIPURNA	
3	Banten	98.81	98.27	100.00	99.02	PARIPURNA	
4	Jawa Tengah	97.09	96.02	88.66	93.92	UTAMA	
5	DI Yogyakarta	97.96	97.58	100.00	98.51	PARIPURNA	
6	Jawa Timur	98.32	97.57	100.00	98.63	PARIPURNA	
7	Aceh	95.66	94.07	47.37	79.03	KURANG	
8	Sumatera Utara	99.52	99.40	100.00	99.64	PARIPURNA	
9	Sumatera Barat	98.75	98.30	37.52	78.19	KURANG	
10	Riau	98.77	98.29	72.74	89.93	MADYA	
11	Kepulauan Riau	97.81	97.42	76.02	90.42	UTAMA	
12	Jambi	93.40	90.58	40.26	74.75	KURANG	
13	Sumatera Selatan	98.10	97.64	76.69	90.81	UTAMA	
14	Bangka Belitung	91.52	89.88	57.56	79.65	KURANG	
15	Bengkulu	98.24	97.95	18.18	71.46	KURANG	
16	Lampung	97.04	96.06	100.00	97.70	PARIPURNA	
17	Kalimantan Barat	90.05	89.05	71.63	83.58	PRATAMA	
18	Kalimantan Tengah	99.42	99.26	54.54	84.41	PRATAMA	
19	Kalimantan Selatan	99.24	98.70	35.32	77.75	KURANG	
20	Kalimantan Timur	98.73	98.49	74.73	90.65	UTAMA	
21	Kalimantan Utara	96.24	95.57	28.77	73.53	KURANG	
22	Sulawesi Utara	98.62	98.60	100.00	99.07	PARIPURNA	
23	Gorontalo	93.18	91.44	12.44	65.69	KURANG	
24	Sulawesi Tengah	95.16	94.26	31.83	73.75	KURANG	
25	Sulawesi Selatan	92.40	91.02	56.41	79.94	KURANG	
26	Sulawesi Barat	94.80	93.46	29.03	72.43	KURANG	
27	Sulawesi Tenggara	98.07	97.64	16.13	70.61	KURANG	
28	Maluku	99.05	98.94	87.60	95.20	PARIPURNA	
29	Maluku Utara	98.62	98.30	90.95	95.96	PARIPURNA	
30	Bali	95.23	95.30	87.83	92.79	UTAMA	
31	Nusa Tenggara Barat	97.06	95.60	46.60	79.75	KURANG	
32	Nusa Tenggara Timur	94.96	94.84	95.32	95.04	PARIPURNA	
33	Papua	87.76	81.62	100.00	89.79	MADYA	
34	Papua Barat	98.94	98.79	100.00	99.24	PARIPURNA	
	Indonesia	96.61	95.74	68.65	87.00	MADYA	
	Jenis	ARIPURNA	ARIPURNA	KURANG	MADYA		

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SMP yang berkeadilan yang terdapat pada Tabel 4.21. Indikator PG APK SMP terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,52 dan terkecil sebesar 87,76 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 96,61 termasuk kategori paripurna. Indikator IPG APK SMP terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,40 dan terkecil sebesar 81,62 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 95,74 termasuk kategori paripurna. Indikator %S-Swt SMP di 10 provinsi telah

ideal atau melebihi standar 25% dan terkecil terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 12,44, sehingga nasional menjadi 68,65 termasuk kategori kurang.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SMP yang berkeadilan menjadi 87,00 termasuk kategori madya. Hal ini berarti akses pendidikan SMP yang berkeadilan sebesar 87% dari 100% atau tujuh per delapan. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 13 provinsi termasuk kategori kurang, 2 provinsi termasuk kategori pratama, 2 provinsi termasuk madya, 5 provinsi termasuk utama, dan 12 provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,64 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 65,69 termasuk kategori kurang.

### c. SM

Berdasarkan penjumlahan data SMA dan SMK maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang berkeadilan tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.22. APK laki-laki terbesar terjadi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 105,84% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 47,62% dengan rata-rata nasional sebesar 64,71%. APK perempuan terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 88,64% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 34,83% dengan rata-rata nasional sebesar 65,53%.

Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan SM maka PG APK SM terbesar pada Provinsi Kepulauan Riau sebesar 39,71% berarti lebih banyak laki-laki dan terkecil pada Provinsi Jawa Barat sebesar -0,15% berarti sedikit lebih banyak perempuan, dengan rata-rata nasional sebesar -0,83% berarti lebih banyak perempuan. Demikian juga dengan IPG APK SM terbesar pada Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,62 berarti sangat tidak setara karena perempuan sangat kecil dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,01, artinya mendekati setara dan laki-laki lebih banyak, sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 1,00 berarti sudah ideal dengan rata-rata nasional sebesar 1,01 berarti mendekati setara dan laki-laki lebih banyak.

Berdasarkan siswa swasta SM maka diperoleh %S-Swt SM terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 63,49% berarti sekolah siswa yang bersekolah di swasta sangat besar dan terkecil pada Provinsi Gorontalo sebesar 7,50% berarti sekolah swasta sangat kecil dengan rata-rata nasional sebesar 42,18% berarti lebih dari 40% siswa bersekolah di swasta.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SM yang berkeadilan yang terdapat pada Tabel 4.23. Nilai PG APK SM terbesar terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 98,88 dan terkecil sebesar 60,29 terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga nasional menjadi 93,13 termasuk kategori utama. Nilai IPG APK SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 99,74 dan terkecil sebesar 62,48 terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga nasional menjadi 90,95 termasuk kategori utama. Nilai %S-Swt SM terbesar terjadi di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah sebesar 100 atau sudah ideal dan terkecil terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 15,01, sehingga nasional menjadi 56,01 termasuk kategori kurang.

**Tabel 4.22**  
**Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SM Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Provinsi	Data						Indikator						
		Penduduk 16-18 tahun			Siswa			Siswa Swasta	APK			PG APK	IPG APK	%S-Swt
		Laki2	Peremp	Jumlah	Laki2	Peremp	Jumlah		Laki2	Peremp	Rata2			
1	DKI Jakarta	218,691	205,209	423,900	176,126	181,904	358,030	227,328	80,54	88,64	84,46	-8,11	1,10	63,49
2	Jawa Barat	1,293,988	1,195,812	2,489,800	768,725	712,223	1,480,948	846,390	59,41	59,56	59,48	-0,15	1,00	57,15
3	Banten	309,189	328,411	637,600	202,083	186,483	388,566	224,215	65,36	56,78	60,94	8,58	0,87	57,70
4	Jawa Tengah	895,909	813,191	1,709,100	550,933	526,777	1,077,710	577,942	61,49	64,78	63,06	-3,28	1,05	53,63
5	DI Yogyakarta	84,937	75,363	160,300	67,283	65,631	132,914	56,593	79,22	87,09	82,92	-7,87	1,10	42,58
6	Jawa Timur	995,622	868,278	1,863,900	610,123	541,734	1,151,857	575,307	61,28	62,39	61,80	-1,11	1,02	49,95
7	Aceh	144,271	131,229	275,500	89,041	91,559	180,600	17,592	61,72	69,77	65,55	-8,05	1,13	9,74
8	Sumatera Utara	423,100	371,700	794,800	303,132	308,213	611,345	286,452	71,65	82,92	76,92	-11,27	1,16	46,86
9	Sumatera Barat	152,246	133,154	285,400	100,919	111,573	212,492	31,171	66,29	83,79	74,45	-17,51	1,26	14,67
10	Riau	174,536	164,764	339,300	108,296	108,735	217,031	54,140	62,05	65,99	63,96	-3,95	1,06	24,95
11	Kepulauan Riau	28,435	44,965	73,400	30,095	29,735	59,830	16,083	105,84	66,13	81,51	39,71	0,62	26,88
12	Jambi	93,837	86,863	180,700	54,897	54,477	109,374	18,421	58,50	62,72	60,53	-4,21	1,07	16,84
13	Sumatera Selatan	209,104	215,896	425,000	141,373	141,151	282,524	90,189	67,61	65,38	66,48	2,23	0,97	31,92
14	Bangka Belitung	33,665	37,635	71,300	20,956	22,415	43,371	9,287	62,25	59,56	60,83	2,69	0,96	21,41
15	Bengkulu	50,428	51,372	101,800	34,759	34,797	69,556	7,339	68,93	67,74	68,33	1,19	0,98	10,55
16	Lampung	209,333	215,667	425,000	127,373	128,450	255,823	106,869	60,85	59,56	60,19	1,29	0,98	41,77
17	Kalimantan Barat	129,278	134,122	263,400	77,179	81,147	158,326	47,916	59,70	60,50	60,11	-0,80	1,01	30,26
18	Kalimantan Tengah	64,528	68,272	132,800	39,480	37,154	76,634	10,272	61,18	54,42	57,71	6,76	0,89	13,40
19	Kalimantan Selatan	100,518	100,982	201,500	55,346	51,609	106,955	20,278	55,06	51,11	53,08	3,95	0,93	18,96
20	Kalimantan Timur	83,288	91,912	175,200	67,188	63,986	131,174	37,385	80,67	69,62	74,87	11,05	0,86	28,50
21	Kalimantan Utara	14,025	18,075	32,100	10,646	11,351	21,997	3,311	75,91	62,80	68,53	13,11	0,83	15,05
22	Sulawesi Utara	60,748	60,352	121,100	48,558	49,027	97,585	30,919	79,93	81,24	80,58	-1,30	1,02	31,68
23	Gorontalo	32,533	32,667	65,200	20,599	22,621	43,220	3,243	63,32	69,25	66,29	-5,93	1,09	7,50
24	Sulawesi Tengah	77,893	79,607	157,500	49,093	52,241	101,334	16,401	63,03	65,62	64,34	-2,60	1,04	16,19
25	Sulawesi Selatan	243,074	246,726	489,800	166,957	174,326	341,283	74,021	68,69	70,66	69,68	-1,67	1,03	21,69
26	Sulawesi Barat	36,284	39,816	76,100	23,368	24,442	47,810	8,184	64,40	61,39	62,83	3,02	0,95	17,12
27	Sulawesi Tenggara	69,866	73,934	143,800	55,082	56,123	111,205	11,626	78,84	75,91	77,33	2,93	0,96	10,45
28	Maluku	46,161	54,239	100,400	40,301	39,372	79,673	17,247	87,31	72,59	79,36	14,72	0,83	21,65
29	Maluku Utara	32,721	33,279	66,000	23,375	23,401	46,776	11,703	71,44	70,32	70,87	1,12	0,98	25,02
30	Bali	94,108	92,292	186,400	87,573	77,272	164,845	66,833	93,06	83,73	88,44	9,33	0,90	40,54
31	Nusa Tenggara Barat	130,842	135,258	266,100	84,458	75,675	160,133	32,881	64,55	55,95	60,18	8,60	0,87	20,53
32	Nusa Tenggara Timur	152,787	158,813	311,600	104,453	112,155	216,608	75,472	68,37	70,62	69,51	-2,26	1,03	34,84
33	Papua	91,528	95,772	187,300	43,583	33,358	76,941	25,121	47,62	34,83	41,08	12,79	0,73	32,65
34	Papua Barat	24,102	24,098	48,200	17,686	15,238	32,924	9,220	73,38	63,23	68,31	10,15	0,86	28,00
	Indonesia	6,801,575	6,479,725	13,281,300	4,401,039	4,246,355	8,647,394	3,647,351	64,71	65,53	65,11	-0,83	1,01	42,18

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SM yang berkeadilan menjadi 80,03 termasuk kategori pratama. Hal ini berarti akses pendidikan SM yang berkeadilan sebesar 80% dari 100% atau empat per lima. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 20 provinsi termasuk kategori kurang, 1 provinsi termasuk kategori pratama, 7 provinsi termasuk madya, 3 provinsi termasuk utama, dan 3 provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 99,86 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 58,85 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.23  
Akses yang Berkeadilan SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Berkeadilan				
		PG APK	IPG APK	%S-Swt	Rata-rata	Jenis
		0	1	50		
1	DKI Jakarta	91,89	90,85	100,00	94,25	UTAMA
2	Jawa Barat	99,85	99,74	100,00	99,86	PARIPURNA
3	Banten	91,42	86,88	100,00	92,77	UTAMA
4	Jawa Tengah	96,72	94,93	100,00	97,21	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	92,13	90,96	85,16	89,42	MADYA
6	Jawa Timur	98,89	98,22	99,89	99,00	PARIPURNA
7	Aceh	91,95	88,46	19,48	66,63	KURANG
8	Sumatera Utara	88,73	86,40	93,71	89,61	MADYA
9	Sumatera Barat	82,49	79,11	29,34	63,65	KURANG
10	Riau	96,05	94,02	49,89	79,99	KURANG
11	Kepulauan Riau	60,29	62,48	53,76	58,85	KURANG
12	Jambi	95,79	93,28	33,68	74,25	KURANG
13	Sumatera Selatan	97,77	96,70	63,85	86,11	MADYA
14	Bangka Belitung	97,31	95,68	42,83	78,61	KURANG
15	Bengkulu	98,81	98,27	21,10	72,73	KURANG
16	Lampung	98,71	97,88	83,55	93,38	UTAMA
17	Kalimantan Barat	99,20	98,67	60,53	86,13	MADYA
18	Kalimantan Tengah	93,24	88,95	26,81	69,66	KURANG
19	Kalimantan Selatan	96,05	92,82	37,92	75,59	KURANG
20	Kalimantan Timur	88,95	86,30	57,00	77,42	KURANG
21	Kalimantan Utara	86,89	82,73	30,10	66,58	KURANG
22	Sulawesi Utara	98,70	98,40	63,37	86,82	MADYA
23	Gorontalo	94,07	91,44	15,01	66,84	KURANG
24	Sulawesi Tengah	97,40	96,04	32,37	75,27	KURANG
25	Sulawesi Selatan	98,03	97,21	43,38	79,54	KURANG
26	Sulawesi Barat	96,98	95,32	34,24	75,51	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	97,07	96,28	20,91	71,42	KURANG
28	Maluku	85,28	83,14	43,29	70,57	KURANG
29	Maluku Utara	98,88	98,43	50,04	82,45	PRATAMA
30	Bali	90,67	89,97	81,09	87,24	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	91,40	86,68	41,07	73,05	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	97,74	96,81	69,69	88,08	MADYA
33	Papua	87,21	73,15	65,30	75,22	KURANG
34	Papua Barat	89,85	86,17	56,01	77,34	KURANG
	Indonesia	93,13	90,95	56,01	80,03	PRATAMA
	Jenis	UTAMA	UTAMA	KURANG	PRATAMA	

d. Semua Jenjang

Berdasarkan tiga indikator akses pendidikan yang berkeadilan maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.24. Bila dilihat secara nasional maka SMP memiliki nilai akses pendidikan yang berkeadilan terbesar sebesar 87,00 termasuk kategori madya dan terkecil pada SM sebesar 80,03 termasuk kategori pratama.

Bila dilihat akses pendidikan yang berkeadilan untuk tiap provinsi yang terbesar maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi Banten sebesar 99,40 termasuk paripurna, untuk SMP pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 99,64 termasuk paripurna, untuk SM pada Provinsi Jawa Timur sebesar 99,00 termasuk paripurna. Sebaliknya, akses

pendidikan yang berkeadilan terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 54,21 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Gorontalo sebesar 65,69 termasuk kurang, untuk SM pada Provinsi Kepulauan Riau sebesar 58,85 termasuk kurang.

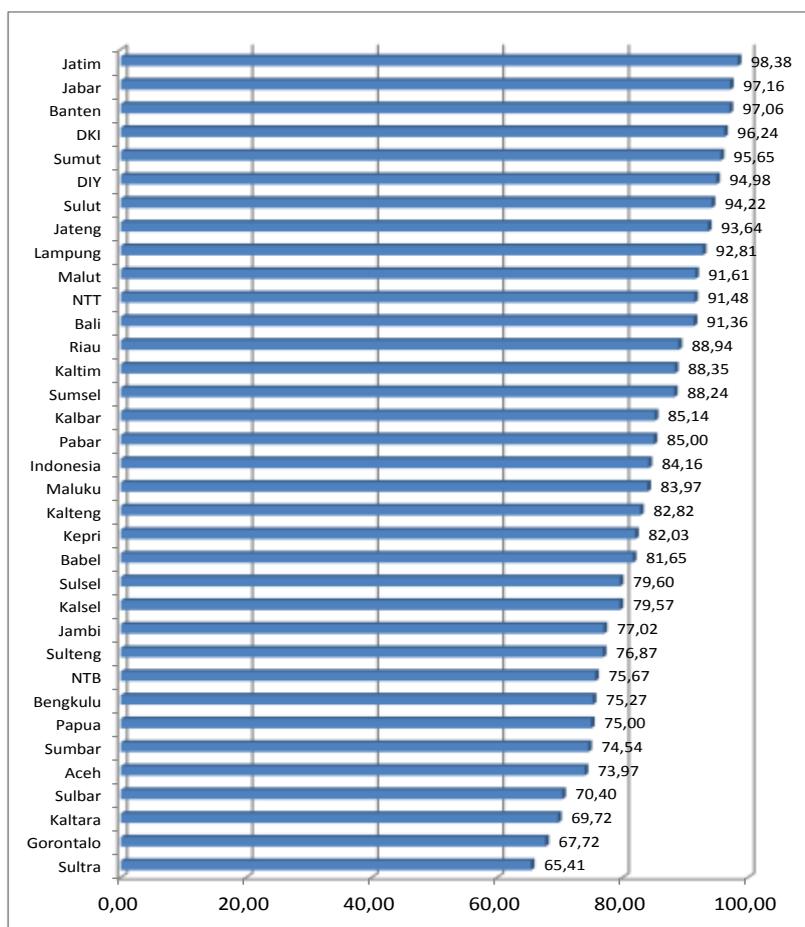
Tabel 4.24  
Akses yang Berkeadilan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	95,85	98,62	94,25	96,24	PARI PURNA
2	Jawa Barat	93,17	98,46	99,86	97,16	PARI PURNA
3	Banten	99,40	99,02	92,77	97,06	PARI PURNA
4	Jawa Tengah	89,77	93,92	97,21	93,64	UTAMA
5	DI Yogyakarta	97,01	98,51	89,42	94,98	UTAMA
6	Jawa Timur	97,52	98,63	99,00	98,38	PARI PURNA
7	Aceh	76,26	79,03	66,63	73,97	KURANG
8	Sumatera Utara	97,69	99,64	89,61	95,65	PARI PURNA
9	Sumatera Barat	81,79	78,19	63,65	74,54	KURANG
10	Riau	96,89	89,93	79,99	88,94	MADYA
11	Kepulauan Riau	96,83	90,42	58,85	82,03	PRATAMA
12	Jambi	82,05	74,75	74,25	77,02	KURANG
13	Sumatera Selatan	87,79	90,81	86,11	88,24	MADYA
14	Bangka Belitung	86,70	79,65	78,61	81,65	PRATAMA
15	Bengkulu	81,63	71,46	72,73	75,27	KURANG
16	Lampung	87,33	97,70	93,38	92,81	UTAMA
17	Kalimantan Barat	85,72	83,58	86,13	85,14	MADYA
18	Kalimantan Tengah	94,39	84,41	69,66	82,82	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	85,36	77,75	75,59	79,57	KURANG
20	Kalimantan Timur	96,98	90,65	77,42	88,35	MADYA
21	Kalimantan Utara	69,06	73,53	66,58	69,72	KURANG
22	Sulawesi Utara	96,76	99,07	86,82	94,22	UTAMA
23	Gorontalo	70,64	65,69	66,84	67,72	KURANG
24	Sulawesi Tengah	81,60	73,75	75,27	76,87	KURANG
25	Sulawesi Selatan	79,31	79,94	79,54	79,60	KURANG
26	Sulawesi Barat	63,26	72,43	75,51	70,40	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	54,21	70,61	71,42	65,41	KURANG
28	Maluku	86,14	95,20	70,57	83,97	PRATAMA
29	Maluku Utara	96,43	95,96	82,45	91,61	UTAMA
30	Bali	94,07	92,79	87,24	91,36	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	74,20	79,75	73,05	75,67	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	91,32	95,04	88,08	91,48	UTAMA
33	Papua	59,98	89,79	75,22	75,00	KURANG
34	Papua Barat	78,40	99,24	77,34	85,00	MADYA
	Indonesia	85,46	87,00	80,03	84,16	PRATAMA
	Jenis	MADYA	MADYA	PRATAMA	PRATAMA	

Bila dilihat tiap provinsi ternyata 13 provinsi termasuk kategori kurang, 4 provinsi termasuk pratama, 5 provinsi termasuk madya, 7 provinsi termasuk utama, dan 5 provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 98,38 termasuk paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 54,21 termasuk kategori kurang.

Keberhasilan pendidikan dilihat dari akses pendidikan yang berkeadilan dapat terlihat jelas pada Grafik 4.3, terlihat bahwa lima provinsi terbawah adalah Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Aceh. Sebaliknya, lima provinsi teratas adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.

**Grafik 4.3**  
**Akses yang Berkeadilan Semua Jenjang Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**



#### 4. Rangkuman Akses Pendidikan

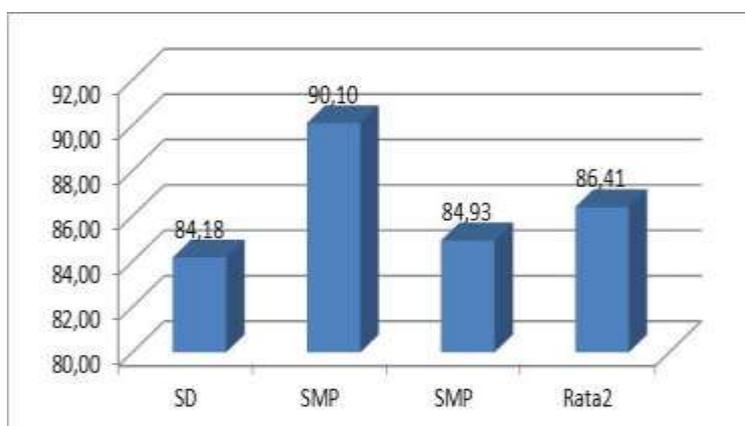
Berdasarkan akses pendidikan tiap jenjang pendidikan yang terdapat pada Tabel 4.25 maka dapat dikatakan bahwa akses pendidikan yang meluas memiliki nilai yang paling rendah tercapai sebesar 81,56 termasuk kategori pratama. Akses yang merata memiliki nilai yang paling tinggi sebesar 93,49 termasuk kategori utama, sedangkan akses yang berkeadilan memiliki nilai sebesar 84,16 termasuk kategori pratama. Dengan demikian, rata-rata akses pendidikan menjadi sebesar 86,41 termasuk kategori madya.

Tabel 4.25  
Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2015/2016

No.	Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A.	Akses yang meluas	72,47	92,72	79,51	81,56	PRATAMA
B.	Akses yang merata	94,63	90,60	95,26	93,49	UTAMA
C.	Akses yang berkeadilan	85,46	87,00	80,03	84,16	PRATAMA
	Akses Pendidikan	84,18	90,10	84,93	86,41	MADYA
	Jenis	PRATAMA	UTAMA	PRATAMA	MADYA	

Bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka nilai akses pendidikan SD sebesar 84,18 termasuk pratama, SMP sebesar 90,10 termasuk kategori utama, dan SM sebesar 84,93 termasuk kategori pratama, sehingga rata-rata tiga kelompok indikator dan tiga jenjang pendidikan sebesar 86,41 termasuk kategori madya.

Grafik 4.4  
Rangkuman Akses Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2015/2016



Berdasarkan tiga kelompok indikator akses pendidikan maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.26. Bila dilihat akses pendidikan tiap provinsi yang terbesar maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi DI Yogyakarta sebesar 93,67 termasuk utama, untuk SMP pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 97,64 termasuk paripurna, untuk SM pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 92,15 termasuk utama. Sebaliknya, akses pendidikan terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Papua sebesar 73,41 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 82,86 termasuk pratama, untuk SM pada Provinsi Papua sebesar 78,19 termasuk kurang. Dengan demikian, rata-rata tiga jenjang terbesar terjadi di DI Yogyakarta sebesar 94,45 termasuk utama dan terkecil terjadi di Papua sebesar 79,67 termasuk kurang.

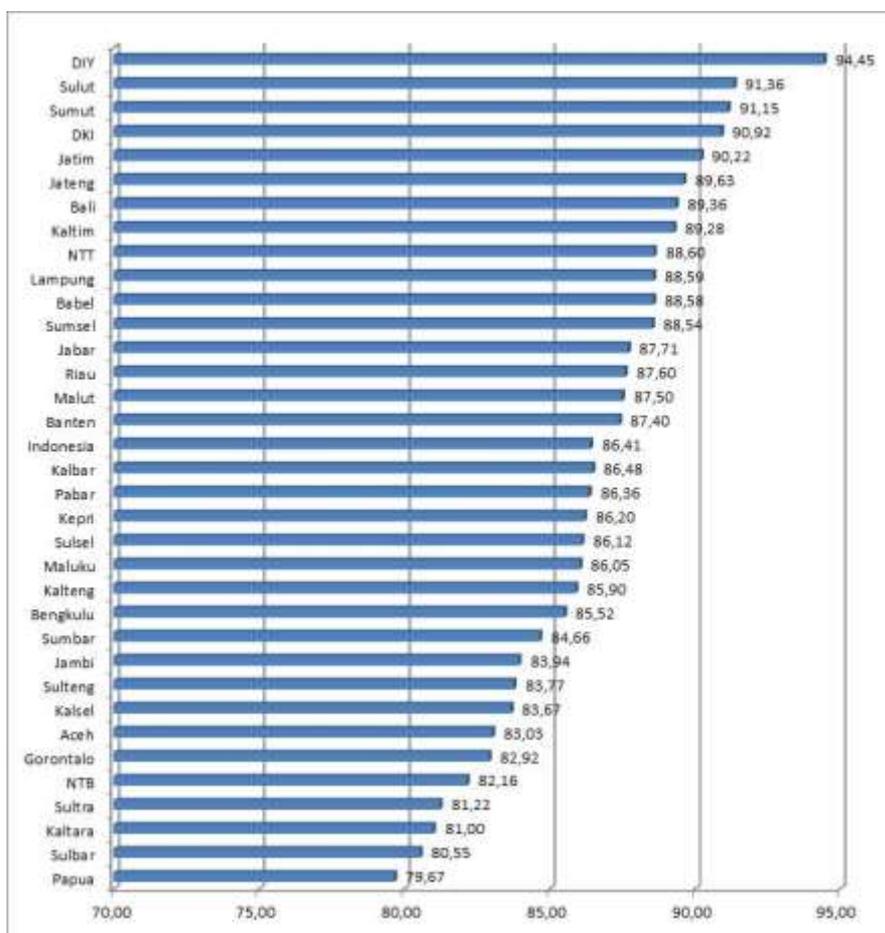
Tabel 4.26  
Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Akses Pendidikan				
		SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	84,50	96,10	92,15	90,92	UTAMA
2	Jawa Barat	82,89	91,91	88,34	87,71	MADYA
3	Banten	83,61	91,39	87,20	87,40	MADYA
4	Jawa Tengah	85,39	92,81	90,68	89,63	MADYA
5	DI Yogyakarta	93,67	97,64	92,06	94,45	UTAMA
6	Jawa Timur	85,93	94,27	90,45	90,22	UTAMA
7	Aceh	78,71	87,80	82,58	83,03	PRATAMA
8	Sumatera Utara	89,26	95,11	89,07	91,15	UTAMA
9	Sumatera Barat	84,92	87,09	81,98	84,66	PRATAMA
10	Riau	88,59	89,20	85,01	87,60	MADYA
11	Kepulauan Riau	86,05	92,99	79,56	86,20	MADYA
12	Jambi	84,91	83,57	83,35	83,94	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	85,73	92,82	87,07	88,54	MADYA
14	Bangka Belitung	89,47	90,14	86,12	88,58	MADYA
15	Bengkulu	85,61	86,84	84,10	85,52	MADYA
16	Lampung	84,93	94,03	86,80	88,59	MADYA
17	Kalimantan Barat	85,90	89,08	84,46	86,48	MADYA
18	Kalimantan Tengah	88,58	88,59	80,54	85,90	MADYA
19	Kalimantan Selatan	83,20	84,75	83,06	83,67	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	88,83	93,31	85,70	89,28	MADYA
21	Kalimantan Utara	75,67	87,56	79,77	81,00	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	89,19	96,68	88,22	91,36	UTAMA
23	Gorontalo	81,58	83,83	83,35	82,92	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	84,30	84,41	82,61	83,77	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	83,26	89,25	85,84	86,12	MADYA
26	Sulawesi Barat	77,41	82,86	81,37	80,55	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	74,06	85,66	83,95	81,22	PRATAMA
28	Maluku	85,13	91,48	81,54	86,05	MADYA
29	Maluku Utara	88,05	89,91	84,54	87,50	MADYA
30	Bali	89,34	92,72	86,02	89,36	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	79,35	85,81	81,31	82,16	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	87,81	92,30	85,69	88,60	MADYA
33	Papua	73,41	87,41	78,19	79,67	KURANG
34	Papua Barat	81,51	94,49	83,08	86,36	MADYA
	Indonesia	84,18	90,10	84,93	86,41	MADYA
	Jenis	PRATAMA	UTAMA	PRATAMA	MADYA	

Bila dilihat tiap provinsi ternyata 1 provinsi termasuk kategori kurang, 10 provinsi termasuk pratama, 18 provinsi termasuk madya, dan 5 provinsi termasuk utama. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 94,45 termasuk utama, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 79,67 termasuk kategori kurang.

Keberhasilan pendidikan dilihat dari akses pendidikan dapat terlihat jelas pada Grafik 4.5 bahwa lima provinsi terbawah adalah Papua, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Sebaliknya, lima provinsi teratas adalah DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Grafik 4.5  
Rangkuman Akses Pendidikan Semua Jenjang Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016



## B. Pembelajaran yang Bermutu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu dapat dilihat dari tiga segi, yaitu mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana.

### 1. Mutu Guru

Oleh karena keterbatasan data yang tersedia maka hanya terdapat dua jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui mutu guru, yaitu %GL dan R-S/G. R-S/G dilakukan konversi menggunakan standar yang terdapat pada Tabel 3.3, sedangkan %GL tidak dilakukan konversi, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator. Kedua indikator tersebut kemudian dijumlahkan dan

dibagi 2, sehingga diperoleh mutu guru. Nilai maksimal 100, artinya nilai makin mendekati 100 disebut makin bermutu.

Tabel 4.27  
Data, Indikator, dan Nilai Mutu Guru Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2015/2016

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A.	Data					
1	Guru	1.795.613	681.422	569.265		
2	Guru S1+	1.455.349	594.554	535.281		
3	Siswa	25.885.053	10.040.277	8.647.394		
B.	Indikator					
1	%GL	81,05	87,25	94,03		
2	R-S/G	14	15	15		
C.	Nilai Indikator					
1	%GL	81,05	87,25	94,03	87,44	MADYA
2	R-S/G	82,61	85,74	83,26	83,87	PRATAMA
	Mutu Guru	81,83	86,50	88,64	85,66	MADYA
	Jenis Mutu Guru	PRATAMA	MADYA	MADYA	MADYA	

Tabel 4.27 menunjukkan data, indikator, dan nilai mutu guru menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat guru SD sebesar 1.795.613, SMP sebesar 681.422, dan SM sebesar 569.265. Bila dibandingkan dengan guru yang berijazah S1 dan lebih maka %GL terbesar terjadi pada SM sebesar 94,03% dan terkecil pada guru SD sebesar 81,05%. Guru SD yang terkecil karena sebelumnya guru layak mengajar di SD adalah yang berijazah Diploma 2 (PGSD), sedangkan di SM berarti masih ada 5,97% guru harus disetarakan agar layak mengajar di SM.

Bila dibandingkan dengan siswa, maka R-S/G terbesar pada SMP dan SM sebesar 15 dan terkecil pada SD sebesar 14. Artinya, masih terdapat kekurangan guru SM karena standarnya harusnya 12, sebaliknya terjadi kelebihan guru SD karena berdasar standar sebesar 16.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka rata-rata %GL mengajar di tiga jenjang sebesar 87,44 termasuk kategori madya. Setelah R-S/G mengalami konversi, SD menjadi 82,61, SMP menjadi 85,74, dan SM menjadi 83,26, sehingga rata-rata menjadi 83,87 termasuk kategori pratama. Dengan demikian, mutu guru terbaik pada SM sebesar 88,64 termasuk kategori utama dan mutu guru SD terkecil sebesar 81,83 termasuk pratama. Selanjutnya, mutu guru SMP sebesar 86,50 termasuk madya, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 85,66 termasuk madya.

#### a. SD

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis dua indikator mutu guru tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.28. Guru SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 243.563 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar

6.108. Namun, %GL terbesar terjadi Provinsi Jawa Tengah sebesar 89,93% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 46,62% dengan rata-rata nasional sebesar 81,05%. Hal ini berarti masih terdapat 19,95% guru yang perlu disetarakan agar layak mengajar di SD.

Demikian juga siswa SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.560.218 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 78.064. Dengan membandingkan siswa dan guru maka R-S/G terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 22, berarti seorang guru rata-rata melayani 22 siswa atau kekurangan guru dan terkecil terjadi di Provinsi Aceh sebesar 9, berarti seorang guru melayani 9 siswa, berarti kelebihan guru dengan rata-rata nasional sebesar 14. Hal ini berarti terjadi kelebihan guru karena standarnya sebesar 16.

Tabel 4.28  
Data dan Indikator Mutu Guru SD Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data			Mutu 3.1 Guru	
		Guru	Guru S1+	Siswa	%GL	R-S/G
1	DKI Jakarta	42,071	35,794	822,420	85.08	20
2	Jawa Barat	243,563	218,563	4,560,218	89.74	19
3	Banten	63,478	54,667	1,206,719	86.12	19
4	Jawa Tengah	209,876	188,751	2,908,119	89.93	14
5	DI Yogyakarta	22,649	19,814	291,647	87.48	13
6	Jawa Timur	234,198	210,602	2,910,051	89.92	12
7	Aceh	52,409	38,197	482,493	72.88	9
8	Sumatera Utara	119,654	85,753	1,780,003	71.67	15
9	Sumatera Barat	49,361	42,968	654,687	87.05	13
10	Riau	54,297	43,543	803,489	80.19	15
11	Kepulauan Riau	13,643	11,322	221,910	82.99	16
12	Jambi	30,232	21,880	395,806	72.37	13
13	Sumatera Selatan	64,366	48,518	944,172	75.38	15
14	Bangka Belitung	9,700	7,488	159,462	77.20	16
15	Bengkulu	17,019	13,407	220,771	78.78	13
16	Lampung	60,841	46,109	845,662	75.79	14
17	Kalimantan Barat	44,273	30,539	610,168	68.98	14
18	Kalimantan Tengah	27,432	20,759	294,057	75.67	11
19	Kalimantan Selatan	33,704	28,119	385,350	83.43	11
20	Kalimantan Timur	26,895	21,300	413,925	79.20	15
21	Kalimantan Utara	6,108	4,049	78,064	66.29	13
22	Sulawesi Utara	21,355	14,616	258,824	68.44	12
23	Gorontalo	9,666	7,959	134,344	82.34	14
24	Sulawesi Tengah	30,741	19,480	364,869	63.37	12
25	Sulawesi Selatan	78,847	66,329	970,423	84.12	12
26	Sulawesi Barat	14,586	9,498	168,986	65.12	12
27	Sulawesi Tenggara	26,670	19,784	337,018	74.18	13
28	Maluku	19,097	10,696	230,905	56.01	12
29	Maluku Utara	11,837	5,518	161,875	46.62	14
30	Bali	28,840	25,896	405,508	89.79	14
31	Nusa Tenggara Barat	43,467	34,673	514,051	79.77	12
32	Nusa Tenggara Timur	58,162	34,836	816,018	59.89	14
33	Papua	18,386	8,733	402,063	47.50	22
34	Papua Barat	8,190	5,189	130,976	63.36	16
	Indonesia	1,795,613	1,455,349	25,885,053	81.05	14

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu guru SD yang terdapat pada Tabel 4.29. Nilai %GL terbesar terjadi di

Provinsi DI Yogyakarta sebesar 89,93 dan terkecil sebesar 46,62 terjadi di Provinsi Maluku Utara, sehingga nasional menjadi 81,05 termasuk kategori pratama. Nilai R-S/G SD terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 98,37 dan terkecil sebesar 57,54 terjadi di Provinsi Aceh, sehingga nasional menjadi 82,61 termasuk kategori pratama.

Dengan demikian, jumlah nilai mutu guru SD menjadi 81,83 termasuk kategori pratama. Hal ini berarti mutu guru SD tercapai 82% dari 100% atau empat per lima. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 16 provinsi termasuk kategori kurang, 10 provinsi termasuk kategori pratama, 7 provinsi termasuk madya, dan 1 provinsi termasuk utama. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 90,68 termasuk kategori utama, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 60,33 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.29  
Mutu Guru SD Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Mutu Guru			
		%GL 100	R-S/G 16	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	85.08	81.85	83.46	PRATAMA
2	Jawa Barat	89.74	85.46	87.60	MADYA
3	Banten	86.12	84.17	85.14	MADYA
4	Jawa Tengah	89.93	86.60	88.27	MADYA
5	DI Yogyakarta	87.48	80.48	83.98	PRATAMA
6	Jawa Timur	89.92	77.66	83.79	PRATAMA
7	Aceh	72.88	57.54	65.21	KURANG
8	Sumatera Utara	71.67	92.98	82.32	PRATAMA
9	Sumatera Barat	87.05	82.90	84.97	PRATAMA
10	Riau	80.19	92.49	86.34	MADYA
11	Kepulauan Riau	82.99	98.37	90.68	UTAMA
12	Jambi	72.37	81.83	77.10	KURANG
13	Sumatera Selatan	75.38	91.68	83.53	PRATAMA
14	Bangka Belitung	77.20	97.33	87.26	MADYA
15	Bengkulu	78.78	81.08	79.93	KURANG
16	Lampung	75.79	86.87	81.33	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	68.98	86.14	77.56	KURANG
18	Kalimantan Tengah	75.67	67.00	71.34	KURANG
19	Kalimantan Selatan	83.43	71.46	77.44	KURANG
20	Kalimantan Timur	79.20	96.19	87.69	MADYA
21	Kalimantan Utara	66.29	79.88	73.08	KURANG
22	Sulawesi Utara	68.44	75.75	72.10	KURANG
23	Gorontalo	82.34	86.87	84.60	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	63.37	74.18	68.78	KURANG
25	Sulawesi Selatan	84.12	76.92	80.52	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	65.12	72.41	68.76	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	74.18	78.98	76.58	KURANG
28	Maluku	56.01	75.57	65.79	KURANG
29	Maluku Utara	46.62	85.47	66.04	KURANG
30	Bali	89.79	87.88	88.84	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	79.77	73.91	76.84	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	59.89	87.69	73.79	KURANG
33	Papua	47.50	73.17	60.33	KURANG
34	Papua Barat	63.36	99.95	81.65	PRATAMA
	Indonesia	81.05	82.61	81.83	PRATAMA
	Jenis	PRATAMA	PRATAMA	PRATAMA	

b. SMP

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis dua indikator mutu guru tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.30. Guru SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 89.673 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2.382. Namun, %GL terbesar terjadi Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,64% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku sebesar 69,79% dengan rata-rata nasional sebesar 87,25%. Hal ini berarti masih terdapat 12,75% guru yang perlu disetarakan agar layak mengajar di SMP.

Tabel 4.30  
Data dan Indikator Mutu Guru SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data			Mutu Guru	
		Guru	Guru S1+	Siswa	%GL	R-S/G
1	DKI Jakarta	20,164	17,490	370,160	86.74	18
2	Jawa Barat	89,673	78,795	1,790,762	87.87	20
3	Banten	22,054	18,888	426,658	85.64	19
4	Jawa Tengah	76,445	70,054	1,216,596	91.64	16
5	DI Yogyakarta	9,681	8,499	129,991	87.79	13
6	Jawa Timur	85,815	78,320	1,262,919	91.27	15
7	Aceh	22,926	19,724	197,649	86.03	9
8	Sumatera Utara	44,160	37,740	654,138	85.46	15
9	Sumatera Barat	18,640	16,048	214,535	86.09	12
10	Riau	19,491	16,662	251,319	85.49	13
11	Kepulauan Riau	5,123	4,443	79,005	86.73	15
12	Jambi	10,704	9,391	123,288	87.73	12
13	Sumatera Selatan	24,747	21,340	347,335	86.23	14
14	Bangka Belitung	3,258	2,802	57,204	86.00	18
15	Bengkulu	7,351	6,468	86,848	87.99	12
16	Lampung	22,648	18,776	316,299	82.90	14
17	Kalimantan Barat	15,202	12,407	228,046	81.61	15
18	Kalimantan Tengah	9,332	8,317	105,119	89.12	11
19	Kalimantan Selatan	9,932	9,054	120,241	91.16	12
20	Kalimantan Timur	10,251	9,107	152,417	88.84	15
21	Kalimantan Utara	2,382	2,078	29,834	87.24	13
22	Sulawesi Utara	9,652	7,632	119,531	79.07	12
23	Gorontalo	4,277	3,768	49,186	88.10	12
24	Sulawesi Tengah	10,789	9,526	128,020	88.29	12
25	Sulawesi Selatan	30,487	27,354	391,982	89.72	13
26	Sulawesi Barat	4,819	3,965	61,266	82.28	13
27	Sulawesi Tenggara	11,231	10,069	125,202	89.65	11
28	Maluku	8,599	6,001	95,165	69.79	11
29	Maluku Utara	5,427	4,364	58,890	80.41	11
30	Bali	12,230	10,707	195,956	87.55	16
31	Nusa Tenggara Barat	17,771	15,523	180,202	87.35	10
32	Nusa Tenggara Timur	24,899	19,993	316,551	80.30	13
33	Papua	7,712	6,108	114,514	79.20	15
34	Papua Barat	3,550	3,141	43,449	88.48	12
	Indonesia	681,422	594,554	10,040,277	87.25	15

Demikian juga siswa SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.790.762 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 29.834. Dengan membandingkan siswa dan guru maka R-S/G terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 20, berarti seorang guru rata-rata melayani 20 siswa dan terkecil terjadi di Provinsi Aceh sebesar 9, berarti seorang guru melayani 9 siswa dengan rata-rata

nasional sebesar 15. Hal ini berarti terjadi kekurangan guru SMP karena standar sebesar 14 lebih kecil daripada rasio yang ada.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu guru SMP yang terdapat pada Tabel 4.31. Nilai %GL terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 91,64 dan terkecil sebesar 69,79 terjadi di Provinsi Maluku, sehingga nasional menjadi 87,25 termasuk kategori madya. Nilai R-S/G SMP terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 99,75 dan terkecil sebesar 70,11 terjadi di Provinsi Jawa Barat, sehingga nasional menjadi 85,74 termasuk kategori madya.

Tabel 4.31  
Mutu Guru SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Mutu Guru			
		%GL	R-S/G	Rata-rata	Jenis
		100	14		
1	DKI Jakarta	86.74	76.26	81.50	PRATAMA
2	Jawa Barat	87.87	70.11	78.99	KURANG
3	Banten	85.64	72.37	79.01	KURANG
4	Jawa Tengah	91.64	87.97	89.80	MADYA
5	DI Yogyakarta	87.79	95.91	91.85	UTAMA
6	Jawa Timur	91.27	95.13	93.20	UTAMA
7	Aceh	86.03	61.58	73.81	KURANG
8	Sumatera Utara	85.46	94.51	89.99	MADYA
9	Sumatera Barat	86.09	82.21	84.15	PRATAMA
10	Riau	85.49	92.10	88.79	MADYA
11	Kepulauan Riau	86.73	90.78	88.75	MADYA
12	Jambi	87.73	82.27	85.00	MADYA
13	Sumatera Selatan	86.23	99.75	92.99	UTAMA
14	Bangka Belitung	86.00	79.74	82.87	PRATAMA
15	Bengkulu	87.99	84.39	86.19	MADYA
16	Lampung	82.90	99.76	91.33	UTAMA
17	Kalimantan Barat	81.61	93.33	87.47	MADYA
18	Kalimantan Tengah	89.12	80.46	84.79	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	91.16	86.47	88.82	MADYA
20	Kalimantan Timur	88.84	94.16	91.50	UTAMA
21	Kalimantan Utara	87.24	89.46	88.35	MADYA
22	Sulawesi Utara	79.07	88.46	83.76	PRATAMA
23	Gorontalo	88.10	82.14	85.12	MADYA
24	Sulawesi Tengah	88.29	84.76	86.52	MADYA
25	Sulawesi Selatan	89.72	91.84	90.78	UTAMA
26	Sulawesi Barat	82.28	90.81	86.54	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	89.65	79.63	84.64	PRATAMA
28	Maluku	69.79	79.05	74.42	KURANG
29	Maluku Utara	80.41	77.51	78.96	KURANG
30	Bali	87.55	87.38	87.46	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	87.35	72.43	79.89	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	80.30	90.81	85.55	MADYA
33	Papua	79.20	94.28	86.74	MADYA
34	Papua Barat	88.48	87.42	87.95	MADYA
	Indonesia	87.25	85.74	86.50	MADYA
	Jenis	MADYA	MADYA	MADYA	

Dengan demikian, nilai mutu guru SMP menjadi 86,50 termasuk kategori madya. Hal ini berarti mutu guru SMP tercapai 87% dari 100% atau tujuh per delapan. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 6 provinsi termasuk kategori kurang, 6 provinsi termasuk kategori pratama, 16 provinsi termasuk madya, dan 6 provinsi termasuk utama. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 93,20

termasuk kategori utama, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Aceh sebesar 73,81 termasuk kategori kurang.

c. SM

Berdasarkan data SMA dan SMK maka dihasilkan analisis dua indikator mutu guru tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.32. Guru SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 76.480 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.731. Namun, %GL terbesar terjadi Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,98% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku sebesar 91,19% dengan rata-rata nasional sebesar 94,03%. Hal ini berarti masih terdapat 5,93% guru yang perlu disetarakan agar layak mengajar di SM.

Tabel 4.32  
Data dan Indikator Mutu Guru SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data			Mutu Guru	
		Guru	Guru S1+	Siswa	%GL	R-S/G
1	DKI Jakarta	21,074	20,100	358,030	95.38	17
2	Jawa Barat	76,480	70,614	1,480,948	92.33	19
3	Banten	19,210	18,040	388,566	93.91	20
4	Jawa Tengah	68,289	64,553	1,077,710	94.53	16
5	DI Yogyakarta	11,152	10,534	132,914	94.46	12
6	Jawa Timur	73,338	69,789	1,151,857	95.16	16
7	Aceh	19,074	18,032	180,600	94.54	9
8	Sumatera Utara	38,315	35,530	611,345	92.73	16
9	Sumatera Barat	17,775	17,060	212,492	95.98	12
10	Riau	16,045	15,092	217,031	94.06	14
11	Kepulauan Riau	3,948	3,684	59,830	93.31	15
12	Jambi	8,533	8,151	109,374	95.52	13
13	Sumatera Selatan	19,553	18,486	282,524	94.54	14
14	Bangka Belitung	2,745	2,506	43,371	91.29	16
15	Bengkulu	5,741	5,497	69,556	95.75	12
16	Lampung	17,899	16,469	255,823	92.01	14
17	Kalimantan Barat	9,696	8,944	158,326	92.24	16
18	Kalimantan Tengah	6,621	6,316	76,634	95.39	12
19	Kalimantan Selatan	7,371	7,050	106,955	95.65	15
20	Kalimantan Timur	8,622	8,050	131,174	93.37	15
21	Kalimantan Utara	1,731	1,630	21,997	94.17	13
22	Sulawesi Utara	7,055	6,587	97,585	93.37	14
23	Gorontalo	2,862	2,723	43,220	95.14	15
24	Sulawesi Tengah	7,152	6,690	101,334	93.54	14
25	Sulawesi Selatan	23,455	22,409	341,283	95.54	15
26	Sulawesi Barat	3,475	3,236	47,810	93.12	14
27	Sulawesi Tenggara	9,308	8,884	111,205	95.44	12
28	Maluku	7,376	6,726	79,673	91.19	11
29	Maluku Utara	4,311	3,979	46,776	92.30	11
30	Bali	10,261	9,680	164,845	94.34	16
31	Nusa Tenggara Barat	14,110	13,412	160,133	95.05	11
32	Nusa Tenggara Timur	17,537	16,231	216,608	92.55	12
33	Papua	6,159	5,776	76,941	93.78	12
34	Papua Barat	2,992	2,821	32,924	94.28	11
	Indonesia	569,265	535,281	8,647,394	94.03	15

Demikian juga siswa SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.480.948 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 21.997. Dengan

membandingkan siswa dan guru maka R-S/G terbesar terjadi di Provinsi Banten sebesar 20, berarti seorang guru rata-rata melayani 20 siswa dan terkecil terjadi di Provinsi Aceh sebesar 9, berarti seorang guru melayani 9 siswa dengan rata-rata nasional sebesar 15. Hal ini berarti terjadi kekurangan guru SM karena standar sebesar 12 lebih kecil daripada rasio yang ada.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu guru SM yang terdapat pada Tabel 4.33. Nilai %GL terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 95,98 dan terkecil sebesar 91,19 terjadi di Provinsi Maluku, sehingga nasional menjadi 94,03 termasuk kategori utama. Nilai R-S/G SMA terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 99,38 dan terkecil sebesar 60,37 terjadi di Provinsi Banten, sehingga nasional menjadi 83,26 termasuk kategori pratama.

Tabel 4.33  
Mutu Guru SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Mutu Guru			
		%GL	R-S/G	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	95,38	72,03	83,71	PRATAMA
2	Jawa Barat	92,33	63,01	77,67	KURANG
3	Banten	93,91	60,37	77,14	KURANG
4	Jawa Tengah	94,53	77,51	86,02	MADYA
5	DI Yogyakarta	94,46	99,38	96,92	PARIPURNA
6	Jawa Timur	95,16	76,90	86,03	MADYA
7	Aceh	94,54	76,48	85,51	MADYA
8	Sumatera Utara	92,73	75,39	84,06	PRATAMA
9	Sumatera Barat	95,98	95,21	95,59	PARIPURNA
10	Riau	94,06	89,30	91,68	UTAMA
11	Kepulauan Riau	93,31	78,95	86,13	MADYA
12	Jambi	95,52	94,00	94,76	UTAMA
13	Sumatera Selatan	94,54	82,39	88,47	MADYA
14	Bangka Belitung	91,29	75,98	83,64	PRATAMA
15	Bengkulu	95,75	92,59	94,17	UTAMA
16	Lampung	92,01	83,73	87,87	MADYA
17	Kalimantan Barat	92,24	74,38	83,31	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	95,39	95,86	95,63	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	95,65	82,36	89,00	MADYA
20	Kalimantan Timur	93,37	78,97	86,17	MADYA
21	Kalimantan Utara	94,17	92,19	93,18	UTAMA
22	Sulawesi Utara	93,37	86,77	90,07	UTAMA
23	Gorontalo	95,14	80,66	87,90	MADYA
24	Sulawesi Tengah	93,54	87,05	90,30	UTAMA
25	Sulawesi Selatan	95,54	84,69	90,12	UTAMA
26	Sulawesi Barat	93,12	87,35	90,24	UTAMA
27	Sulawesi Tenggara	95,44	86,39	90,92	UTAMA
28	Maluku	91,19	81,79	86,49	MADYA
29	Maluku Utara	92,30	87,83	90,06	UTAMA
30	Bali	94,34	74,72	84,53	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	95,05	90,77	92,91	UTAMA
32	Nusa Tenggara Timur	92,55	87,30	89,93	MADYA
33	Papua	93,78	88,36	91,07	UTAMA
34	Papua Barat	94,28	90,00	92,14	UTAMA
	Indonesia	94,03	83,26	88,64	MADYA
	Jenis	UTAMA	PRATAMA	MADYA	

Dengan demikian, jumlah nilai mutu guru SM menjadi 88,64 termasuk kategori madya. Hal ini berarti mutu guru SM tercapai 89% dari 100% atau sembilan per

sepuluh. Bila dilihat tiap provinsi ternyata 2 provinsi termasuk kategori kurang, 5 provinsi termasuk kategori pratama, 11 provinsi termasuk madya, 13 provinsi termasuk utama, dan 3 provinsi termasuk kategori paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 96,92 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Banten sebesar 77,14 termasuk kategori kurang.

d. Semua Jenjang

Berdasarkan dua indikator mutu guru maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.34. Bila dilihat secara nasional maka SM memiliki nilai mutu guru terbesar sebesar 88,64 termasuk kategori madya dan terkecil pada SD sebesar 81,83 termasuk kategori pratama.

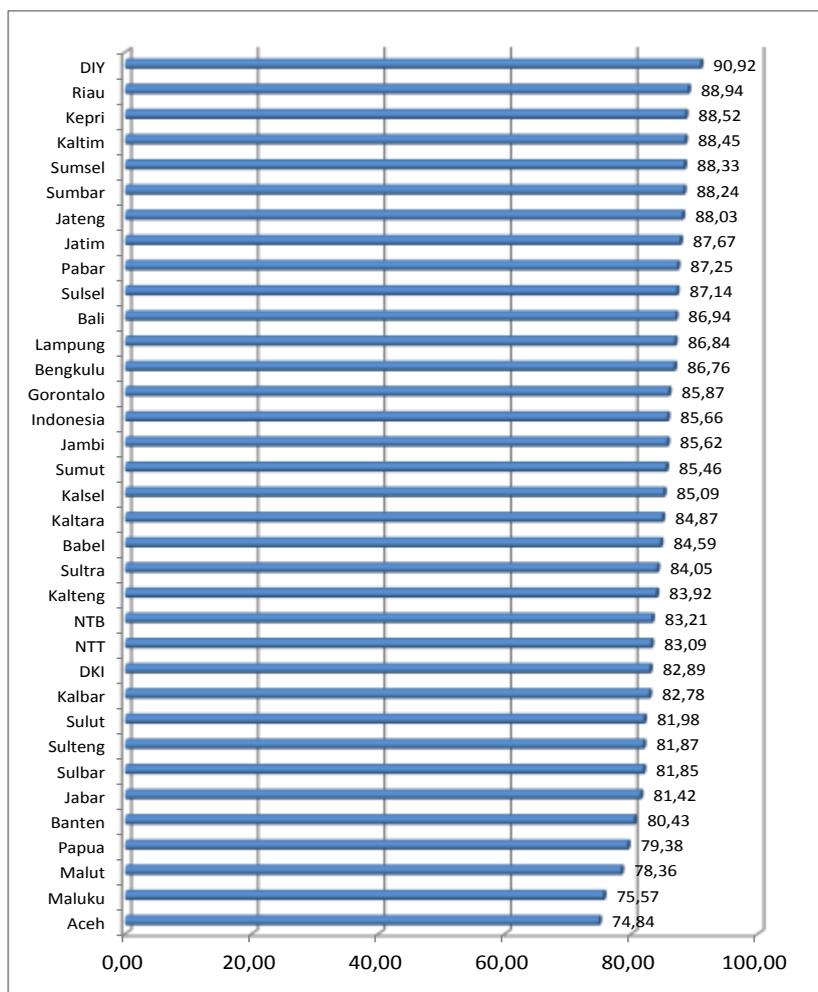
Tabel 4.34  
Mutu Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	83,46	81,50	83,71	82,89	PRATAMA
2	Jawa Barat	87,60	78,99	77,67	81,42	PRATAMA
3	Banten	85,14	79,01	77,14	80,43	PRATAMA
4	Jawa Tengah	88,27	89,80	86,02	88,03	MADYA
5	DI Yogyakarta	83,98	91,85	96,92	90,92	UTAMA
6	Jawa Timur	83,79	93,20	86,03	87,67	MADYA
7	Aceh	65,21	73,81	85,51	74,84	KURANG
8	Sumatera Utara	82,32	89,99	84,06	85,46	MADYA
9	Sumatera Barat	84,97	84,15	95,59	88,24	MADYA
10	Riau	86,34	88,79	91,68	88,94	MADYA
11	Kepulauan Riau	90,68	88,75	86,13	88,52	MADYA
12	Jambi	77,10	85,00	94,76	85,62	MADYA
13	Sumatera Selatan	83,53	92,99	88,47	88,33	MADYA
14	Bangka Belitung	87,26	82,87	83,64	84,59	PRATAMA
15	Bengkulu	79,93	86,19	94,17	86,76	MADYA
16	Lampung	81,33	91,33	87,87	86,84	MADYA
17	Kalimantan Barat	77,56	87,47	83,31	82,78	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	71,34	84,79	95,63	83,92	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	77,44	88,82	89,00	85,09	MADYA
20	Kalimantan Timur	87,69	91,50	86,17	88,45	MADYA
21	Kalimantan Utara	73,08	88,35	93,18	84,87	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	72,10	83,76	90,07	81,98	PRATAMA
23	Gorontalo	84,60	85,12	87,90	85,87	MADYA
24	Sulawesi Tengah	68,78	86,52	90,30	81,87	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	80,52	90,78	90,12	87,14	MADYA
26	Sulawesi Barat	68,76	86,54	90,24	81,85	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	76,58	84,64	90,92	84,05	PRATAMA
28	Maluku	65,79	74,42	86,49	75,57	KURANG
29	Maluku Utara	66,04	78,96	90,06	78,36	KURANG
30	Bali	88,84	87,46	84,53	86,94	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	76,84	79,89	92,91	83,21	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	73,79	85,55	89,93	83,09	PRATAMA
33	Papua	60,33	86,74	91,07	79,38	KURANG
34	Papua Barat	81,65	87,95	92,14	87,25	MADYA
	Indonesia	81,83	86,50	88,64	85,66	MADYA
	Jenis	PRATAMA	MADYA	MADYA	MADYA	

Dengan demikian, mutu guru semua jenjang sebesar 85,66 termasuk madya. Hal ini berarti mutu guru semua jenjang tercapai 86% dari 100% atau tujuh per delapan.

Bila dilihat tiap provinsi ternyata 4 provinsi termasuk kategori kurang, 13 provinsi termasuk kategori pratama, 16 provinsi termasuk madya, dan 1 provinsi termasuk utama. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 90,92 termasuk kategori utama, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Aceh sebesar 74,84 termasuk kategori kurang.

Grafik 4.6  
Mutu Guru Semua Jenjang Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016



Bila dilihat mutu guru tiap provinsi yang terbesar maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 90,68 termasuk utama, untuk SMP pada Provinsi Jawa Timur sebesar 93,20 termasuk utama, untuk SM pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 96,92 termasuk paripurna. Sebaliknya, mutu guru terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Papua sebesar 60,33 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Aceh

sebesar 73,81 termasuk kurang, dan untuk SM pada Provinsi Banten sebesar 77,14 termasuk kurang.

Mutu guru semua jenjang terdapat pada Grafik 4.6 di mana terlihat bahwa lima provinsi terbawah adalah Aceh, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Banten. Sebaliknya, lima provinsi teratas adalah DI Yogyakarta, Riau, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.

## 2. Mutu Siswa

Oleh karena ketersediaan data maka hanya terdapat tiga jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui mutu siswa, yaitu AL, AU, dan APS. AU dan APS dilakukan konversi menggunakan standar yang terdapat pada Tabel 3.3, sedangkan AL tidak dilakukan konversi, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator. Nilai ketiga indikator tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi 3, sehingga menghasilkan mutu siswa. Nilai maksimal 100, artinya makin mendekati 100 disebut siswa makin bermutu.

Tabel 4.35  
Data, Indikator, dan Nilai Mutu Siswa  
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015/2016

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A. Data						
1	Lulusan	4.381.997	3.274.813	2.853.477		
2	Siswa tk tertinggi th lalu*)	4.395.299	3.305.133	2.914.434		
3	Mengulang	422.082	24.815	15.283		
4	Putus Sekolah	68.066	51.541	118.353		
5	Siswa tahun lalu	26.132.141	9.930.647	8.443.817		
B. Indikator						
1	AL	99,70	99,08	97,91		
2	AU	1,62	0,25	0,18		
3	APS	0,26	0,52	1,40		
C. Nilai Indikator						
1	AL	99,70	99,08	97,91	98,90	PARIPURNA
2	AU	97,94	99,63	99,69	99,09	PARIPURNA
3	APS	99,65	99,40	98,59	99,22	PARIPURNA
	Nilai Mutu Siswa	99,10	99,37	98,73	99,07	PARIPURNA
	Jenis Mutu Siswa	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Tabel 4.35 menunjukkan data, indikator, dan nilai mutu siswa menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat lulusan SD sebesar 4.381.997, SMP sebesar 3.274.813, dan SM sebesar 2.853.477. Bila dibandingkan dengan siswa tingkat tertinggi tahun lalu maka AL terbesar terjadi pada SD sebesar 99,70% dan terkecil pada SM sebesar 97,91%.

Mengulang terbesar pada SD sebesar 422.082, SMP sebesar 24.815, dan SM sebesar 15.283. Sebaliknya, putus sekolah terbesar pada SM sebesar 118.353, SD sebesar 68.066, dan SMP sebesar 51.541. Bila dibandingkan dengan siswa tahun lalu maka AU terbesar pada SD sebesar 1,62% dan terkecil pada SM sebesar 0,18%.

Sebaliknya, APS terbesar pada SM sebesar 1,40% dan terkecil pada SD sebesar 0,26%.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka rata-rata AL di tiga jenjang sebesar 98,90 termasuk kategori paripurna, AU sebesar 99,09 termasuk kategori paripurna, dan APS sebesar 99,22 termasuk kategori paripurna, sehingga nilai mutu siswa sebesar 99,07 termasuk kategori paripurna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua jenjang memiliki siswa yang bermutu dilihat dari AL, AU, dan APS.

#### a. SD

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis tiga indikator mutu siswa tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.36. Lulusan SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 797.996 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 12.152. Namun, AL terbesar terjadi Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,95% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 98,60% dengan rata-rata nasional sebesar 99,70%. Hal ini berarti hanya 0,30% siswa tingkat VI yang tidak lulus SD.

Jumlah mengulang SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 57.356 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.517. Dengan membandingkan mengulang dengan siswa tahun lalu maka AU terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 4,65% dan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,50% dengan rata-rata nasional sebesar 1,62%.

Jumlah putus sekolah SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 8.080 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 234. Dengan membandingkan putus sekolah dengan siswa tahun lalu maka APS terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 1,00% dan terkecil terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,08% dengan rata-rata nasional sebesar 0,26%.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu siswa SD yang terdapat pada Tabel 4.37. Nilai AL terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,95 dan terkecil sebesar 98,60 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 99,70 termasuk kategori paripurna. Nilai AU SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 99,50 dan terkecil sebesar 95,35 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga nasional menjadi 97,94 termasuk kategori paripurna. Nilai APS SD terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 99,92 dan terkecil sebesar 99,00 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 99,65 termasuk kategori paripurna.

Dengan demikian, jumlah nilai mutu siswa SD menjadi 99,10 termasuk kategori paripurna. Hal ini berarti mutu siswa SD tercapai mendekati ideal 100. Bila dilihat tiap provinsi ternyata semua provinsi termasuk kategori paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 99,69, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 98,06.

**Tabel 4.36**  
**Data dan Indikator Mutu Siswa SD Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Provinsi	Data				Mutu Siswa			
		Lulusan	Siswa tk tertinggi	Mengulang	Putus Sek	Siswa th lalu	AL	AU	APS
1	DKI Jakarta	151,365	151,445	5,500	2,089	838,426	99.95	0.66	0.25
2	Jawa Barat	797,996	800,003	23,192	8,080	4,611,703	99.75	0.50	0.18
3	Banten	205,276	205,429	11,978	2,466	1,211,609	99.93	0.99	0.20
4	Jawa Tengah	505,520	507,499	57,356	3,306	2,941,627	99.61	1.95	0.11
5	DI Yogyakarta	48,814	49,037	3,764	245	289,832	99.55	1.30	0.08
6	Jawa Timur	516,948	519,447	33,877	3,240	2,963,790	99.52	1.14	0.11
7	Aceh	80,775	80,904	6,667	1,842	484,913	99.84	1.37	0.38
8	Sumatera Utara	294,287	294,756	20,584	7,621	1,790,466	99.84	1.15	0.43
9	Sumatera Barat	106,452	106,612	22,868	1,305	657,150	99.85	3.48	0.20
10	Riau	127,272	127,351	13,894	2,057	794,825	99.94	1.75	0.26
11	Kepulauan Riau	32,419	32,490	2,747	500	214,003	99.78	1.28	0.23
12	Jambi	65,631	65,895	6,488	1,221	398,456	99.60	1.63	0.31
13	Sumatera Selatan	152,123	152,279	18,057	3,065	941,957	99.90	1.92	0.33
14	Bangka Belitung	25,264	25,417	4,587	363	158,230	99.40	2.90	0.23
15	Bengkulu	36,050	36,219	4,980	783	221,130	99.53	2.25	0.35
16	Lampung	139,937	140,067	12,924	2,242	846,315	99.91	1.53	0.26
17	Kalimantan Barat	97,731	98,325	27,999	1,940	616,996	99.40	4.54	0.31
18	Kalimantan Tengah	47,479	47,647	7,535	998	295,945	99.65	2.55	0.34
19	Kalimantan Selatan	63,551	63,915	10,727	702	386,557	99.43	2.78	0.18
20	Kalimantan Timur	64,904	65,143	6,289	865	409,120	99.63	1.54	0.21
21	Kalimantan Utara	12,152	12,277	1,517	234	77,694	98.98	1.95	0.30
22	Sulawesi Utara	46,947	47,132	2,764	1,189	269,015	99.61	1.03	0.44
23	Gorontalo	22,824	22,859	5,188	423	138,523	99.85	3.75	0.31
24	Sulawesi Tengah	61,978	62,204	8,873	1,546	375,072	99.64	2.37	0.41
25	Sulawesi Selatan	169,998	170,124	15,569	4,252	997,473	99.93	1.56	0.43
26	Sulawesi Barat	29,297	29,373	3,429	908	173,941	99.74	1.97	0.52
27	Sulawesi Tenggara	56,819	57,039	6,964	2,039	342,647	99.61	2.03	0.60
28	Maluku	37,835	38,140	5,352	1,279	235,170	99.20	2.28	0.54
29	Maluku Utara	26,908	27,140	3,651	1,014	166,128	99.15	2.20	0.61
30	Bali	72,042	72,263	2,489	387	410,396	99.69	0.61	0.09
31	Nusa Tenggara Barat	88,224	88,422	7,730	1,389	518,881	99.78	1.49	0.27
32	Nusa Tenggara Timur	125,820	126,098	38,642	3,320	831,899	99.78	4.65	0.40
33	Papua	52,658	53,406	13,168	3,911	391,123	98.60	3.37	1.00
34	Papua Barat	18,701	18,942	4,733	1,245	131,129	98.73	3.61	0.95
	Indonesia	4,381,997	4,395,299	422,082	68,066	26,132,141	99.70	1.62	0.26

Tabel 4.37  
Mutu Siswa SD Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Mutu Siswa			Rata-rata	Jenis
		AL	AU	APS		
		100	0	0		
1	DKI Jakarta	99.95	99.34	99.75	99.68	PARIPURNA
2	Jawa Barat	99.75	99.50	99.82	99.69	PARIPURNA
3	Banten	99.93	99.01	99.80	99.58	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	99.61	98.05	99.89	99.18	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	99.55	98.70	99.92	99.39	PARIPURNA
6	Jawa Timur	99.52	98.86	99.89	99.42	PARIPURNA
7	Aceh	99.84	98.63	99.62	99.36	PARIPURNA
8	Sumatera Utara	99.84	98.85	99.57	99.42	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	99.85	96.52	99.80	98.72	PARIPURNA
10	Riau	99.94	98.25	99.74	99.31	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	99.78	98.72	99.77	99.42	PARIPURNA
12	Jambi	99.60	98.37	99.69	99.22	PARIPURNA
13	Sumatera Selatan	99.90	98.08	99.67	99.22	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	99.40	97.10	99.77	98.76	PARIPURNA
15	Bengkulu	99.53	97.75	99.65	98.98	PARIPURNA
16	Lampung	99.91	98.47	99.74	99.37	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	99.40	95.46	99.69	98.18	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	99.65	97.45	99.66	98.92	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	99.43	97.22	99.82	98.82	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	99.63	98.46	99.79	99.29	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	98.98	98.05	99.70	98.91	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	99.61	98.97	99.56	99.38	PARIPURNA
23	Gorontalo	99.85	96.25	99.69	98.60	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	99.64	97.63	99.59	98.95	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	99.93	98.44	99.57	99.31	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	99.74	98.03	99.48	99.08	PARIPURNA
27	Sulawesi Tenggara	99.61	97.97	99.40	99.00	PARIPURNA
28	Maluku	99.20	97.72	99.46	98.79	PARIPURNA
29	Maluku Utara	99.15	97.80	99.39	98.78	PARIPURNA
30	Bali	99.69	99.39	99.91	99.66	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	99.78	98.51	99.73	99.34	PARIPURNA
32	Nusa Tenggara Timur	99.78	95.35	99.60	98.25	PARIPURNA
33	Papua	98.60	96.63	99.00	98.08	PARIPURNA
34	Papua Barat	98.73	96.39	99.05	98.06	PARIPURNA
	Indonesia	99.70	97.94	99.65	99.10	PARIPURNA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

b. SMP

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis tiga indikator mutu siswa tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.38. Lulusan SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 574.000 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8.773. Namun, AL terbesar terjadi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan masing-masing sebesar 99,57% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 94,38% dengan rata-rata nasional sebesar 99,08%. Hal ini berarti hanya 0,92% siswa tingkat IX yang tidak lulus SMP.

Jumlah mengulang SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 2.744 dan terkecil di Provinsi Bali sebesar 66. Dengan membandingkan mengulang dengan siswa tahun lalu maka AU terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 1,22% dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,03% dengan rata-rata nasional sebesar 0,25%.

Jumlah putus sekolah SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 10.139 dan terkecil di Provinsi Bangka Belitung sebesar 214. Dengan membandingkan putus sekolah dengan siswa tahun lalu maka APS terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1,50% dan terkecil terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,23% dengan rata-rata nasional sebesar 0,52%.

Tabel 4.38  
Data dan Indikator Mutu Siswa SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data				Mutu Siswa			
		Lulusan	Siswa tk tertinggi	Meng-ulang	Putus Sek	Siswa th lalu	AL	AU	APS
1	DKI Jakarta	125,214	127,570	1,415	1,377	379,008	98.15	0.37	0.36
2	Jawa Barat	574,000	577,145	1,958	10,139	1,771,321	99.46	0.11	0.57
3	Banten	146,769	148,866	855	2,360	426,848	98.59	0.20	0.55
4	Jawa Tengah	408,985	410,770	1,954	4,366	1,219,304	99.57	0.16	0.36
5	DI Yogyakarta	44,387	44,626	195	293	129,809	99.46	0.15	0.23
6	Jawa Timur	419,451	421,712	2,744	4,783	1,259,024	99.46	0.22	0.38
7	Aceh	67,772	68,301	838	1,284	201,489	99.23	0.42	0.64
8	Sumatera Utara	222,093	223,943	1,103	4,119	649,018	99.17	0.17	0.63
9	Sumatera Barat	78,398	78,898	1,529	773	210,687	99.37	0.73	0.37
10	Riau	80,406	80,877	617	1,080	242,407	99.42	0.25	0.45
11	Kepulauan Riau	23,520	23,785	310	399	74,457	98.89	0.42	0.54
12	Jambi	40,581	40,770	289	647	121,401	99.54	0.24	0.53
13	Sumatera Selatan	107,632	108,932	830	1,469	341,351	98.81	0.24	0.43
14	Bangka Belitung	17,172	17,272	200	214	54,080	99.42	0.37	0.40
15	Bengkulu	28,086	28,655	439	343	86,453	98.01	0.51	0.40
16	Lampung	106,319	107,319	344	1,725	318,545	99.07	0.11	0.54
17	Kalimantan Barat	65,708	66,425	1,085	1,295	215,866	98.92	0.50	0.60
18	Kalimantan Tengah	31,112	31,681	274	504	100,266	98.20	0.27	0.50
19	Kalimantan Selatan	40,322	40,497	300	486	117,116	99.57	0.26	0.41
20	Kalimantan Timur	47,661	47,907	620	774	147,326	99.49	0.42	0.53
21	Kalimantan Utara	8,773	8,901	205	429	28,590	98.56	0.72	1.50
22	Sulawesi Utara	37,030	37,811	404	542	116,680	97.93	0.35	0.46
23	Gorontalo	16,540	16,671	301	279	48,334	99.21	0.62	0.58
24	Sulawesi Tengah	40,422	40,973	370	803	124,396	98.66	0.30	0.65
25	Sulawesi Selatan	130,003	131,715	1,215	2,890	389,984	98.70	0.31	0.74
26	Sulawesi Barat	18,882	19,251	268	569	58,733	98.08	0.46	0.97
27	Sulawesi Tenggara	40,308	40,934	665	1,059	122,220	98.47	0.54	0.87
28	Maluku	30,778	31,587	151	618	94,389	97.44	0.16	0.65
29	Maluku Utara	18,022	18,632	138	517	57,319	96.73	0.24	0.90
30	Bali	64,579	64,935	66	481	193,916	99.45	0.03	0.25
31	Nusa Tenggara Barat	58,226	59,256	533	783	178,236	98.26	0.30	0.44
32	Nusa Tenggara Timur	92,012	92,740	835	2,570	301,796	99.22	0.28	0.85
33	Papua	30,881	32,721	1,329	1,174	108,512	94.38	1.22	1.08
34	Papua Barat	12,769	13,055	436	397	41,766	97.81	1.04	0.95
	Indonesia	3,274,813	3,305,133	24,815	51,541	9,930,647	99.08	0.25	0.52

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu siswa SMP yang terdapat pada Tabel 4.39. Nilai AL terbesar terjadi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan masing-masing sebesar 99,57 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 94,38 dengan rata-rata nasional sebesar 99,08 termasuk kategori paripurna.

Nilai AU SMP terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 99,97 dan terkecil sebesar 98,78 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 99,63 termasuk kategori paripurna. Nilai APS SMP terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 99,77 dan

terkecil sebesar 98,50 terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga nasional menjadi 99,40 termasuk kategori paripurna.

Tabel 4.39  
Mutu Siswa SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Mutu Siswa			Rata-rata	Jenis
		AL	AU	APS		
		100	0	0		
1	DKI Jakarta	98.15	99.63	99.64	99.14	PARIPURNA
2	Jawa Barat	99.46	99.89	99.43	99.59	PARIPURNA
3	Banten	98.59	99.80	99.45	99.28	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	99.57	99.84	99.64	99.68	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	99.46	99.85	99.77	99.70	PARIPURNA
6	Jawa Timur	99.46	99.78	99.62	99.62	PARIPURNA
7	Aceh	99.23	99.58	99.36	99.39	PARIPURNA
8	Sumatera Utara	99.17	99.83	99.37	99.46	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	99.37	99.27	99.63	99.42	PARIPURNA
10	Riau	99.42	99.75	99.55	99.57	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	98.89	99.58	99.46	99.55	PARIPURNA
12	Jambi	99.54	99.76	99.47	99.59	PARIPURNA
13	Sumatera Selatan	98.81	99.76	99.57	99.38	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	99.42	99.63	99.60	99.55	PARIPURNA
15	Bengkulu	98.01	99.49	99.60	99.04	PARIPURNA
16	Lampung	99.07	99.89	99.46	99.47	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	98.92	99.50	99.40	99.27	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	98.20	99.73	99.50	99.14	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	99.57	99.74	99.59	99.63	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	99.49	99.58	99.47	99.51	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	98.56	99.28	98.50	98.78	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	97.93	99.65	99.54	99.04	PARIPURNA
23	Gorontalo	99.21	99.38	99.42	99.34	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	98.66	99.70	99.35	99.24	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	98.70	99.69	99.26	99.22	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	98.08	99.54	99.03	98.89	PARIPURNA
27	Sulawesi Tenggara	98.47	99.46	99.13	99.02	PARIPURNA
28	Maluku	97.44	99.84	99.35	98.87	PARIPURNA
29	Maluku Utara	96.73	99.76	99.10	98.53	PARIPURNA
30	Bali	99.45	99.97	99.75	99.72	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	98.26	99.70	99.56	99.17	PARIPURNA
32	Nusa Tenggara Timur	99.22	99.72	99.15	99.36	PARIPURNA
33	Papua	94.38	98.78	98.92	97.36	PARIPURNA
34	Papua Barat	97.81	98.96	99.05	98.60	PARIPURNA
	Indonesia	99.08	99.63	99.40	99.37	PARIPURNA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Dengan demikian, jumlah nilai mutu siswa SMP menjadi 99,37 termasuk kategori paripurna. Hal ini berarti mutu siswa SMP tercapai 99% dari 100% atau mendekati ideal. Bila dilihat tiap provinsi ternyata semua provinsi termasuk kategori paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 99,72 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 97,36 juga termasuk kategori paripurna.

#### c. SM

Berdasarkan data SM maka dihasilkan analisis tiga indikator mutu siswa tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.40. Lulusan SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 465.686 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 7.136. Namun, AL terbesar terjadi Provinsi Sumatera Barat dan Lampung masing-masing sebesar 98,49% dan terkecil terjadi di Provinsi Banten sebesar 95,81%

dengan rata-rata nasional sebesar 97,91%. Hal ini berarti hanya 2,09% siswa tingkat XII yang tidak lulus SM.

Tabel 4.40  
Data dan Indikator Mutu Siswa SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data				Mutu Siswa			
		Lulusan	Siswa tk tertinggi	Mengulang	Putus Sek	Siswa th lalu	AL	AU	APS
1	DKI Jakarta	121,701	124,353	513	3,214	355,711	97.87	0.14	0.90
2	Jawa Barat	465,686	473,008	1,186	21,889	1,410,595	98.45	0.08	1.55
3	Banten	121,751	127,071	378	5,170	366,004	95.81	0.10	1.41
4	Jawa Tengah	365,198	371,569	777	13,524	1,051,364	98.29	0.07	1.29
5	DI Yogyakarta	46,768	47,967	191	1,295	132,666	97.50	0.14	0.98
6	Jawa Timur	388,097	394,414	2,582	15,470	1,138,692	98.40	0.23	1.36
7	Aceh	62,279	63,589	932	2,486	179,757	97.94	0.52	1.38
8	Sumatera Utara	206,886	210,877	452	11,530	609,223	98.11	0.07	1.89
9	Sumatera Barat	73,435	74,558	881	2,242	210,045	98.49	0.42	1.07
10	Riau	73,567	75,148	278	2,087	212,945	97.90	0.13	0.98
11	Kepulauan Riau	19,075	19,701	211	518	57,091	96.82	0.37	0.91
12	Jambi	37,918	38,777	163	851	109,924	97.78	0.15	0.77
13	Sumatera Selatan	96,611	98,710	573	3,930	281,401	97.87	0.20	1.40
14	Bangka Belitung	13,874	14,432	150	713	41,932	96.13	0.36	1.70
15	Bengkulu	23,488	24,175	73	1,019	68,370	97.16	0.11	1.49
16	Lampung	84,835	86,135	177	4,394	248,942	98.49	0.07	1.77
17	Kalimantan Barat	49,056	49,916	488	2,399	152,078	98.28	0.32	1.58
18	Kalimantan Tengah	24,240	24,839	247	1,005	73,550	97.59	0.34	1.37
19	Kalimantan Selatan	34,376	35,411	183	1,572	102,337	97.08	0.18	1.54
20	Kalimantan Timur	42,267	43,574	369	1,545	127,124	97.00	0.29	1.22
21	Kalimantan Utara	7,136	7,389	76	201	21,540	96.58	0.35	0.93
22	Sulawesi Utara	32,368	33,713	335	1,527	96,358	96.01	0.35	1.58
23	Gorontalo	13,890	14,319	258	617	41,624	97.00	0.62	1.48
24	Sulawesi Tengah	31,622	32,659	209	1,172	96,441	96.82	0.22	1.22
25	Sulawesi Selatan	115,133	117,799	632	4,762	337,262	97.74	0.19	1.41
26	Sulawesi Barat	14,931	15,472	115	723	49,252	96.50	0.23	1.47
27	Sulawesi Tenggara	35,494	36,127	418	2,039	107,486	98.25	0.39	1.90
28	Maluku	26,857	27,833	154	725	79,856	96.49	0.19	0.91
29	Maluku Utara	16,299	16,936	101	452	48,718	96.24	0.21	0.93
30	Bali	55,491	56,871	42	1,497	159,867	97.57	0.03	0.94
31	Nusa Tenggara Barat	51,018	52,099	632	3,349	159,401	97.93	0.40	2.10
32	Nusa Tenggara Timur	67,102	68,593	476	3,225	209,618	97.83	0.23	1.54
33	Papua	24,497	25,428	725	823	73,279	96.34	0.99	1.12
34	Papua Barat	10,531	10,972	306	388	33,364	95.98	0.92	1.16
	Indonesia	2,853,477	2,914,434	15,283	118,353	8,443,817	97.91	0.18	1.40

Jumlah mengulang SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 2.582 dan terkecil di Provinsi Bali sebesar 42. Dengan membandingkan mengulang dengan siswa tahun lalu maka AU terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,99% dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,03% dengan rata-rata nasional sebesar 0,18%.

Jumlah putus sekolah SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 21.889 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 201. Dengan membandingkan putus sekolah dengan siswa tahun lalu maka APS terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,10% dan terkecil terjadi di Provinsi Jambi sebesar 0,77% dengan rata-rata nasional sebesar 1,40%.

Tabel 4.41  
Mutu Siswa SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Nilai Mutu Siswa				Jenis
		AL	AU	APS	Rata-rata	
1	DKI Jakarta	97,87	99,85	99,15	98,96	PARIPURNA
2	Jawa Barat	98,45	99,92	98,56	98,98	PARIPURNA
3	Banten	95,81	99,90	98,65	98,12	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	98,29	99,93	98,86	99,03	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	97,50	99,86	99,11	98,82	PARIPURNA
6	Jawa Timur	98,40	99,78	98,69	98,96	PARIPURNA
7	Aceh	97,94	99,38	98,49	98,60	PARIPURNA
8	Sumatera Utara	98,11	99,93	98,05	98,69	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	98,49	99,54	98,78	98,94	PARIPURNA
10	Riau	97,90	99,86	98,88	98,88	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	96,82	99,63	99,00	98,48	PARIPURNA
12	Jambi	97,78	99,85	99,16	98,93	PARIPURNA
13	Sumatera Selatan	97,87	99,77	98,41	98,69	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	96,13	99,64	98,30	98,02	PARIPURNA
15	Bengkulu	97,16	99,87	98,32	98,45	PARIPURNA
16	Lampung	98,49	99,93	98,17	98,86	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	98,28	99,67	98,16	98,70	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	97,59	99,59	98,49	98,56	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	97,08	99,82	98,42	98,44	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	97,00	99,71	98,81	98,51	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	96,58	99,67	99,08	98,44	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	96,01	99,65	98,38	98,01	PARIPURNA
23	Gorontalo	97,00	99,36	98,47	98,28	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	96,82	99,77	98,59	98,40	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	97,74	99,80	98,44	98,66	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	96,50	99,77	98,53	98,27	PARIPURNA
27	Sulawesi Tenggara	98,25	99,59	97,74	98,53	PARIPURNA
28	Maluku	96,49	99,66	98,92	98,36	PARIPURNA
29	Maluku Utara	96,24	99,82	98,96	98,34	PARIPURNA
30	Bali	97,57	99,97	99,07	98,87	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	97,93	99,57	97,79	98,43	PARIPURNA
32	Nusa Tenggara Timur	97,83	99,75	98,12	98,56	PARIPURNA
33	Papua	96,34	98,84	98,88	98,02	PARIPURNA
34	Papua Barat	95,98	98,86	98,81	97,88	PARIPURNA
	Indonesia	97,91	99,69	98,59	98,73	PARIPURNA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu siswa SM yang terdapat pada Tabel 4.41. Nilai AL terbesar terjadi Provinsi Sumatera Barat dan Lampung masing-masing sebesar 98,49 dan terkecil terjadi di Provinsi Banten sebesar 95,81 dengan rata-rata nasional sebesar 97,91 termasuk kategori paripurna.

Nilai AU SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara masing-masing sebesar 99,93 dan terkecil sebesar 98,84 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 99,69 termasuk kategori paripurna. Nilai APS SM terbesar terjadi di Provinsi Jambi sebesar 99,16 dan terkecil sebesar 97,74 terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga nasional menjadi 98,59 termasuk kategori paripurna.

Dengan demikian, jumlah nilai mutu siswa SM menjadi 98,73 termasuk kategori paripurna. Hal ini berarti mutu siswa SM tercapai 99% dari 100% atau mendekati ideal. Bila dilihat tiap provinsi ternyata semua provinsi termasuk kategori paripurna.

Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,03, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 97,88.

d. Semua Jenjang

Berdasarkan tiga indikator mutu siswa maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.42. Bila dilihat secara nasional maka semua jenjang memiliki nilai mutu siswa termasuk kategori paripurna dengan nilai terbesar pada SMP sebesar 99,37 dan terkecil pada SM sebesar 98,73. Dengan demikian, mutu guru semua jenjang sebesar 99,07 termasuk paripurna.

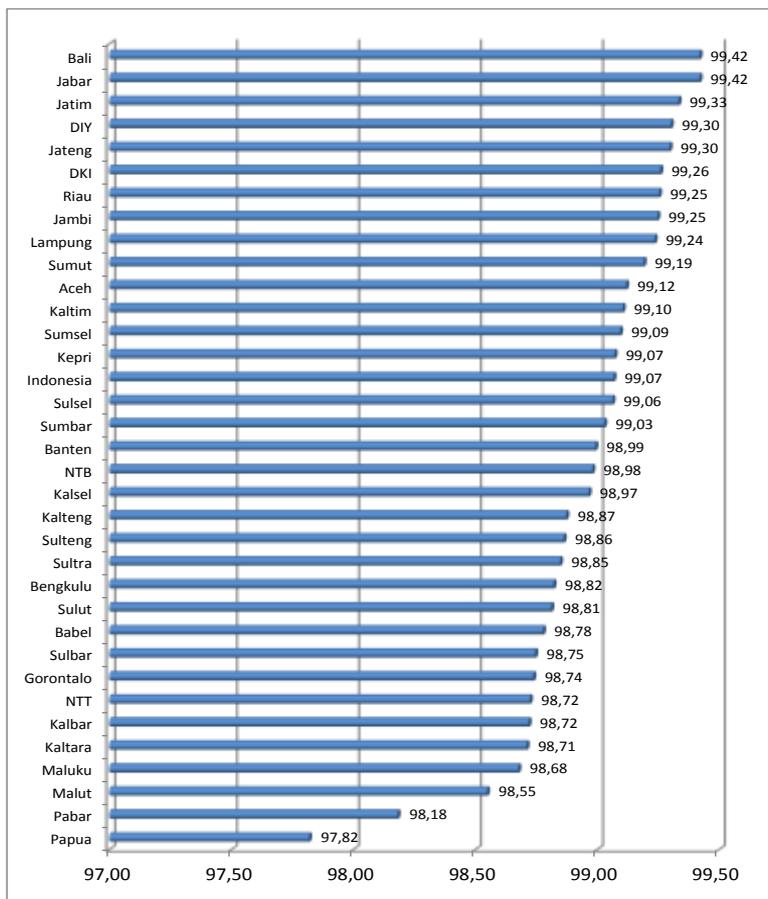
Tabel 4.42  
Mutu Siswa Menurut Jenjang Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	99,68	99,14	98,96	99,26	PARIPURNA
2	Jawa Barat	99,69	99,59	98,98	99,42	PARIPURNA
3	Banten	99,58	99,28	98,12	98,99	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	99,18	99,68	99,03	99,30	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	99,39	99,70	98,82	99,30	PARIPURNA
6	Jawa Timur	99,42	99,62	98,96	99,33	PARIPURNA
7	Aceh	99,36	99,39	98,60	99,12	PARIPURNA
8	Sumatera Utara	99,42	99,46	98,69	99,19	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	98,72	99,42	98,94	99,03	PARIPURNA
10	Riau	99,31	99,57	98,88	99,25	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	99,42	99,31	98,48	99,07	PARIPURNA
12	Jambi	99,22	99,59	98,93	99,25	PARIPURNA
13	Sumatera Selatan	99,22	99,38	98,69	99,09	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	98,76	99,55	98,02	98,78	PARIPURNA
15	Bengkulu	98,98	99,04	98,45	98,82	PARIPURNA
16	Lampung	99,37	99,47	98,86	99,24	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	98,18	99,27	98,70	98,72	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	98,92	99,14	98,56	98,87	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	98,82	99,63	98,44	98,97	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	99,29	99,51	98,51	99,10	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	98,91	98,78	98,44	98,71	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	99,38	99,04	98,01	98,81	PARIPURNA
23	Gorontalo	98,60	99,34	98,28	98,74	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	98,95	99,24	98,40	98,86	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	99,31	99,22	98,66	99,06	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	99,08	98,89	98,27	98,75	PARIPURNA
27	Sulawesi Tenggara	99,00	99,02	98,53	98,85	PARIPURNA
28	Maluku	98,79	98,87	98,36	98,68	PARIPURNA
29	Maluku Utara	98,78	98,53	98,34	98,55	PARIPURNA
30	Bali	99,66	99,72	98,87	99,42	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	99,34	99,17	98,43	98,98	PARIPURNA
32	Nusa Tenggara Timur	98,25	99,36	98,56	98,72	PARIPURNA
33	Papua	98,08	97,36	98,02	97,82	PARIPURNA
34	Papua Barat	98,06	98,60	97,88	98,18	PARIPURNA
	Indonesia	99,10	99,37	98,73	99,07	PARIPURNA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Bila dilihat mutu siswa tiap provinsi maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi Jawa Barat sebesar 99,69, untuk SMP pada Provinsi Bali sebesar 99,72, dan untuk SM pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,03. Sebaliknya, mutu guru terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Papua Barat sebesar 98,06, untuk SMP pada Provinsi Papua sebesar 97,36, dan untuk, sehingga SM pada Provinsi Papua Barat sebesar 97,88.

Mutu siswa semua jenjang terdapat pada Grafik 4.7 di mana terlihat bahwa semua provinsi termasuk kategori paripurna, namun lima provinsi terbawah adalah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Kalimantan Utara. Sebaliknya, lima provinsi teratas adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Grafik 4.7  
Mutu Siswa Semua Jenjang Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016



### 3. Mutu Prasarana

Oleh karena ketersediaan data yang ada maka hanya terdapat satu jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui mutu prasarana, yaitu Rkb. Nilai indikator tersebut menunjukkan mutu prasarana. Nilai maksimal 100, artinya nilai makin mendekati 100 disebut makin bermutu.

Tabel 4.43 menunjukkan data, indikator, dan nilai mutu prasarana menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat ruang kelas milik SD sebesar 1.036.552, SMP sebesar 336.404, dan SM sebesar 271.235. Bila dibandingkan

dengan ruang kelas milik baik maka %Rkb terbesar terjadi pada SM sebesar 67,58% dan terkecil pada SD sebesar 23,85%.

Tabel 4.43  
Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana  
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2015/2016

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
A.	Data					
1	Ruang kelas milik	1.036.552	336.404	271.235		
2	Ruang kelas baik	247.266	90.716	183.292		
B.	Indikator					
1	%Rkb	23,85	26,97	67,58		
C.	Nilai Indikator					
1	%Rkb	23,85	26,97	67,58	39,47	KURANG
	Nilai Mutu Prasarana	23,85	26,97	67,58	39,47	KURANG
	Jenis Mutu Prasarana	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

Berdasarkan standar pada Tabel 3.3 maka nilai mutu prasarana sama dengan %Rkb karena standarnya 100. Dengan demikian, mutu prasarana terbaik pada SM sebesar 67,58 atau termasuk kategori kurang dan terkecil pada SD sebesar 23,85 juga termasuk kategori kurang, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 39,47 termasuk kategori kurang.

a. SD

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis indikator mutu prasarana tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.44. Ruang kelas SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 136.651 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.426. Ruang kelas baik terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 29.038 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 894. Namun, %Rkb terbesar terjadi Provinsi DKI Jakarta sebesar 53,96% dan terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 14,99% dengan rata-rata nasional sebesar 23,85%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 76,15% ruang kelas milik.

Oleh karena standar %Rkb 100 maka tidak dilakukan konversi, sehingga semua provinsi dalam kondisi kurang, dengan nilai nasional sebesar 23,85 termasuk sangat kurang sekali. Dengan demikian, pencapaian mutu prasarana SD sangat kecil sebesar 23,85 atau seperempat dari ruang kelas yang ada. Namun, nilai tertinggi tetap pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 53,96 dan terkecil pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 14,99.

Tabel 4.44  
Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana SD  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data		Mutu 3.3	Nilai Mutu Prasarana	
		Ruang Kelas Milik	Ruang Kelas Baik	%Rkb	%RKB 100	Jenis
1	DKI Jakarta	23,575	12,722	53.96	53.96	KURANG
2	Jawa Barat	136,651	24,212	17.72	17.72	KURANG
3	Banten	34,500	9,906	28.71	28.71	KURANG
4	Jawa Tengah	126,540	26,561	20.99	20.99	KURANG
5	DI Yogyakarta	13,778	3,633	26.37	26.37	KURANG
6	Jawa Timur	133,159	29,038	21.81	21.81	KURANG
7	Aceh	23,821	5,548	23.29	23.29	KURANG
8	Sumatera Utara	69,795	21,105	30.24	30.24	KURANG
9	Sumatera Barat	29,792	8,409	28.23	28.23	KURANG
10	Riau	29,886	7,781	26.04	26.04	KURANG
11	Kepulauan Riau	7,222	2,452	33.95	33.95	KURANG
12	Jambi	17,572	3,517	20.01	20.01	KURANG
13	Sumatera Selatan	34,075	8,914	26.16	26.16	KURANG
14	Bangka Belitung	6,445	2,623	40.70	40.70	KURANG
15	Bengkulu	10,216	2,078	20.34	20.34	KURANG
16	Lampung	33,748	6,083	18.02	18.02	KURANG
17	Kalimantan Barat	28,301	5,470	19.33	19.33	KURANG
18	Kalimantan Tengah	16,696	3,827	22.92	22.92	KURANG
19	Kalimantan Selatan	20,305	5,506	27.12	27.12	KURANG
20	Kalimantan Timur	15,110	4,969	32.89	32.89	KURANG
21	Kalimantan Utara	3,426	894	26.09	26.09	KURANG
22	Sulawesi Utara	14,506	4,735	32.64	32.64	KURANG
23	Gorontalo	6,322	2,254	35.65	35.65	KURANG
24	Sulawesi Tengah	18,779	4,914	26.17	26.17	KURANG
25	Sulawesi Selatan	43,697	10,694	24.47	24.47	KURANG
26	Sulawesi Barat	8,540	1,608	18.83	18.83	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	15,511	3,629	23.40	23.40	KURANG
28	Maluku	11,335	3,045	26.86	26.86	KURANG
29	Maluku Utara	7,798	1,347	17.27	17.27	KURANG
30	Bali	16,311	5,763	35.33	35.33	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	20,754	4,481	21.59	21.59	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	38,269	5,735	14.99	14.99	KURANG
33	Papua	14,172	2,885	20.36	20.36	KURANG
34	Papua Barat	5,945	928	15.61	15.61	KURANG
	Indonesia	1,036,552	247,266	23.85	23.85	KURANG

b. SMP

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis indikator mutu prasarana tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.45. Ruang kelas SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 50.155 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.005. Ruang kelas baik SMP terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 12.114 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 380. Namun, %Rkb SMP terbesar terjadi Provinsi DKI Jakarta sebesar 55,47% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 16,17% dengan rata-rata nasional sebesar 26,97%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 73,03% ruang kelas milik.

Oleh karena standar %Rkb 100 maka tidak dilakukan konversi, sehingga semua provinsi dalam kondisi kurang, dengan nilai nasional sebesar 26,97 termasuk sangat kurang sekali. Dengan demikian, pencapaian mutu prasarana SMP sangat kecil sebesar 26,97 atau seperempat dari ruang kelas yang ada. Namun, nilai tertinggi tetap pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 55,47 dan terkecil pada Provinsi Papua Barat sebesar 16,17.

Tabel 4.45  
Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana SMP  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data		Mutu3.3	Nilai Mutu Prasarana	
		Ruang Kelas Milik	Ruang Kelas Baik	%Rkb	%RKB 100	Jenis
1	DKI Jakarta	11,125	6,171	55.47	55.47	KURANG
2	Jawa Barat	50,155	12,114	24.15	24.15	KURANG
3	Banten	12,799	3,951	30.87	30.87	KURANG
4	Jawa Tengah	40,259	10,501	26.08	26.08	KURANG
5	DI Yogyakarta	4,736	1,562	32.98	32.98	KURANG
6	Jawa Timur	42,741	11,082	25.93	25.93	KURANG
7	Aceh	8,865	1,980	22.34	22.34	KURANG
8	Sumatera Utara	21,789	6,446	29.58	29.58	KURANG
9	Sumatera Barat	8,243	2,332	28.29	28.29	KURANG
10	Riau	8,816	2,382	27.02	27.02	KURANG
11	Kepulauan Riau	2,499	958	38.34	38.34	KURANG
12	Jambi	4,911	982	20.00	20.00	KURANG
13	Sumatera Selatan	10,827	2,518	23.26	23.26	KURANG
14	Bangka Belitung	1,909	815	42.69	42.69	KURANG
15	Bengkulu	3,480	777	22.33	22.33	KURANG
16	Lampung	11,049	2,309	20.90	20.90	KURANG
17	Kalimantan Barat	8,052	1,777	22.07	22.07	KURANG
18	Kalimantan Tengah	4,473	1,156	25.84	25.84	KURANG
19	Kalimantan Selatan	4,754	1,435	30.19	30.19	KURANG
20	Kalimantan Timur	5,087	1,592	31.30	31.30	KURANG
21	Kalimantan Utara	1,005	380	37.81	37.81	KURANG
22	Sulawesi Utara	4,865	1,271	26.13	26.13	KURANG
23	Gorontalo	2,071	749	36.17	36.17	KURANG
24	Sulawesi Tengah	5,488	1,422	25.91	25.91	KURANG
25	Sulawesi Selatan	14,209	3,693	25.99	25.99	KURANG
26	Sulawesi Barat	2,349	476	20.26	20.26	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	5,383	1,216	22.59	22.59	KURANG
28	Maluku	3,844	810	21.07	21.07	KURANG
29	Maluku Utara	2,310	414	17.92	17.92	KURANG
30	Bali	5,102	2,378	46.61	46.61	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	6,630	1,684	25.40	25.40	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	11,098	2,264	20.40	20.40	KURANG
33	Papua	3,786	845	22.32	22.32	KURANG
34	Papua Barat	1,695	274	16.17	16.17	KURANG
	Indonesia	336,404	90,716	26.97	26.97	KURANG

c. SM

Berdasarkan data SM maka dihasilkan analisis indikator mutu prasarana tiap provinsi yang disajikan pada Tabel 4.46. Ruang kelas SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 42.649 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1.153. Ruang kelas baik SM terbesar juga pada Provinsi Jawa Barat sebesar 27.669 dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 794. Namun, %Rkb SM terbesar terjadi Provinsi Kalimantan Utara sebesar 84,11% dan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 59,43% dengan rata-rata nasional sebesar 67,58%. Dengan demikian, masih diperlukan rehabilitasi sebesar 32,42% ruang kelas milik.

Tabel 4.46  
Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana SM  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Data		Mutu 3.3 %Rkb	Nilai Mutu Prasarana	
		Ruang Kelas Milik	Ruang Kelas Baik		%RKB 100	Jenis
1	DKI Jakarta	11.953	8.572	71,71	71,71	KURANG
2	Jawa Barat	42.649	27.669	64,88	64,88	KURANG
3	Banten	11.545	7.590	65,74	65,74	KURANG
4	Jawa Tengah	40.668	27.628	67,94	67,94	KURANG
5	DI Yogyakarta	5.118	3.833	74,89	74,89	KURANG
6	Jawa Timur	31.845	20.178	63,36	63,36	KURANG
7	Aceh	7.202	5.293	73,49	73,49	KURANG
8	Sumatera Utara	18.307	12.548	68,54	68,54	KURANG
9	Sumatera Barat	6.371	4.671	73,32	73,32	KURANG
10	Riau	6.577	4.395	66,82	66,82	KURANG
11	Kepulauan Riau	2.029	1.414	69,69	69,69	KURANG
12	Jambi	3.661	2.388	65,23	65,23	KURANG
13	Sumatera Selatan	7.745	5.809	75,00	75,00	KURANG
14	Bangka Belitung	1.544	1.060	68,65	68,65	KURANG
15	Bengkulu	2.666	1.751	65,68	65,68	KURANG
16	Lampung	8.106	4.987	61,52	61,52	KURANG
17	Kalimantan Barat	5.357	3.942	73,59	73,59	KURANG
18	Kalimantan Tengah	2.650	1.859	70,15	70,15	KURANG
19	Kalimantan Selatan	3.317	2.361	71,18	71,18	KURANG
20	Kalimantan Timur	4.281	3.025	70,66	70,66	KURANG
21	Kalimantan Utara	2.291	1.927	84,11	84,11	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	3.944	2.479	62,85	62,85	KURANG
23	Gorontalo	1.519	1.132	74,52	74,52	KURANG
24	Sulawesi Tengah	3.425	2.184	63,77	63,77	KURANG
25	Sulawesi Selatan	9.431	6.412	67,99	67,99	KURANG
26	Sulawesi Barat	1.336	794	59,43	59,43	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	3.072	2.038	66,34	66,34	KURANG
28	Maluku	2.413	1.605	66,51	66,51	KURANG
29	Maluku Utara	1.694	1.069	63,11	63,11	KURANG
30	Bali	4.350	3.120	71,72	71,72	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	4.284	3.000	70,03	70,03	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	5.964	3.932	65,93	65,93	KURANG
33	Papua	2.768	1.799	64,99	64,99	KURANG
34	Papua Barat	1.153	828	71,81	71,81	KURANG
	Indonesia	271.235	183.292	67,58	67,58	KURANG

Oleh karena standar %Rkb 100 maka tidak dilakukan konversi, sehingga semua provinsi dalam kondisi kurang, kecuali Provinsi Kalimantan Utara sebesar 84,11 termasuk kategori pratama dengan nilai nasional sebesar 67,58 termasuk kurang. Dengan demikian, pencapaian mutu prasarana SM sebesar 67,58 atau dua per tiga. Namun, nilai tertinggi tetap pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 84,11 dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 59,43.

d. Semua Jenjang

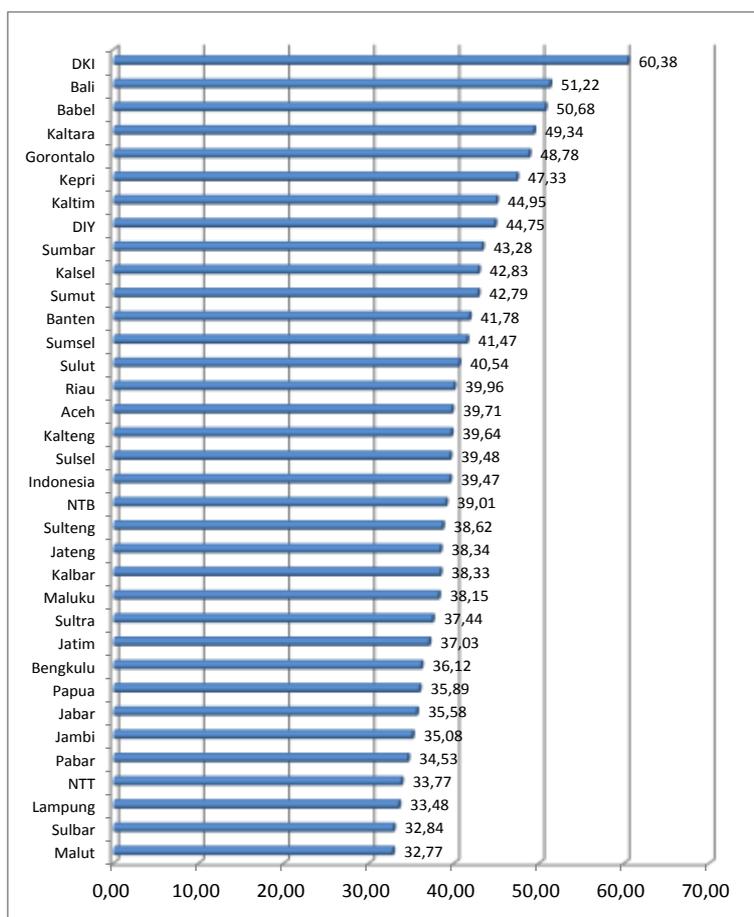
Berdasarkan indikator mutu prasarana maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.47. Bila dilihat secara nasional maka SM memiliki nilai mutu prasarana terbesar sebesar 67,58 termasuk kategori kurang dan terkecil pada SD sebesar 23,85 termasuk kategori sangat kurang sekali. Seperti halnya SD, mutu prasarana SMP sebesar 26,97 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, mutu prasarana semua jenjang sebesar 39,47 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.47  
Mutu Prasarana Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	53,96	55,47	71,71	60,38	KURANG
2	Jawa Barat	17,72	24,15	64,88	35,58	KURANG
3	Banten	28,71	30,87	65,74	41,78	KURANG
4	Jawa Tengah	20,99	26,08	67,94	38,34	KURANG
5	DI Yogyakarta	26,37	32,98	74,89	44,75	KURANG
6	Jawa Timur	21,81	25,93	63,36	37,03	KURANG
7	Aceh	23,29	22,34	73,49	39,71	KURANG
8	Sumatera Utara	30,24	29,58	68,54	42,79	KURANG
9	Sumatera Barat	28,23	28,29	73,32	43,28	KURANG
10	Riau	26,04	27,02	66,82	39,96	KURANG
11	Kepulauan Riau	33,95	38,34	69,69	47,33	KURANG
12	Jambi	20,01	20,00	65,23	35,08	KURANG
13	Sumatera Selatan	26,16	23,26	75,00	41,47	KURANG
14	Bangka Belitung	40,70	42,69	68,65	50,68	KURANG
15	Bengkulu	20,34	22,33	65,68	36,12	KURANG
16	Lampung	18,02	20,90	61,52	33,48	KURANG
17	Kalimantan Barat	19,33	22,07	73,59	38,33	KURANG
18	Kalimantan Tengah	22,92	25,84	70,15	39,64	KURANG
19	Kalimantan Selatan	27,12	30,19	71,18	42,83	KURANG
20	Kalimantan Timur	32,89	31,30	70,66	44,95	KURANG
21	Kalimantan Utara	26,09	37,81	84,11	49,34	KURANG
22	Sulawesi Utara	32,64	26,13	62,85	40,54	KURANG
23	Gorontalo	35,65	36,17	74,52	48,78	KURANG
24	Sulawesi Tengah	26,17	25,91	63,77	38,62	KURANG
25	Sulawesi Selatan	24,47	25,99	67,99	39,48	KURANG
26	Sulawesi Barat	18,83	20,26	59,43	32,84	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	23,40	22,59	66,34	37,44	KURANG
28	Maluku	26,86	21,07	66,51	38,15	KURANG
29	Maluku Utara	17,27	17,92	63,11	32,77	KURANG
30	Bali	35,33	46,61	71,72	51,22	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	21,59	25,40	70,03	39,01	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	14,99	20,40	65,93	33,77	KURANG
33	Papua	20,36	22,32	64,99	35,89	KURANG
34	Papua Barat	15,61	16,17	71,81	34,53	KURANG
	Indonesia	23,85	26,97	67,58	39,47	KURANG
	Jenis	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

Bila dilihat setiap provinsi maka nilai mutu prasarana semua provinsi termasuk kurang dengan nilai terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 60,38 dan terkecil pada Provinsi Maluku Utara sebesar 32,77.

**Grafik 4.8**  
**Mutu Prasarana Semua Jenjang Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**



Keberhasilan pendidikan dilihat dari mutu prasarana pendidikan semua jenjang terdapat pada Grafik 4.8, terlihat bahwa semua provinsi termasuk kategori kurang, namun lima provinsi terbawah adalah Maluku Utara, Sulawesi Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Sebaliknya, lima provinsi teratas adalah DKI Jakarta, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Gorontalo walaupun termasuk kategori kurang.

#### 4. Rangkuman Pembelajaran Bermutu

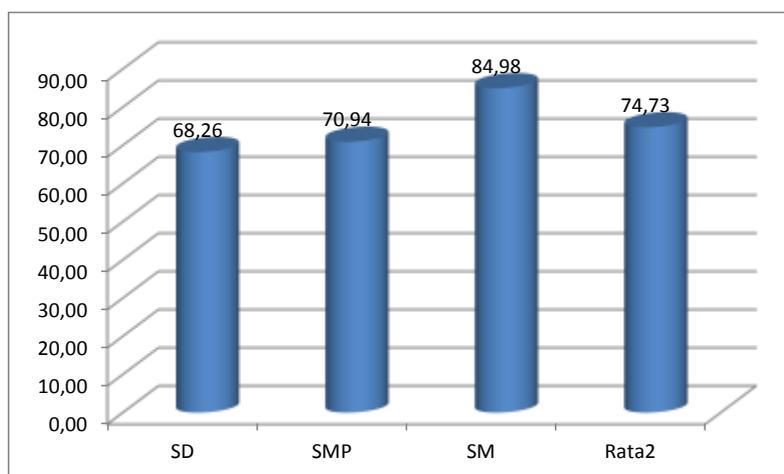
Berdasarkan pembelajaran bermutu tiap jenjang pendidikan yang terdapat pada Tabel 4.48 maka dapat dikatakan bahwa mutu guru tercapai sebesar 85,66 termasuk kategori madya. Mutu siswa memiliki nilai yang paling tinggi sebesar 99,07 termasuk kategori paripurna, sedangkan mutu prasarana memiliki nilai sebesar 39,47 termasuk

kategori kurang. Dengan demikian, rata-rata pembelajaran bermutu menjadi sebesar 74,73 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.48  
Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2015/2016

No.	Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A.	Mutu Guru	81,83	86,50	88,64	85,66	MADYA
B.	Mutu Siswa	99,10	99,37	98,73	99,07	PARIPURNA
C.	Mutu Prasarana	23,85	26,97	67,58	39,47	KURANG
	Pembelajaran Bermutu	68,26	70,94	84,98	74,73	KURANG
	Jenis	KURANG	KURANG	PRATAMA	KURANG	

Grafik 4.9  
Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2015/2016



Bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka nilai pembelajaran bermutu SD sebesar 68,26 termasuk kategori kurang, SMP sebesar 70,94 juga termasuk kategori kurang, dan SM sebesar 84,98 termasuk kategori pratama, sehingga rata-rata tiga kelompok indikator dan tiga jenjang pendidikan sebesar 74,73 termasuk kategori kurang. Hal ini berarti ketercapaian mutu hanya tiga per empat.

Berdasarkan tiga kelompok indikator mutu pendidikan maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.49. Bila dilihat pembelajaran bermutu tiap provinsi maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,04 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,70 termasuk kurang, untuk SM pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 91,91 termasuk utama. Sebaliknya, pembelajaran bermutu terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Papua sebesar 59,59 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi

Maluku sebesar 64,79 termasuk kurang, untuk SM pada Provinsi Banten sebesar 80,33 termasuk pratama. Dengan demikian, rata-rata tiga jenjang terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,84 termasuk pratama dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 69,89 termasuk kurang.

Tabel 4.49  
Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

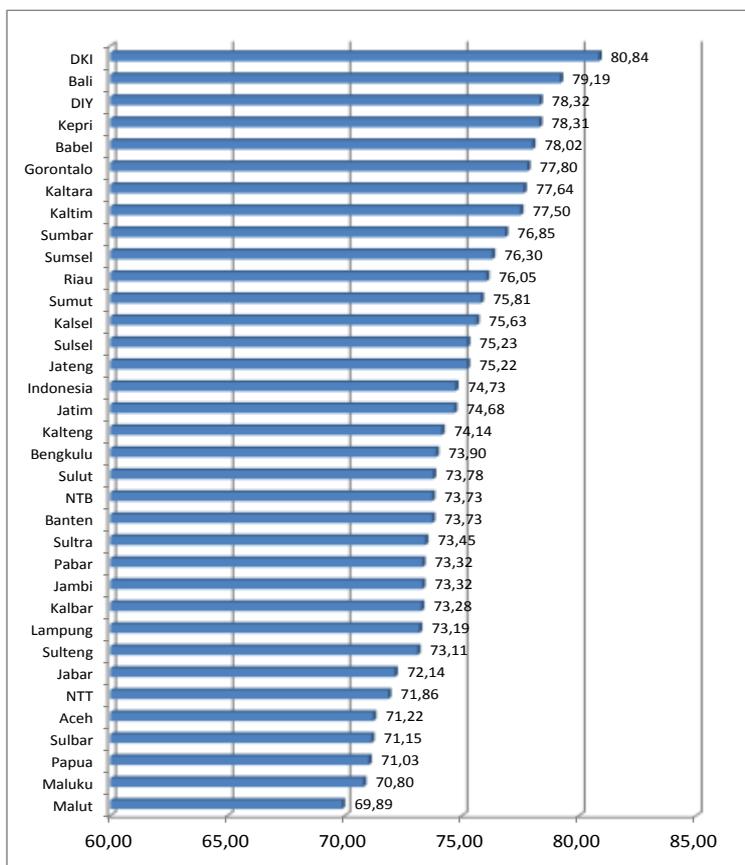
No.	Provinsi	Pembelajaran Bermutu				
		SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	79,04	78,70	84,79	80,84	PRATAMA
2	Jawa Barat	68,33	67,58	80,51	72,14	KURANG
3	Banten	71,14	69,72	80,33	73,73	KURANG
4	Jawa Tengah	69,48	71,86	84,33	75,22	KURANG
5	DI Yogyakarta	69,91	74,84	90,21	78,32	KURANG
6	Jawa Timur	68,34	72,92	82,78	74,68	KURANG
7	Aceh	62,62	65,18	85,87	71,22	KURANG
8	Sumatera Utara	70,66	73,01	83,77	75,81	KURANG
9	Sumatera Barat	70,64	70,62	89,28	76,85	KURANG
10	Riau	70,56	71,79	85,79	76,05	KURANG
11	Kepulauan Riau	74,68	75,47	84,77	78,31	KURANG
12	Jambi	65,45	68,20	86,31	73,32	KURANG
13	Sumatera Selatan	69,64	71,87	87,38	76,30	KURANG
14	Bangka Belitung	75,57	75,04	83,44	78,02	KURANG
15	Bengkulu	66,41	69,18	86,10	73,90	KURANG
16	Lampung	66,24	70,57	82,75	73,19	KURANG
17	Kalimantan Barat	65,02	69,60	85,20	73,28	KURANG
18	Kalimantan Tengah	64,39	69,93	88,11	74,14	KURANG
19	Kalimantan Selatan	67,79	72,88	86,21	75,63	KURANG
20	Kalimantan Timur	73,29	74,10	85,11	77,50	KURANG
21	Kalimantan Utara	66,03	74,98	91,91	77,64	KURANG
22	Sulawesi Utara	68,04	69,64	83,65	73,78	KURANG
23	Gorontalo	72,95	73,54	86,90	77,80	KURANG
24	Sulawesi Tengah	64,63	70,56	84,15	73,11	KURANG
25	Sulawesi Selatan	68,10	72,00	85,59	75,23	KURANG
26	Sulawesi Barat	62,22	68,56	82,65	71,15	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	66,32	68,75	85,26	73,45	KURANG
28	Maluku	63,82	64,79	83,79	70,80	KURANG
29	Maluku Utara	60,70	65,14	83,84	69,89	KURANG
30	Bali	74,61	77,93	85,04	79,19	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	65,92	68,15	87,12	73,73	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	62,34	68,44	84,81	71,86	KURANG
33	Papua	59,59	68,81	84,69	71,03	KURANG
34	Papua Barat	65,11	67,57	87,28	73,32	KURANG
	Indonesia	68,26	70,94	84,98	74,73	KURANG
	Jenis	KURANG	KURANG	PRATAMA	KURANG	

Bila dilihat tiap provinsi ternyata 33 provinsi termasuk kategori kurang dan 1 provinsi termasuk pratama. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,84 termasuk pratama, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 69,89 termasuk kategori kurang.

Keberhasilan pendidikan dilihat dari pembelajaran bermutu pendidikan dapat terlihat jelas pada Grafik 4.10 bahwa lima provinsi terbawah adalah Maluku Utara,

Maluku, Papua, Sulawesi Barat, dan Aceh. Sebaliknya, lima provinsi teratas adalah DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Grafik 4.10  
Rangkuman Pembelajaran Bermutu Semua Jenjang Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016



### C. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan

Dengan menggunakan rumus yang terdapat pada Metodologi maka keberhasilan program pendidikan dihitung dari misi 2 akses pendidikan dan misi 3 pembelajaran yang bermutu. Keberhasilan program pembangunan pendidikan disajikan pada Tabel 4.50 maka akses pendidikan SD sebesar 84,18 dan pembelajaran bermutu SD sebesar 68,26, sehingga keberhasilan program SD sebesar 76,18 termasuk kategori kurang. Akses pendidikan SMP sebesar 90,10 dan pembelajaran bermutu SMP sebesar 70,94, sehingga keberhasilan program SMP sebesar 80,52 termasuk kategori pratama. Akses pendidikan SM sebesar 84,93 dan pembelajaran bermutu SM sebesar 84,98, sehingga keberhasilan program SM sebesar 85,08 termasuk kategori madya.

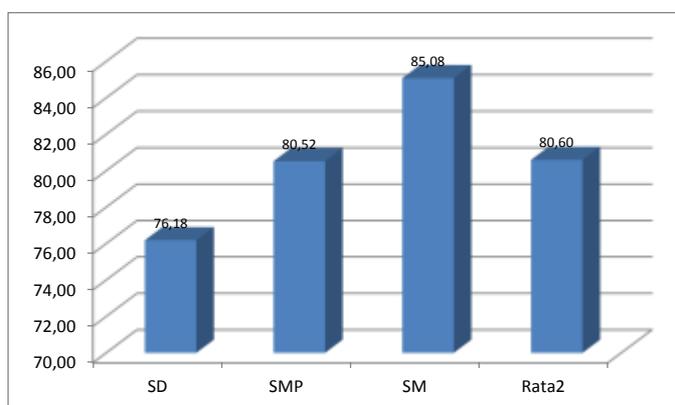
**Tabel 4.50**  
**Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Misi 2, 3 dan Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Nilai Indikator	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
A.	Akses Pendidikan	84,18	90,10	84,93	86,41	MADYA
	1. Akses yang Meluas	72,47	92,72	79,51	81,56	PRATAMA
	2. Akses yang Merata	94,63	90,60	95,26	93,49	UTAMA
	3. Akses yang Berkeadilan	85,46	87,00	80,03	84,16	PRATAMA
B.	Pembelajaran yang Bermutu	68,26	70,94	84,98	74,73	KURANG
	1. Mutu Guru	81,83	86,50	88,64	85,66	MADYA
	2. Mutu Siswa	99,10	99,37	98,73	99,07	PARIPURNA
	3. Mutu Prasarana	23,85	26,97	67,58	39,47	KURANG
	Keberhasilan Program	76,18	80,52	85,08	80,60	PRATAMA
	Jenis Keberhasilan Program	KURANG	PRATAMA	MADYA	PRATAMA	

Oleh karena itu, program pendidikan SD perlu ditingkatkan terutama dalam akses yang meluas sebesar 72,47 yang termasuk kurang dan mutu prasarana sebesar 23,85 yang sangat kurang. Program pendidikan SMP perlu ditingkatkan terutama pada mutu prasarana sebesar 26,97 yang sangat kurang. Program pendidikan SM perlu ditingkatkan pada akses yang meluas sebesar 79,51 yang termasuk kurang dan mutu prasarana sebesar 67,58 yang termasuk kurang.

Dengan demikian, keberhasilan program pendidikan rata-rata tiga jenjang sebesar 80,60 termasuk kategori pratama dengan akses pendidikan sebesar 86,41 dan pembelajaran bermutu sebesar 74,73 termasuk kategori kurang.

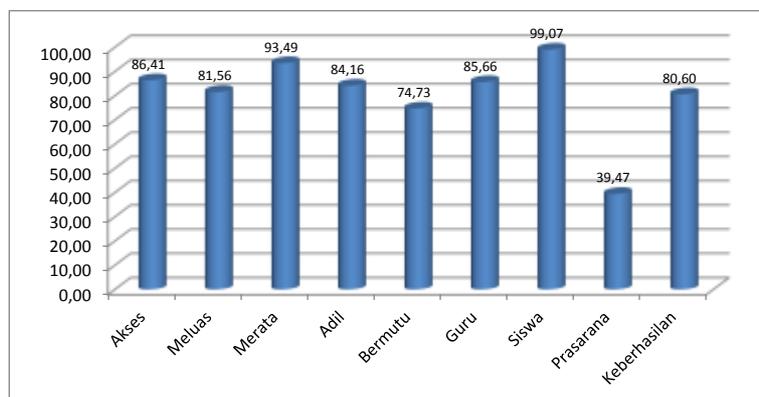
**Grafik 4.11**  
**Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2015/2016**



Berdasarkan Grafik 4.11 terlihat bahwa keberhasilan program pendidikan menurut jenjang pendidikan maka pendidikan SM yang terbaik sebesar 85,08 termasuk kategori madya dan pendidikan SD yang terburuk sebesar 76,18 termasuk kategori kurang, sedangkan rata-rata tiga jenjang sebesar 80,60 termasuk pratama.

Oleh karena itu, rata-rata program pendidikan tiga jenjang yang perlu ditingkatkan terutama dalam pembelajaran yang bermutu sebesar 74,73 yang termasuk kurang karena mutu prasarana sebesar 39,47 yang sangat kurang. Sebaliknya, mutu siswa yang terbaik sebesar 99,07 mendekati ideal. Kemudian akses yang merata sebesar 93,49 juga mendekati ideal.

Grafik 4.12  
Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Misi 2 dan 3 Pendidikan  
Tahun 2015/2016



a. SD

Berdasarkan Tabel 4.51 diketahui keberhasilan pendidikan SD menurut misi 2 dan misi 3 pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa akses pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai tertinggi sebesar 93,67 termasuk kategori utama dan Provinsi Papua memiliki nilai terendah sebesar 73,41 termasuk kurang, sehingga secara nasional akses pendidikan menjadi 84,18 termasuk pratama. Namun, pembelajaran bermutu tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,04 termasuk kurang dan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 59,59 termasuk kategori kurang, sehingga pembelajaran bermutu nasional menjadi 68,26 termasuk kurang.

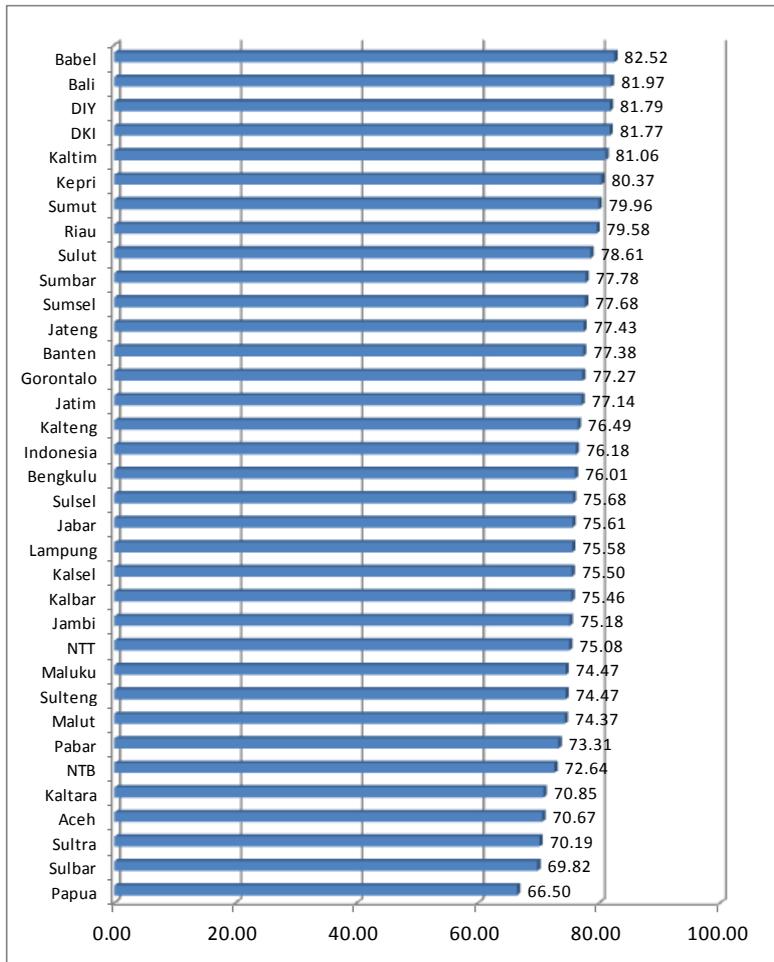
Jadi, keberhasilan program pendidikan SD terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 82,52 termasuk pratama dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 66,50 termasuk kurang, sehingga nasional menjadi 76,18 termasuk kategori kurang. Hal ini disebabkan 28 provinsi termasuk kategori kurang dan 6 provinsi termasuk kategori pratama.

Tabel 4.51  
Keberhasilan Program Pendidikan SD Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Akses	Mutu	Keberhasilan Program	
				Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	84,50	79,04	81,77	PRATAMA
2	Jawa Barat	82,89	68,33	75,61	KURANG
3	Banten	83,61	71,14	77,38	KURANG
4	Jawa Tengah	85,39	69,48	77,43	KURANG
5	DI Yogyakarta	93,67	69,91	81,79	PRATAMA
6	Jawa Timur	85,93	68,34	77,14	KURANG
7	Aceh	78,71	62,62	70,67	KURANG
8	Sumatera Utara	89,26	70,66	79,96	KURANG
9	Sumatera Barat	84,92	70,64	77,78	KURANG
10	Riau	88,59	70,56	79,58	KURANG
11	Kepulauan Riau	86,05	74,68	80,37	PRATAMA
12	Jambi	84,91	65,45	75,18	KURANG
13	Sumatera Selatan	85,73	69,64	77,68	KURANG
14	Bangka Belitung	89,47	75,57	82,52	PRATAMA
15	Bengkulu	85,61	66,41	76,01	KURANG
16	Lampung	84,93	66,24	75,58	KURANG
17	Kalimantan Barat	85,90	65,02	75,46	KURANG
18	Kalimantan Tengah	88,58	64,39	76,49	KURANG
19	Kalimantan Selatan	83,20	67,79	75,50	KURANG
20	Kalimantan Timur	88,83	73,29	81,06	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	75,67	66,03	70,85	KURANG
22	Sulawesi Utara	89,19	68,04	78,61	KURANG
23	Gorontalo	81,58	72,95	77,27	KURANG
24	Sulawesi Tengah	84,30	64,63	74,47	KURANG
25	Sulawesi Selatan	83,26	68,10	75,68	KURANG
26	Sulawesi Barat	77,41	62,22	69,82	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	74,06	66,32	70,19	KURANG
28	Maluku	85,13	63,82	74,47	KURANG
29	Maluku Utara	88,05	60,70	74,37	KURANG
30	Bali	89,34	74,61	81,97	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	79,35	65,92	72,64	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	87,81	62,34	75,08	KURANG
33	Papua	73,41	59,59	66,50	KURANG
34	Papua Barat	81,51	65,11	73,31	KURANG
	Indonesia	84,18	68,26	76,18	KURANG
	Jenis Keberhasilan	PRATAMA	KURANG	KURANG	

Berdasarkan Grafik 4.13 maka keberhasilan program pembangunan SD lima provinsi teratas ada pada Bangka Belitung, Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur, sedangkan terkecil ada pada Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Kalimantan Utara.

**Grafik 4.13**  
Keberhasilan Program Pendidikan SD Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016



**b. SMP**

Berdasarkan Tabel 4.52 diketahui keberhasilan program pendidikan SMP menurut misi 2 dan misi 3 pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa akses pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai tertinggi sebesar 97,64 termasuk kategori paripurna dan Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai terendah sebesar 82,86 termasuk kategori pratama, sehingga secara nasional akses pendidikan menjadi 90,10 termasuk kategori utama. Namun, pembelajaran bermutu tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,70 dan Provinsi Maluku memiliki nilai terendah sebesar 64,79 termasuk kategori kurang, sehingga pembelajaran bermutu nasional menjadi 70,94 termasuk kurang.

Tabel 4.52  
Keberhasilan Program Pendidikan SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

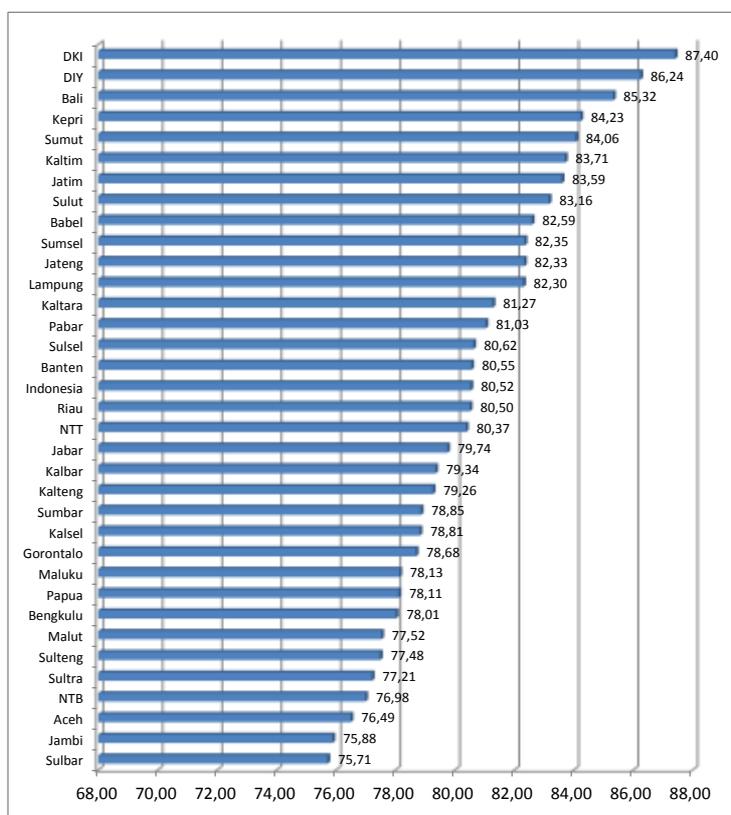
No.	Provinsi	Akses	Mutu	Keberhasilan Program	
				Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	96,10	78,70	87,40	MADYA
2	Jawa Barat	91,91	67,58	79,74	KURANG
3	Banten	91,39	69,72	80,55	PRATAMA
4	Jawa Tengah	92,81	71,86	82,33	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	97,64	74,84	86,24	MADYA
6	Jawa Timur	94,27	72,92	83,59	PRATAMA
7	Aceh	87,80	65,18	76,49	KURANG
8	Sumatera Utara	95,11	73,01	84,06	PRATAMA
9	Sumatera Barat	87,09	70,62	78,85	KURANG
10	Riau	89,20	71,79	80,50	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	92,99	75,47	84,23	PRATAMA
12	Jambi	83,57	68,20	75,88	KURANG
13	Sumatera Selatan	92,82	71,87	82,35	PRATAMA
14	Bangka Belitung	90,14	75,04	82,59	PRATAMA
15	Bengkulu	86,84	69,18	78,01	KURANG
16	Lampung	94,03	70,57	82,30	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	89,08	69,60	79,34	KURANG
18	Kalimantan Tengah	88,59	69,93	79,26	KURANG
19	Kalimantan Selatan	84,75	72,88	78,81	KURANG
20	Kalimantan Timur	93,31	74,10	83,71	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	87,56	74,98	81,27	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	96,68	69,64	83,16	PRATAMA
23	Gorontalo	83,83	73,54	78,68	KURANG
24	Sulawesi Tengah	84,41	70,56	77,48	KURANG
25	Sulawesi Selatan	89,25	72,00	80,62	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	82,86	68,56	75,71	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	85,66	68,75	77,21	KURANG
28	Maluku	91,48	64,79	78,13	KURANG
29	Maluku Utara	89,91	65,14	77,52	KURANG
30	Bali	92,72	77,93	85,32	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	85,81	68,15	76,98	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	92,30	68,44	80,37	PRATAMA
33	Papua	87,41	68,81	78,11	KURANG
34	Papua Barat	94,49	67,57	81,03	PRATAMA
	Indonesia	90,10	70,94	80,52	PRATAMA
	Jenis Keberhasilan	UTAMA	KURANG	PRATAMA	

Jadi, keberhasilan program pendidikan SMP terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 87,40 termasuk madya dan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 75,71 termasuk kurang, sehingga secara nasional menjadi 80,52 termasuk kategori pratama. Hal ini disebabkan 16 provinsi termasuk kategori kurang, 15 provinsi termasuk pratama, dan 3 provinsi termasuk kategori madya.

Berdasarkan Grafik 4.14 maka keberhasilan program pembangunan SMP lima provinsi terbesar ada pada DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau. dan

Sumatera Utara, sedangkan terkecil ada pada Sulawesi Barat, Jambi, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Grafik 4.14  
Keberhasilan Program Pendidikan SMP Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016



#### d. SM

Berdasarkan Tabel 4.53 diketahui keberhasilan program pendidikan SM menurut misi 2 dan misi 3 pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa akses pendidikan di Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi sebesar 92,15 termasuk kategori utama dan Provinsi Papua memiliki nilai terendah sebesar 78,19 termasuk kategori pratama, sehingga secara nasional akses pendidikan menjadi 84,93 termasuk pratama. Namun, pembelajaran bermutu tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 91,91 dan Provinsi Banten memiliki nilai terendah sebesar 80,33 termasuk kategori pratama, sehingga secara nasional pembelajaran bermutu menjadi 84,98 termasuk pratama.

Jadi, keberhasilan program pendidikan SM terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 91,13 termasuk utama dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 81,44 termasuk pratama, sehingga secara nasional menjadi 85,08 termasuk

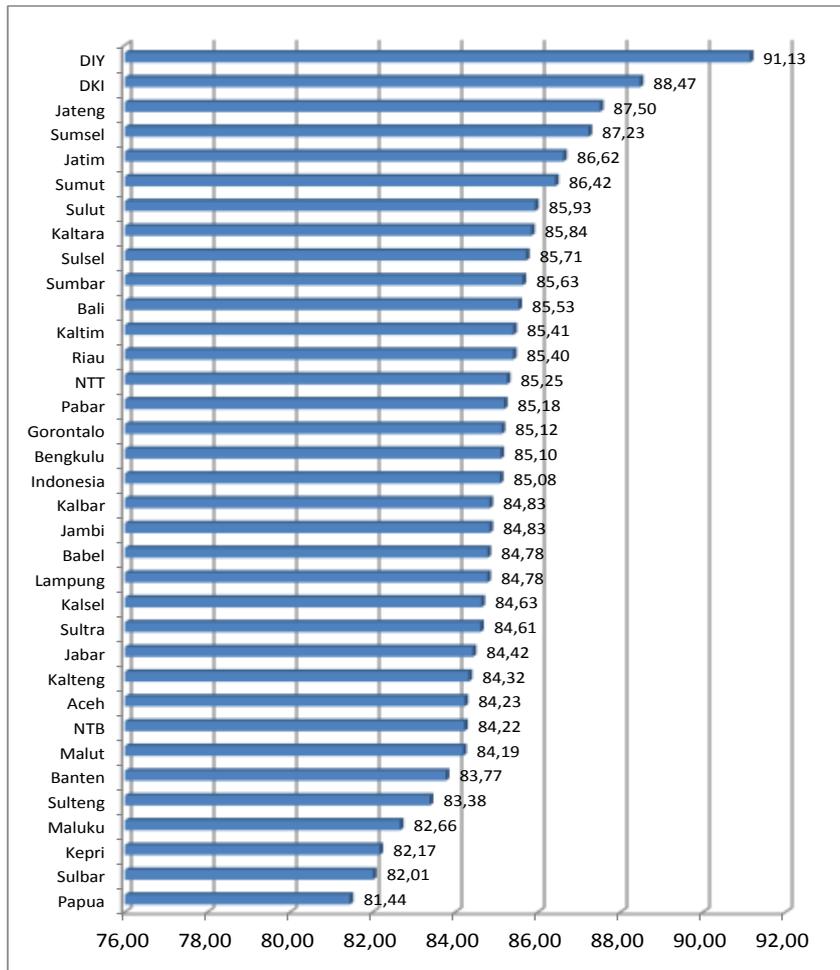
kategori madya. Hal ini disebabkan 17 provinsi termasuk pratama, 16 provinsi termasuk kategori madya, dan 1 provinsi termasuk utama.

Tabel 4.53  
Keberhasilan Program Pendidikan SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016

No.	Provinsi	Akses	Mutu	Keberhasilan Program	
				Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	92,15	84,79	88,47	MADYA
2	Jawa Barat	88,34	80,51	84,42	PRATAMA
3	Banten	87,20	80,33	83,77	PRATAMA
4	Jawa Tengah	90,68	84,33	87,50	MADYA
5	DI Yogyakarta	92,06	90,21	91,13	UTAMA
6	Jawa Timur	90,45	82,78	86,62	MADYA
7	Aceh	82,58	85,87	84,23	PRATAMA
8	Sumatera Utara	89,07	83,77	86,42	MADYA
9	Sumatera Barat	81,98	89,28	85,63	MADYA
10	Riau	85,01	85,79	85,40	MADYA
11	Kepulauan Riau	79,56	84,77	82,17	PRATAMA
12	Jambi	83,35	86,31	84,83	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	87,07	87,38	87,23	MADYA
14	Bangka Belitung	86,12	83,44	84,78	PRATAMA
15	Bengkulu	84,10	86,10	85,10	MADYA
16	Lampung	86,80	82,75	84,78	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	84,46	85,20	84,83	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	80,54	88,11	84,32	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	83,06	86,21	84,63	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	85,70	85,11	85,41	MADYA
21	Kalimantan Utara	79,77	91,91	85,84	MADYA
22	Sulawesi Utara	88,22	83,65	85,93	MADYA
23	Gorontalo	83,35	86,90	85,12	MADYA
24	Sulawesi Tengah	82,61	84,15	83,38	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	85,84	85,59	85,71	MADYA
26	Sulawesi Barat	81,37	82,65	82,01	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	83,95	85,26	84,61	PRATAMA
28	Maluku	81,54	83,79	82,66	PRATAMA
29	Maluku Utara	84,54	83,84	84,19	PRATAMA
30	Bali	86,02	85,04	85,53	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	81,31	87,12	84,22	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	85,69	84,81	85,25	MADYA
33	Papua	78,19	84,69	81,44	PRATAMA
34	Papua Barat	83,08	87,28	85,18	MADYA
	Indonesia	84,93	84,98	85,08	MADYA
	Jenis Keberhasilan	PRATAMA	PRATAMA	MADYA	

Berdasarkan Grafik 4.15 maka keberhasilan program pembangunan SM lima provinsi teratas ada pada DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur, sedangkan lima provinsi terendah ada pada Papua, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

**Grafik 4.15**  
Keberhasilan Program Pendidikan SM Tiap Provinsi  
Tahun 2015/2016



**d. Semua Jenjang**

Berdasarkan indikator akses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.54. Bila dilihat secara nasional maka SM memiliki nilai keberhasilan terbesar sebesar 85,08 termasuk kategori madya dan terkecil pada SD sebesar 76,18 termasuk kategori kurang. Keberhasilan SMP sebesar 80,52 termasuk pratama. Dengan demikian, keberhasilan semua jenjang sebesar 80,60 termasuk kategori kurang.

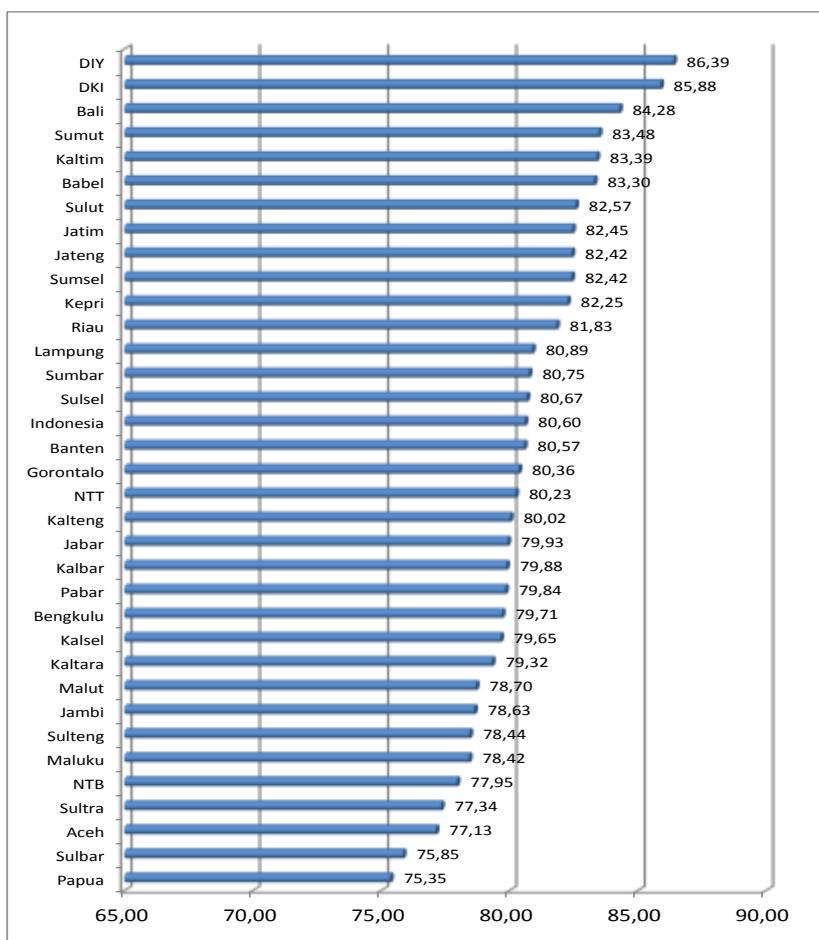
**Tabel 4.54**  
**Keberhasilan Program Pendidikan Semua Jenjang Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	
					Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	81,77	87,40	88,47	85,88	MADYA
2	Jawa Barat	75,61	79,74	84,42	79,93	KURANG
3	Banten	77,38	80,55	83,77	80,57	PRATAMA
4	Jawa Tengah	77,43	82,33	87,50	82,42	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	81,79	86,24	91,13	86,39	MADYA
6	Jawa Timur	77,14	83,59	86,62	82,45	PRATAMA
7	Aceh	70,67	76,49	84,23	77,13	KURANG
8	Sumatera Utara	79,96	84,06	86,42	83,48	PRATAMA
9	Sumatera Barat	77,78	78,85	85,63	80,75	PRATAMA
10	Riau	79,58	80,50	85,40	81,83	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	80,37	84,23	82,17	82,25	PRATAMA
12	Jambi	75,18	75,88	84,83	78,63	KURANG
13	Sumatera Selatan	77,68	82,35	87,23	82,42	PRATAMA
14	Bangka Belitung	82,52	82,59	84,78	83,30	PRATAMA
15	Bengkulu	76,01	78,01	85,10	79,71	KURANG
16	Lampung	75,58	82,30	84,78	80,89	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	75,46	79,34	84,83	79,88	KURANG
18	Kalimantan Tengah	76,49	79,26	84,32	80,02	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	75,50	78,81	84,63	79,65	KURANG
20	Kalimantan Timur	81,06	83,71	85,41	83,39	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	70,85	81,27	85,84	79,32	KURANG
22	Sulawesi Utara	78,61	83,16	85,93	82,57	PRATAMA
23	Gorontalo	77,27	78,68	85,12	80,36	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	74,47	77,48	83,38	78,44	KURANG
25	Sulawesi Selatan	75,68	80,62	85,71	80,67	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	69,82	75,71	82,01	75,85	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	70,19	77,21	84,61	77,34	KURANG
28	Maluku	74,47	78,13	82,66	78,42	KURANG
29	Maluku Utara	74,37	77,52	84,19	78,70	KURANG
30	Bali	81,97	85,32	85,53	84,28	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	72,64	76,98	84,22	77,95	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	75,08	80,37	85,25	80,23	PRATAMA
33	Papua	66,50	78,11	81,44	75,35	KURANG
34	Papua Barat	73,31	81,03	85,18	79,84	KURANG
	Indonesia	76,18	80,52	85,08	80,60	PRATAMA
	Jenis Keberhasilan	KURANG	PRATAMA	MADYA	PRATAMA	

Bila dilihat setiap provinsi maka rata-rata tiga jenjang memiliki nilai keberhasilan program pendidikan terbesar pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 86,39 termasuk kategori madya dan terkecil pada Provinsi Papua sebesar 75,35 termasuk kategori kurang. Hal ini disebabkan 15 provinsi termasuk kurang, 17 provinsi termasuk pratama, dan 2 provinsi termasuk kategori madya.

Keberhasilan pendidikan rata-rata tiga jenjang dapat dilihat pada Grafik 4.16 dengan lima provinsi terkecil adalah Papua, Sulawesi Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Sebaliknya, lima provinsi terbesar adalah DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.

**Grafik 4.16**  
**Keberhasilan Program Pendidikan Semua Jenjang Tiap Provinsi**  
**Tahun 2015/2016**



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Keberhasilan program pendidikan dihitung dari komposit indikator akses pendidikan yang terdiri dari tiga akses dan pembelajaran bermutu yang terdiri dari tiga jenis mutu. Oleh karena itu, akses pendidikan dihitung dari tiga akses dan pembelajaran bermutu juga dihitung dari tiga jenis mutu. Oleh karena jenis indikator tersebut dalam satuan yang berbeda maka dilakukan proses konversi sehingga menghasilkan nilai dengan satuan yang sama dengan jumlah nilai maksimum sebesar 100. Hasilnya menjadi dasar penilaian terhadap keberhasilan program pendidikan.

Sesuai dengan tujuan pertama maka akses pendidikan rata-rata tiga jenjang sebesar 86,41 termasuk madya atau tercapai hanya tujuh per delapan. Akses pendidikan yang terbesar adalah SMP sebesar 90,10 termasuk utama dan terkecil adalah SD sebesar 84,18 termasuk pratama. Akses yang meluas rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 81,56 termasuk pratama, akses yang merata rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 93,49 termasuk utama, dan akses yang berkeadilan rata-rata tiga jenjang sebesar 84,16 termasuk pratama.

Tujuan kedua adalah pembelajaran yang bermutu maka rata-rata tiga jenjang sebesar 74,73 termasuk kurang atau tercapai hanya tiga per empat. Mutu yang terbesar adalah SM sebesar 84,98 termasuk pratama dan terkecil adalah SD sebesar 68,26 termasuk kategori kurang. Mutu guru rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 85,66 termasuk madya, mutu siswa rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 99,07 termasuk paripurna, dan mutu prasarana rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 39,47 termasuk kategori kurang.

Tujuan ketiga adalah keberhasilan program pembangunan pendidikan dilihat untuk tiap jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SM, dan rata-rata tiga jenjang sebesar 80,60 termasuk pratama, artinya tercapai hanya empat per lima. Bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka keberhasilan pendidikan terbesar adalah SM sebesar 85,08 termasuk madya dan terkecil adalah SD sebesar 76,18 termasuk kurang, dan SMP sebesar 80,52 termasuk pratama.

Bila dilihat tiap provinsi maka keberhasilan program pembangunan pendidikan SD sebesar 76,18 termasuk kurang. Lima peringkat tertinggi adalah Provinsi Bangka Belitung, Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, lima peringkat terendah adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Kalimantan Utara.

Bila dilihat tiap provinsi maka keberhasilan program pembangunan pendidikan SMP sebesar 80,53 termasuk kategori pratama. Lima peringkat tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.

Sebaliknya, lima peringkat terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat, Jambi, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Bila dilihat setiap provinsi maka keberhasilan program pembangunan pendidikan SM sebesar 85,08 termasuk kategori madya. Lima peringkat tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Sebaliknya, lima peringkat terendah adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tiga jenjang sebesar 80,60 termasuk pratama. Lima peringkat tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Sebaliknya, lima peringkat terendah adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

## B. Saran

Memperhatikan simpulan di atas maka dipandang perlu adanya tindak lanjut yang diupayakan demi mendekatkan keberhasilan program pendidikan menuju yang lebih baik atau mencapai paripurna. Untuk itu, saran yang diberikan dirinci menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:

1. SD perlu ditingkatkan keberhasilannya terutama pada misi 2 akses yang meluas karena nilainya sebesar 72,47 termasuk kategori kurang melalui cara penambahan ruang perpustakaan yang nilainya sangat kecil sebesar 12,65 dan laboratorium yang nilainya sebesar 59,10 sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga peningkatan pada misi 3 mutu prasarana karena nilainya sebesar 23,85 termasuk kategori kurang melalui rehabilitasi ruang kelas sesuai dengan kebutuhan. Bila kedua indikator tersebut ditingkatkan akses dan mutunya diharapkan keberhasilan program pendidikan SD juga akan meningkat.
2. SMP perlu ditingkatkan keberhasilannya terutama pada misi 3 mutu prasarana karena nilainya sebesar 26,97 termasuk kategori kurang. Untuk itu mutu prasarana dapat dilaksanakan melalui rehabilitasi ruang kelas. Bila indikator tersebut ditingkatkan maka diharapkan keberhasilan program pendidikan SMP juga akan meningkat.
3. SM perlu ditingkatkan keberhasilannya terutama pada misi 2 akses yang meluas karena nilainya sebesar 79,51 termasuk kategori kurang melalui peningkatan cara penambahan ruang perpustakaan yang nilainya sebesar 65,76 dan laboratorium yang nilainya sebesar 35,61 sesuai dengan kebutuhan. Bila indikator persentase ruang perpustakaan dan laboratorium tersebut ditingkatkan maka diharapkan keberhasilan program pendidikan SM juga akan meningkat.
4. Bila ketiga jenjang pendidikan tersebut dapat ditingkatkan semua indikatornya maka diharapkan keberhasilan program pendidikan tiap provinsi juga akan meningkat. Pada akhirnya secara nasional keberhasilan program pendidikan dasar dan menengah juga akan meningkat.

### C. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan bukan terhadap simpulan yang dihasilkan melainkan mengenai metode yang digunakan adalah:

1. Pengungkapan keberhasilan program pendidikan ini didasarkan atas gencarnya pandangan pemerhati pendidikan mengenai misi 2 dan misi 3 pendidikan, sehingga ditetapkan untuk memfokuskan kriteria dengan menerapkan 17 indikator yang ada. Tidak tertutup kemungkinan bahwa langkah ini malah mendatangkan hasil yang cukup berbeda dari hasil yang diperoleh jika dilakukan penerapan dengan menggunakan semua indikator yang ada, baik ke arah positif maupun ke arah negatif. Oleh sebab itu, untuk kajian selanjutnya sebaiknya dapat digunakan indikator yang lebih lengkap.
2. Salah satu indikator penting dalam kaitan dengan mutu pendidikan ialah kelayakan guru mengajar, untuk jenjang pendidikan haruslah berijazah Sarjana/S1 atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi untuk semua jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan mutu di SD dan SMP menurun karena pada kenyataannya masih banyak guru SD yang berijazah di bawah S1/Diploma 4, guru SMP yang berijazah Diploma 2, demikian juga masih banyak guru SM yang berijazah Diploma 3 atau Sarjana Muda.
3. Keberhasilan pendidikan yang diindikasikan oleh komposit dari indikator-indikator yang digunakan dalam kajian ini dipersyaratkan pula oleh indikator lainnya seperti prasarana. Dalam kajian ini hanya digunakan data mengenai ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium untuk mengetahui akses yang meluas. Bila dikaitkan dengan mutu untuk semua jenjang maka ketidaktersediaan data perpustakaan, ruang UKS, laboratorium yang baik dan prasarana lainnya yang baik menyebabkan hasil lebih baik atau bahkan lebih buruk karena hanya satu jenis prasarana yang tersedia datanya. Oleh sebab itu, dalam kajian mendatang, perlu diikuti indikator sarana dan prasarana lainnya seperti ruang komputer, ruang UKS, dan indikator lainnya yang baik di setiap jenjang yang dapat membawa dampak terhadap keberhasilan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 23, Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15, Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015a. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019*. Jakarta. Pusat Informasi dan Humas.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 11, Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Kintamani, Ida. 2016. *Penyusunan Profil Pendidikan Dasar dan Menengah 2015/2016 dalam rangka workshop di Bengkulu dan Mataram*. Jakarta. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2015a. *Statistik Persekolahan Sekolah Dasar 2014/2015*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2015b. *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Pertama 2014/2015*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2015c. *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Atas 2014/2015*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2015d. *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan 2013/2014*. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2015e. *Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Tahun 2013/2014*. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- UNESCO/OECD, 2016, *Education at a Glance 2015*, UNESCO Publishing & Bernan Press.